



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 5
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2005
TENTANG
RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN
KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

BUKU RINCI
BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

BAB 1 PENDAHULUAN..... V.1- 1

1.1 Latar Belakang V.1- 1

1.2 Rangkuman Kerusakan dan Permasalahan..... V.1- 1

1.3 Tahap Penyusunan Rencana V.1- 3

1.4 Maksud dan Tujuan..... V.1- 4

1.5 Ruang Lingkup..... V.1- 4

1.6 Organisasi Penulisan V.1- 4

BAB 2 DAMPAK BENCANA TERHADAP PEREKONOMIAN ACEH..... V.2- 1

2.1 Kondisi Provinsi NAD sebelum Bencana V.2- 1

2.2 Perkiraan Dampak terhadap Perekonomian NAD V.2- 3

2.3 Dampak Bencana terhadap Tingkat Pengangguran di Aceh..... V.2- 5

2.4 Perkiraan Dampak terhadap Kemiskinan V.2- 6

2.5 Perkiraan Hilangnya Lapangan Pekerjaan V.2- 7

BAB 3 SASARAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI V.3- 1

3.1 Prinsip-prinsip Umum dan Pelaksanaan Program V.3- 1

3.2 Sasaran V.3- 3

3.3 Kebijakan dan Strategi V.3- 4

BAB 4 LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN..... V.4- 1

4.1 Memulihkan pendapatan (*income generation*) V.4- 1

4.2 Pemulihan Infrastruktur Publik..... V.4- 5

4.3 Memulihkan Sistem Perbankan V.4- 6

4.4 Mendukung pemulihan sarana produksi non publik..... V.4- 9

4.5 Peningkatan Akses Sumber Daya Produktif V.4-12

BAB 5 MEKANISME PELAKSANAAN DAN MONITORING V.5- 1

5.1 Mekanisme Pelaksanaan V.5- 1

5.2 Monitoring dan Evaluasi V.5- 3

BAB 6 ISU LINTAS BIDANG V.6- 1

6.1 Bantuan Pemulihan Aset Produktif Non Publik (Harta Milik Pribadi) V.6- 1

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pasca bencana gempa bumi tektonik dan gelombang tsunami membawa pada kondisi yang sangat memprihatinkan dengan melihat kerusakan fisik yang sangat parah di propinsi NAD dan Sumatera Utara. Sejalan dengan kondisi terhentinya seluruh aktivitas ekonomi di propinsi NAD dan Sumut yang dilanda bencana, masalah ketenagakerjaan yang sudah menjadi isu nasional semakin menonjol.

Perekonomian Propinsi NAD sebelum terjadi bencana didominasi oleh sektor pertanian, migas, dan industri pengolahan. Struktur sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2003 mencapai lebih dari 28%, sektor migas dan industri pengolahan masing-masing mencapai hampir 20%. Terhentinya aktivitas kegiatan ekonomi tersebut membawa dampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Diperkirakan antara 600 ribu-800 ribu (sekitar 25% dari total kesempatan kerja yang ada) orang kehilangan pekerjaan.

Sektor perikanan yang memberikan lebih dari 130 ribu kesempatan kerja dan memberi kehidupan hampir 70% penduduk pantai, saat ini kehilangan pekerjaan. Kemungkinan hanya sebagian kecil dari mereka yang dapat kembali kepekerjaannya. Sedangkan kegiatan dari industri pengolahan, meskipun kesempatan kerja pada sektor ini relatif sedikit, tetapi dampak dari kegiatan lainnya, seperti industri kecil, perdagangan, dan jasa menyebabkan banyaknya kesempatan kerja yang hilang.

Penderitaan masyarakat Aceh yang demikian lama akibat konflik bersenjata yang panjang, ditambah lagi dengan bencana gempa dan tsunami, telah menempatkan mereka pada posisi yang semakin terpuruk. Tingkat kemiskinan mencapai 33% dan pengangguran terbuka mencapai 11,2 %. Jika termasuk setengah pengangguran, jumlah penganggur total mencapai sekitar 48 %. Program-program pembangunan kembali masyarakat Aceh ditujukan untuk secara simultan memecahkan persoalan fundamental yang ada selama ini, tidak semata-mata mengembalikan kondisi masyarakat Aceh ke keadaan sebelum tsunami. Dengan kata lain pembangunan kembali masyarakat Aceh harus dilakukan dengan membangun (kembali) prakondisi yang diperlukan agar Aceh bangkit. Demikian halnya masyarakat pulau nias Propinsi Sumatera Utara yang mengalami bencana dapat segera memulihkan kondisi ekonominya.

1.2. Rangkuman Kerusakan dan Permasalahan

a. Dampak Tsunami

- 1) Sebagian besar masyarakat yang terkena bencana kehilangan mata pencaharian yang tidak segera dapat dipulihkan. Hal ini mengakibatkan hilangnya pendapatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh rusaknya/hilangnya sarana dan prasarana ekonomi seperti: pasar, tempat usaha, sarana produksi, rumah/tempat tinggal, serta lahan - termasuk masalah salinasi lahan. Dampak yang paling parah (43% dari nilai kerusakan sektor produktif) dirasakan oleh para nelayan dan sektor perikanan. Diperkirakan, sekitar 85% perumahan permanen dan non-permanen

mengalami kerusakan. Sebanyak 220.907 orang diperkirakan kehilangan pekerjaan. Jumlah penduduk yang terkena Tsunami sebanyak 584.559 jiwa (14,42%), desa yang terkena Tsunami sebanyak 654 desa (11,4%). Persentase keluarga miskin terkena Tsunami sebesar 15,16% (63.977 KK). Kerugian material diperkirakan Rp 41,401 triliun (78%) dari jumlah tersebut milik masyarakat).

- 2) Terhentinya kegiatan industri karena kerusakan berat pada fasilitas kerja yang kemudian menyebabkan pengangguran.
- 3) Rusaknya infrastruktur publik seperti pasar, sarana produksi, dan transportasi merupakan salah satu faktor melonjaknya harga-harga di Aceh. UMKM yang terkena Tsunami sebanyak 20,88% (5.176 unit), hotel 30,41% (59 unit), restoran 17,20% (1.119 unit), pasar 1,29% (195 unit), dan warung sebanyak 16,71% (7.529 unit). Khusus disektor perikanan, terdapat 19 unit (0,37%) TPI (tempat pelelangan ikan) yang rusak dan PPI (pangkalan pendaratan ikan) 63 unit (1,24%).
- 4) Jumlah Bank Umum terkena Tsunami 17,61% (25 unit) dan BPR sebanyak 8,89% (4 unit). Dari keseluruhan kredit yang diberikan sektor perbankan sebesar Rp 3.9 triliun, sekitar Rp 2 triliun diperkirakan menjadi kredit bermasalah.
- 5) Diperkirakan sampai dengan tanggal 31 Maret 2005, jumlah korban bencana di Nias sebanyak 300 orang

b. Hambatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi mengalami berbagai hambatan. Ada yang segera bisa ditangani, tetapi ada yang sulit untuk dihilangkan dalam waktu dekat. Hambatan-hambatan itu termasuk keadaan keamanan, administrasi pemerintahan belum optimal, KKN masih berlangsung, kemampuan (skill) SDM rendah, dukungan perbankan dan lembaga keuangan non-bank masih rendah, dan kecenderungan sentralisasi yang tinggi dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

- c. Secara umum permasalahan-permasalahan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan pasca tsunami dapat diformulasikan sbb ;
- 1) Persoalan-persoalan ekonomi dan ketenagakerjaan di Provinsi NAD yang timbul akibat bencana gempa dan tsunami menambah persoalan kemiskinan dan pengangguran yang terakumulasi selama konflik bersenjata selama 28 tahun sejak 1976.
 - 2) Kegiatan ekonomi rakyat (di luar minyak dan gas) masih sangat tergantung pada kegiatan-kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan dalam skala kecil dan pengelolaan dengan menggunakan kapital dan penerapan teknologi yang rendah. Alat-alat tangkap ikan para nelayan, misalnya, masih tradisional dengan produktivitas yang rendah

- 3) Perekonomian Aceh masih berbasis komoditi (commodity-based) dengan keterkaitan input-output antar sektor yang rendah. Kegiatan agroindustri belum berkembang dengan baik.
- 4) Potensi ekonomi Aceh seperti pariwisata belum digarap dengan baik, sehingga belum memberikan nilai tambah yang berarti bagi peningkatan kesempatan kerja
- 5) Infrastruktur pendukung ekonomi belum memadai antar wilayah, sehingga integrasi regional belum optimal, sehingga proses nilai tambah terjadi di luar Aceh
- 6) Perekonomian Aceh belum mempunyai suatu sektor *leading* sehingga mampu menarik sektor sektor lain melalui keterkaitan antarregional maupun antarsektor
- 7) Belum diketahuinya secara pasti kondisi ekonomi pulau Nias yang dan kerusakan-kerusakan atas terjadinya bencana.

Mengembalikan wilayah ini seperti semula, akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Lumpuhnya administrasi dan beberapa pemerintah local menambah kesulitan dalam upaya pemulihan. Prioritas utama yang secara awal telah diberikan kepada korban bencana adalah bantuan kemanusiaan dengan cepat untuk meringankan beban masyarakat yang terkena musibah dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

1.3 Tahap Penyusunan Rencana

Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara di bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan merupakan hasil perumusan dari semua pihak yang berkepentingan. Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi bidang ekonomi dan ketenagakerjaan ini dilakukan menurut tahapan sebagai berikut:

Penjaringan aspirasi

- 1) Penjaringan aspirasi dan harapan masyarakat melalui konsultasi publik (telah dilakukan)
- 2) Penjaringan aspirasi baru oleh pemerintah pusat yaitu Departemen terkait dan BAPPENAS kepada Pemda termasuk Dinas di daerah dan elemen masyarakat.
- 3) Berdasarkan data kerusakan yang dilaporkan sebelumnya akan dilakukan penyempurnaan hasil *assessment* untuk dapat mengetahui secara lebih rinci mengenai kepastian besaran (*magnitude*) kerusakan dan kondisi teknis kerusakannya, agar dapat disusun langkah-langkah pemulihannya secara rinci.
- 4) Setelah diperoleh informasi dan data secara rinci kemudian dapat dilakukan pula survai dan konsultasi publik untuk mendapatkan informasi secara rinci, masukan dan tanggapan atas hasil *assessment* dan rencana sementara yang disusun

Koordinasi

- 1) Dilakukan koordinasi dalam penyusunan rencana dari sektor dunia usaha dan masyarakat (belum dilakukan)
- 2) Penyusunan rencana baru dilakukan berdasarkan perkiraan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memulihkan fungsi pemerintahan dan kegiatan masyarakat
- 3) Dari hasil sementara rencana yang telah disusun tersebut di atas, dapat dilakukan diskusi lebih lanjut di tingkat lapangan mengenai kelayakan teknisnya dan memperkirakan

masalah-masalah yang mungkin timbul, serta menginventarisasi langkah awal dan *prerequisite* yang harus ada sebelum langkah-langkah yang direncanakan dapat dijalankan

Sinkronisasi

- 1) Sinkronisasi instrumen-instrumen pelaksanaan rencana dari berbagai pihak (pemerintah, dunia usaha, masyarakat) terutama terkait dengan waktu, lokasi, sumber pendanaan dan lembaga pelaksana
- 2) Sinkronisasi dilakukan atas instrumen pelaksanaan yang selama ini tersedia dan dipandang dapat dan perlu dimanfaatkan untuk pelaksanaan rencana, namun demikian belum dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang memiliki wewenang atas instrumen tersebut

1.4. Maksud dan Tujuan.

Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi bertujuan untuk membantu masyarakat korban bencana dalam rangka mengembalikan kehidupan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan aset produktif.

Secara khusus tujuan tersebut berupaya untuk:

1. Mengidentifikasi infrastruktur publik/aset publik agar dapat segera dilakukan pemulihan dalam rangka menjalankan fungsi layanan pemerintahan
2. Mengidentifikasi sarana produksi non-publik/aset produktif yang hilang untuk mendukung pemulihan kembali pusat-pusat layanan pengembangan usaha
3. Menyusun kebijakan untuk mengembalikan sistem keuangan dalam rangka memperlancar fungsi intermediasi perbankan
4. Menyusun strategi dalam rangka memberikan dukungan bagi korban tsunami selama masa transisi
5. Menyusun strategi dalam rangka memberikan dukungan bagi masyarakat dan dunia usaha agar secara bertahap kegiatan ekonomi berkembang

1.5. Ruang Lingkup.

Ruang Lingkup penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi bidang kegiatan:

1. Pertanian dan Perikanan
2. Industri, Perdagangan, Pariwisata dan Pertambangan
3. Investasi, Tenaga Kerja, Usaha Kecil dan Menengah, serta Lembaga Keuangan

1.6. Organisasi Penulisan.

Sistematika pelaporan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi terdiri dari:

- | | | |
|-----|---|---|
| I | : | Pendahuluan |
| II | : | Dampak Bencana terhadap Perekonomian Aceh |
| III | : | Sasaran, Kebijakan dan Strategi |
| IV | : | Langkah-langkah yang dilakukan |
| V | : | Mekanisme Pelaksanaan dan Monitoring |
| VI | : | Isu Lintas Bidang |

LAMPIRAN

- I : Inventarisasi Kerusakan dan Kerugian
- II : Upaya Yang Telah dan Sedang Dilakukan
- III : Daftar Pertanyaan untuk Survei
- IV : Perkiraan Kebutuhan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

BAB 2

DAMPAK BENCANA TERHADAP PEREKONOMIAN ACEH

2.1. Kondisi Propinsi NAD Sebelum Bencana

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Propinsi NAD tahun 2003 adalah sebesar 2,3 % dari PDB nasional dengan pertumbuhan PDB sekitar 3,4% per tahun. Sedangkan PDB perkapita propinsi NAD pada tahun 2003 adalah sekitar Rp. 8,7 juta.

Tabel 2.1

Kondisi Ekonomi Propinsi Nangroe Aceh Darussalam

Sebelum Bencana

	Indonesia	Aceh	% Dari Indonesia
1. PDB 2003 (triliun Rp.)	1.709,00	39,00	2,28
2. Pertumbuhan PDB (%)	4,10	3,40	-
3. PDB perkapita (juta Rp.)	7,80	8,70	-
4. Populasi 2003 (juta)	218,60	4,00	2,00
5. Angkatan Kerja 2003 (juta)	100,30	2,53	2,52
6. Kesempatan Kerja 2003 (juta)	90,80	2,25	2,48
7. Pengangguran 2003 (juta)	9,50	0,28	2,95
8. Tingkat pengangguran (%)	9,50	11,20	-

Keterangan: PDB dihitung berdasarkan PDB tahun dasar 1993

Kondisi ketenagakerjaan di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam berdasarkan Data Sakernas 2003, sebagai berikut:

- a. Jumlah angkatan kerja adalah : 2.53 juta orang, bekerja : 2.25 juta orang dan tidak bekerja atau menganggur: 0,28 juta orang. Struktur tingkat pendidikan angkatan kerja: SD kebawah sekitar 35,3%, SLTP: 23,7%, SMU: 26,0%, dan sarjana: 5,6%.
- b. Jumlah angkatan kerja yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama yang terbesar di sektor pertanian, yaitu lebih dari 1,0 juta orang. Selanjutnya sektor perdagangan dan jasa kemasyarakatan masing-masing 468.057 orang 407.130 orang.

- c. Jumlah penganggur terbuka di NAD sebanyak 284.034 orang, dengan tingkat pengangguran sekitar 11,2%. Struktur pengangguran yang tertinggi adalah lulusan SMU sekitar 47,5%.

Tabel 2.2
Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Penduduk yang Bekerja	
			(%)
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuhan dan Perikanan	1.073.454	47,62
2	Industri Pengolahan	87.636	3,89
3	Bangunan	93.705	4,16
4	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	468.057	20,76
5	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	101.292	4,49
6	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah & Jasa Perusahaan	12.756	0,57
7	Jasa Kemasyarakatan	407.130	18,06
8	Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air	10.125	0,45
Jumlah		2.254.155	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2003.

Tabel 2.3.
Struktur Angkatan Kerja, Pekerja dan Pengangguran Terbuka Menurut
Tingkat pendidikan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Tahun 2003

No	Tingkat Pendidikan	Struktur Angkatan Kerja		Struktur Pekerja		Struktur Pengangguran Terbuka	
			(%)		(%)		(%)
1	SD dan SD ke bawah	896.259	35,31	848.469	37,64	47.790	16,83
2	SMTP	603.471	23,78	542.925	24,09	60.546	21,32
3	SMU	659.769	25,99	524.274	23,26	135.495	47,70

4	SMK	148.938	5,87	131.616	5,84	17.322	6,10
5	Diploma/Akademi	86.856	3,42	77.724	3,45	22.881	8,06
6	Universitas	142.896	5,63	129.147	5,73	-	-
Jumlah		2.538.189	100,00	2.254.155	100,00	284.034	100,00

Sumber: Sakernas-BPS, 2003

2.2. Perkiraan Dampak terhadap Perekonomian NAD

Menurut perhitungan awal Bank Dunia, terdapat 3 skenario yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Aceh Pada tahun 2005. *Pertama*, dengan asumsi PDB yang berkaitan dengan PDB non-MIGAS menurun sebesar 20% dan PDB MIGAS tidak berubah, maka pertumbuhan ekonomi Aceh akan turun sebesar 7% dalam tahun 2005. Penurunan PDB Aceh sebesar 7% akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi nasional berkurang sebesar 0,1%. Bila proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2005 sebelumnya adalah 5,5% maka dengan adanya bencana di Aceh pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan hanya 5,4%. *Kedua*, dengan asumsi yang sama tetapi PDB non-MIGAS turun 20%, maka pertumbuhan ekonomi nasional akan berkurang dengan 0,2% (Kalau semula 5,5% setelah bencana menjadi 5,3%). *Ketiga*, dengan asumsi yang sama tetapi PDB non-MIGAS turun 40%, maka pertumbuhan ekonomi nasional akan berkurang dengan 0,4%. (kalau semula 5,5% setelah bencana menjadi 5,1%).

Rasio penanaman modal terhadap PDB Aceh tercatat sebesar 7.5% pada tahun 2003, kurang dari separuh tingkat rasio nasional (19.7%). Sebelum krisis rasio tersebut juga rendah sekitar 11-13%. Ekspor neto (ekspor minus impor) cukup tinggi sekitar 42% dari PDB di tahun 2003, lebih tinggi dari tingkat nasional yang berada pada 5.5%. Tingginya tingkat ini lebih banyak dikarenakan karena ekspor gas alam.

Diluar ekspor gas alam dan pupuk, kontribusi Aceh terhadap ekspor nasional relatif kecil. Di tahun 2003, total ekspor dari non-gas alam dan pupuk mencatat \$84 juta, sekitar 0.2% dari ekspor non-minyak dan gas secara nasional. Ekspor Aceh berasal dari non-migas di dominasi produk utama yaitu pupuk. Pada tahun 2003, ekspor pupuk mencapai \$55 juta, 65% dari total ekspor non-migas dan ekspor pupuk Aceh memberikan 29% dari ekspor pupuk total. Ekspor LNG Aceh dari Arun merupakan bagian yang besar, pada tahun 2003, merupakan 24% dari volume total.

Akibat dari bencana ini kemampuan sumber daya manusia berikut kemampuan ekonomisnya sangat terpengaruh. Seperti diketahui bahwa sekitar dua pertiga (67%) dari PDB non-migas berasal dari wilayah yang terkena bencana. Berdasarkan perhitungan (sangat awal) Bank Dunia dengan menggunakan 3 skenario yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2005. Skenario tersebut mengasumsikan bahwa PDB non-migas menurun masing-masing sebesar 10, 20 dan 40%. Berdasarkan skenario tersebut, PDB Aceh dapat menurun sekitar 7% sampai 28% ditahun 2005 dibandingkan tahun 2004. Keadaan ini akan mengakibatkan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0.1 sampai 0.4 poin persentase dari proyeksi pertumbuhan semula.

Pertama, dengan asumsi PDB (non-migas) menurun sebesar 10% dan migas tidak terpengaruh, maka pertumbuhan ekonomi Aceh akan turun sebesar 7% dalam tahun 2005. Penurunan PDB Aceh sebesar 7% diperkirakan dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi nasional berkurang sebesar 0.1%.

Kedua, dengan asumsi sama yaitu migas tidak terpengaruh tetapi PDB non-migas turun 20%, maka pertumbuhan ekonomi nasional akan berkurang dengan 0.2% (dari semula 5.5% setelah bencana menjadi 5.3%). Ketiga, dengan asumsi sama tetapi PDB non-migas turun 40%, maka pertumbuhan ekonomi nasional akan berkurang dengan 0.4%. (semula 5.5% setelah bencana menjadi 5.1%). Apapun skenario-skenarionya, pada akhirnya akan berpengaruh pula kepada penciptaan kesempatan kerja.

Dampak bencana alam dan gelombang tsunami juga dapat diperhitungkan dengan beberapa sektor yang erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi NAD. Beberapa sektor ini antara lain:

Pendapatan per kapita. PDB yang berasal dari sektor migas tidak secara langsung kembali kepada penduduk Aceh, tetapi kembali lagi sebagai pendapatan bersama dan transfer lainnya dari pemerintah. Untuk mengkaji dampak dari tsunami pada pendapatan perkapita, maka pendapatan bersama yang berasal dari sektor migas (tahun 2004) ditambahkan kepada PDB per kapita menggunakan skenario-skenario tadi. Penduduk Aceh diperkirakan tumbuh sebesar 1.5% pada tahun 2004, dikurangi dengan jumlah penduduk meninggal karena terkena musibah ini (110,000 pada saat perhitungan ini). Bila tidak ada tsunami, pendapatan per kapita mencapai Rp. 1.9 trillion. Dengan memperkirakan penurunan PDB non migas sebanyak 40%, maka pendapatan perkapita menurun sebanyak 32% (lihat Tabel 2.4).

Tabel 2.4.
Perkiraan Dampak Gempa Bumi terhadap PDB dan pertumbuhan PDB Aceh dan Indonesia

	Skenario 1 (Ringan)	Skenario 2 (Sedamg)	Skenario 3 (Buruk)
Penurunan PDB non migas Aceh sebsr 1/	10 percent	20 percent	40 percent
Tingkat pertumbuhan Aceh	-7.0 percent	-13.9 percent	-27.8 percent
Dampak thd Pertumbuhan PDB nasional	-0.1 percent	-0.2 percent	-0.4 percent
Perkiraan Pertumb PDB yang direvisi	5.3 percent	5.2 percent	5.0 percent

1/dibandingkan dengan PDB 2004
Sumber. CEIC, World Bank Staff Estimate

Pariwisata

Aceh dan Sumut bukanlah tujuan utama pariwisata dan karenanya dampak langsung pada pariwisata kurang besar. Pada tahun 2003, terdapat sebanyak 3.8 juta pengunjung ke

Indonesia hanya 76,000 (2% dari total) pergi melalui Medan (ibukota Sumut) dan lebih sedikit jumlah yang berkunjung ke Aceh karena konflik. Dampak sebagai akibat bencana ini dapat diimbangi dengan turisme ke daerah lainnya yang tidak terkena tsunami.

Penanaman Modal

Penanaman modal dilihat dari persetujuan penanaman modal dari BKPM yang relatif terbatas di Aceh, kecuali untuk persetujuan PMA pada tahun 2003.

Neraca Pembayaran

Dampak dari gempa bumi dan tsunami terhadap neraca pembayaran Indonesia terutama berasal dari paket bantuan internasional dibandingkan dengan yang berasal dari ekspor dan impor mengingat bahwa perdagangan non migas Aceh relatif kecil dan tidak berpengaruh pada ekspor migas.

2.3. Dampak Bencana Terhadap Tingkat Pengangguran di Aceh:

Pada saat ini sangat sulit memperkirakan berapa banyak pekerja yang hilang terlebih lagi untuk memperoleh data mengenai jumlah lapangan kerja yang hilang. Perhitungan dibawah ini mengasumsikan bahwa pada putaran pertama tingkat pengangguran terbuka tidak berubah, dari jumlah penduduk sebesar 4,0 juta orang diasumsikan 2 % hilang, kesempatan kerja dan orang yang tidak bekerja juga diasumsikan hilang sebesar 2%. Dengan demikian tingkat pengangguran terbuka tetap sama seperti sebelum bencana, yaitu sekitar 11,2% (Tabel-2.5).

Tabel 2.5
Perkiraan Dampak Bencana Putaran Pertama Terhadap
Angkatan Kerja, Bekerja dan Menganggur
Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

	Sebelum Bencana	Perkiraan 2% Hilang	Setelah Bencana
1. Populasi	4.034.653	80.693,06	3.953.960
2. Angkatan Kerja	2.538.189	50.763,78	2.487.425
3. Bekerja	2.254.155	45.083,10	2.209.072
4. Penganggur	284.034	5.680,68	278.353
5. Tingkat Pengangguran	11,2		11,2

Keterangan:

Asumsi Penduduk yang menjadi korban sekitar 88.000 orang atau sekitar 2% dari populasi Aceh. Diasumsikan pula bahwa lapangan kerja, orang yang bekerja dan menganggur berkurang dengan 2% juga, dengan demikian tingkat pengangguran tidak berubah karena dampak putaran pertama.

Dampak putaran kedua adalah dampak bencana akibat hilangnya lapangan pekerjaan. Dampak bencana putaran kedua terhadap tingkat pengangguran di Propinsi NAD dapat dilihat dengan beberapa skenario. Sebagai contoh bila lapangan pekerjaan diperkirakan hilang sebesar 10%, akan mengakibatkan sebanyak 220,9 ribu orang kehilangan lapangan pekerjaan. Sehingga total penganggur setelah bencana menjadi 499,3 ribu orang dan tingkat pengangguran terbuka menjadi sekitar 20%. Skenario selanjutnya dapat dilihat pada tabel 2.6.

Dari catatan yang dikumpulkan, korban tewas di Indonesia saat laporan CGI per Januari 2005 ini disusun diperkirakan sekitar 110,000, lebih dari 2% penduduk Aceh. Untuk memperkirakan dampak pada pasar kerja, diperkirakan bahwa jumlah yang meninggal tidak mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Dengan kata lain, mereka yang bekerja dan menganggur diperkirakan sama-sama terpengaruh. Tiga skenario yang diterapkan untuk penurunan PDB tadi digunakan. Hasil menunjukkan bahwa bila 20% kesempatan untuk menciptakan kerja hilang, maka tingkat pengangguran Aceh akan naik dari 11.2% (angka aktual tahun 2003) ke 29%. Akibatnya, tingkat pengangguran nasional akan naik dari 9.5% ke 10%. Dampak terhadap tingkat pengangguran ini akan dikurangi tentu saja akan berkurang dengan adanya kesempatan kerja yang tercipta oleh kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berjalan.

Tabel 2.6.
Perkiraan Dampak pada Kesempatan Kerja

	2003	Dampak langsung	Setelah Terjadinya Bencana		
			10%	20%	40%
Total Kesempatan Kerja	90,785	90,729	90,509	90,014	89,078
o/w Aceh	2,254	2,198	1,978	1,759	1,319
Pengangguran	9,531	9,524	9,744	9,964	10,403
o/w Aceh	284	277	497	717	1,156
Total Angkatan Kerja	100,316	100,253	100,253	99,977	99,482
o/w Aceh	2,538	2,475	2,475	2,475	2,475
Tingkat Pengangguran	9.5%	9.5%	9.7%	10.0%	10.5%
o/w Aceh	11.2%	11.2%	20.1%	29.0%	46.7%

Sumber. CEIC, Staf Bank Dunia

2.4. Perkiraan Dampak Terhadap Kemiskinan

Dampak pada kemiskinan di analisa dengan menggunakan ketiga skenario yang sama. Misalnya, skenario 2 memperkirakan bahwa PDB non migas menurun 20%. Simulasi menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin akan meningkat 0.6 juta dan kemiskinan berdasarkan hitungan kepala akan meningkat sebesar 0.3 poin persentase. Tetapi perlu diingat bahwa simulasi ini tidak mempertimbangkan dampak positif dari pertumbuhan dan kesempatan kerja yang akan terjadi dengan adanya kegiatan rekonstruksi.

Tabel 2.7.
Perkiraan Dampak Gempa Bumi dan tsunami pada
Index Headcount Kemiskinan

	Skenario 1 (Kecil)	Skenario 2 (Sedang)	Skenario 3 (Buruk)
Aceh non-oil and gas GDP decline by 1/	10%	20%	40%
Impact on national poverty headcount index	0.1%	0.3%	0.5%
Increase in the number of the poor (million)	0.2	0.6	1.1

1/dibandingkan dengan perkiraan PDB konstan 2004

Sumber: perhitungan Bank Dunia

2.5. Perkiraan Hilangnya Lapangan Pekerjaan

Terhentinya aktivitas kegiatan ekonomi tersebut membawa dampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Diperkirakan antara 600 ribu-800 ribu (sekitar 25% dari total kesempatan kerja yang ada) orang kehilangan pekerjaan.

Dari jumlah angkatan kerja di NAD sebanyak 2,254,155 orang, kesempatan kerja yang hilang diperkirakan sebagai berikut.

- a. Sekitar 25 % (600-800 ribu orang) kehilangan pekerjaan akibat bencana alam
- b. Sekitar 30% (300 ribuan orang) di sektor pertanian kehilangan pekerjaan akibat kerusakan lahan
- c. Sekitar 170 ribu orang kehilangan pekerjaan di sektor UKM
- d. Diperkirakan 60.000 pekerjaan hilang karena kematian
- e. Diasumsikan 130.000 nelayan kehilangan pekerjaan, setidaknya untuk sementara.
- f. Diperkirakan total pengangguran akan mencapai 30% di daerah yang terkena bencana

Angka yang sebenarnya mungkin lebih tinggi karena bencana ini menimpa wilayah kotamadya Banda Aceh yang sangat sibuk khususnya pada tingkatan yang sangat berat. Musibah ini menambah situasi pasar kerja yang memang sebelum kejadian ini sudah dalam kondisi sulit. Hampir 70 persen dari mereka yang bekerja adalah pekerja sendiri atau di dalam ekonomi informal. Sebagai akibat dari bencana ini tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kotamadya yang terkena mungkin dapat mencapai 30 persen.

Dampak hilangnya lapangan kerja di Aceh terhadap tingkat pengangguran nasional dapat dilihat dengan beberapa skenario. Sebagai contoh bila lapangan pekerjaan akibat bencana diasumsikan hilang sebesar 10%, mengakibatkan tingkat pengangguran secara nasional meningkat menjadi sekitar 9,72%.

BAB 3

SASARAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Untuk para korban gempa bumi dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara (Sumut), pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat menyusun kebijakan-kebijakan serta menjalankan program-program yang ditujukan untuk pemulihan akses terhadap pelayanan publik dan motor penggerak kegiatan ekonomi masyarakat.

Kebijakan yang dilakukan adalah dengan menggerakkan sel-sel ekonomi dalam skala yang tidak terlalu besar antara lain melalui kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal, terutama UMKM yang dibarengi dengan pembangunan jaringan/ keterkaitan usaha (*business linkages/networking*) dengan usaha besar.

Strategi pembangunan NAD dan Sumatera Utara (pulau Nias) diupayakan menyeluruh (*holistic*) serta memperhatikan dimensi spatial dan kemanusiaan, membangun basis kelembagaan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) setempat.

Apapun rencana pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan, harus dapat menjamin penghidupan masyarakat NAD dan Nias menjadi lebih baik antara lain jaminan kehidupan ekonomi yang normal dengan tingkat pendapatan yang semakin meningkat, adanya lapangan kerja yang produktif, dan adanya perlindungan social yang memadai.

3.1. Prinsip-prinsip Umum dan Pelaksanaan Program

a. Prinsip-prinsip pokok dalam tahap Rehabilitasi adalah sbb:

1. Meminimalisasi dampak dislokasi korban gempa bumi dan tsunami. Ini berarti bahwa upaya relokasi harus dilakukan dengan arif dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
2. Memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan kembali pekerjaan, lokasi usaha, dan tempat tinggalnya.
3. Mengupayakan agar berbagai kebijakan rehabilitasi sekaligus dapat mengurangi ketimpangan yang ada. Sebagai contoh, memberikan kesempatan bagi buruh nelayan secara individual atau kolektif dalam kepemilikan kapal dan sarana penangkapan ikan lainnya.
4. Memberikan tekanan pada kegiatan padat karya dan memperhatikan aspek jender dalam menciptakan lapangan kerja.
5. Memberikan perhatian utama pada masyarakat yang berada di berbagai penampungan sementara (IDP).
6. Memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat Aceh dan masyarakat sipil pada umumnya.

b. Prinsip-prinsip pokok dalam tahap Rekonstruksi adalah sbb:

1. Pembangunan kembali ekonomi Aceh baik dalam tahap rehabilitasi maupun rekonstruksi mengacu pada UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sistem ekonomi yang akan dikembangkan memberi perhatian penuh pada penerapan syariat Islam sesuai dengan UU No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh.
2. Pembangunan kembali Aceh tidak hanya untuk wilayah yang terkena langsung bencana gempa dan tsunami, melainkan bersifat komprehensif untuk seluruh wilayah Aceh dan tidak terbatas pada rehabilitasi dan rekonstruksi jangka menengah/panjang.
3. Pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan Aceh dilakukan dengan dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan pembangunan manusia (Human Development) dan Pembangunan Regional. Pembangunan manusia mencakup peningkatan kapabilitas manusia yang terkait dengan pembangunan pendidikan/ketrampilan, kesehatan, dan sistem perlindungan sosial. Pembangunan Regional adalah pembangunan ekonomi dengan basis ekonomi lokal yang kuat. Diperlukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sebagai *growth poles* dan *hinterland* yang memberi manfaat optimal bagi pembangunan wilayah.
4. Kawasan Sabang sebagai salah satu pusat pengembangan wilayah sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2002 termasuk dalam strategi pembangunan ekonomi Aceh
5. Pembangunan kembali Aceh dilakukan dengan perspektif jangka panjang (Aceh Baru) yang dari sudut ekonomi berarti membuat perekonomian Aceh memiliki struktur ekonomi dan kesempatan kerja yang seimbang, tidak tertumpu pada sektor-sektor primer dan skala kecil saja.
6. Penyusunan Rencana Induk ini merupakan bagian dari RPJMD sesuai UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
7. Pembangunan kembali Aceh bersifat partisipatif masyarakat (Community Based) sehingga pemberdayaan ekonomi rakyat mengarah pada kemandirian ekonomi secara lokal.
8. Keterlibatan dunia usaha lokal, nasional, dan internasional didukung oleh iklim usaha yang kondusif untuk berlangsungnya kegiatan investasi, produksi, dan perdagangan.
9. Pembangunan kembali Aceh memperhatikan kesinambungan penghidupan (*livelihood*) masyarakat terutama pembangunan ekonomi dan sosial pesisir.
10. Pembangunan ekonomi Aceh dilakukan dengan memperhatikan kesinambungan (*sustainability*) dalam paradigma "Green Reconstruction".

a. Pelaksanaan Program

1. Pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan Aceh dilakukan tidak saja untuk memulihkan kegiatan ekonomi seperti keadaan sebelum bencana tsunami, melainkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat Aceh untuk mencapai standar hidup yang lebih baik sehingga secara simultan dapat memberi kontribusi pada proses rekonsiliasi. Strategi pembangunan kembali Aceh adalah **4R (*Rescue, Rehabilitasi, Rekonstruksi, dan Rekonsiliasi*)**.
2. Strategi *Big Push* diterapkan dengan melakukan investasi secara besar-besaran, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Investasi dilakukan dalam berbagai sektor secara simultan dengan sinergis.

3. Pembangunan ekonomi rakyat juga dilakukan dengan keterlibatan sel-sel ekonomi dalam skala yang tidak terlalu besar. Kendati rencana makroekonomi diperlukan dan menjadi pedoman (*guidelines*) untuk program-program mikro (pemberdayaan sektoral dan spatial).
4. Strategi pembangunan kembali masyarakat Aceh mempunyai dimensi *spatial* dan dimensi *human*, bukan kebutuhan berdasarkan interpretasi pemerintah (pusat dan daerah). Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar yang diperlukan adalah; (1) masyarakat lokal di daerah-daerah yang terkena dampak tsunami (dan yang terkena dampak konflik jika diperluas) harus mendapat peran yang lebih besar dalam menentukan bagaimana meningkatkan taraf hidup mereka, (2) masyarakat lokal dapat mengontrol penghidupan mereka sendiri dan berdaya dengan kekuatan sendiri dalam jangka panjang (tidak dengan bantuan terus menerus).
5. Pengembangan ekonomi lokal melalui pertumbuhan di pusat-pusat pertumbuhan (*growth centers*) dengan diversifikasi kegiatan ekonomi.
6. Sistem pembiayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah dibenahi sehingga UKM menjadi basis ekonomi rakyat yang kuat didukung dengan sistem pembiayaan yang mendukung.
7. Program-program rekonstruksi ekonomi Aceh dilakukan melalui pentahapan sistematis sebagaimana digambarkan dalam diagram di bawah ini.

3.2. Sasaran

a. Sasaran Tahap Rehabilitasi (1-2 tahun)

Pulihnya standard pelayanan minimum bidang ekonomi, antara lain pasar tradisional, pelabuhan dan tempat pelelangan ikan, jaringan irigasi, layanan birokrasi (perijinan/ pendaftaran dan fasilitasi), jaringan layanan transportasi, dan jaringan lembaga keuangan sehingga kesemuanya telah berfungsi kembali secara normal.

b. Sasaran Tahap Rekonstruksi (2-5 / 2-10 tahun)

Sasaran umum yang ingin dicapai adalah terbangunnya kembali sistem ekonomi dan peletakan fondasi untuk pembangunan Aceh (dan Nias) BARU. **Sasaran pada tataran makro** adalah terwujudnya iklim yang kondusif untuk menggerakkan ekonomi. Hal ini tercermin dari semakin mantapnya stabilitas ekonomi yang dibarengi dengan stabilitas politik, keamanan, sosial, dan budaya; semakin kondusifnya kebijakan ekonomi makro; efisien dan efektifnya layanan birokrasi; serta semakin ramahnya peraturan perundangan, termasuk peraturan daerah, dan kebijakan lain terhadap pelaku ekonomi, terutama di NAD dan Nias. Adapun **sasaran pada tataran meso** adalah berkembangnya jaringan system pendukung ekonomi yang antara lain tampak dari semakin meningkatnya mutu dan jangkauan layanan jaringan lembaga keuangan, infrastruktur, pengembangan SDM, produksi dan distribusi, serta penelitian dan pengembangan. Sedangkan **sasaran pada tataran mikro** adalah semakin meningkatnya daya beli dan kesejahteraan masyarakat (konsumen) serta produktivitas dan daya saing pelaku usaha (produsen), baik UMKM, koperasi maupun usaha besar (swasta/BUMN).

3.3. Kebijakan dan Strategi

Melihat lumpuhnya kegiatan ekonomi tersebut maka kebijakan dan strategi yang ditempuh bertujuan untuk mengembalikan kegiatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan usaha produktif serta pengembangan kesempatan berusaha dan bekerja. Kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Memulihkan pendapatan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi dan memberikan pelatihan bagi berbagai pekerjaan yang hilang. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi mengutamakan partisipasi masyarakat Aceh untuk itu akan dilaksanakan pelatihan yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi.
2. Memulihkan fasilitas pelayanan masyarakat untuk memenuhi standar pelayanan minimal. Pemulihan ini dilaksanakan oleh Pemerintah melalui mobilisasi berbagai sumber daya yang tersedia seperti APBN dan bantuan. Pemulihan diutamakan kepada sarana pelayanan masyarakat yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat termasuk nelayan dan pertanian seperti pemulihan pangkalan pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan, memulihkan sarana irigasi serta pusat-pusat penjualan lainnya.
3. Memulihkan kegiatan perbankan melalui pemulihan berbagai sarana perbankan serta mengembalikan fungsi intermediasi. Pemulihan dilakukan pula melalui identifikasi nasabah serta penetapan ahli warisnya. Sedangkan dari sisi aset perbankan pemulihan dilakukan melalui restrukturisasi.
4. Memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memulihkan sarana produksinya. Bantuan kepada masyarakat ini akan diberikan melalui bantuan langsung melalui pendekatan berbasis masyarakat (*Community based approach*). Bantuan kepada masyarakat dilakukan melalui pemberian hibah langsung kepada pengusaha mikro baik untuk perorangan maupun kelompok. Untuk bantuan hibah perorangan besarnya maksimum Rp. 2 juta, sedangkan untuk hibah kelompok besarnya antara Rp.5 juta – Rp.15 juta. Bantuan ini dapat digunakan sebagai dana padanan (*matching fund*) bila kelompok membutuhkan sarana produksi yang nilainya lebih besar dari Rp.15 juta untuk digunakan bersama (*common facilities*). Kekurangan kebutuhan dana tersebut diperoleh dari pinjaman komersial perbankan tanpa subsidi bunga namun disertai kemudahan/insentif atau lembaga keuangan lainnya. Selain itu akan diberikan pula bantuan yang berkaitan dengan tanah yang tidak dapat digunakan sebagai tempat pemukiman serta bantuan perumahan.
5. Memberikan dukungan kepada masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah untuk dapat memperoleh akses kepada sumber daya produktif melalui penyediaan sistem insentif pembiayaan disertai pemberian bantuan teknis. Dukungan pembiayaan tersebut diberikan melalui mekanisme perbankan biasa dengan menggunakan tingkat bunga pasar namun disertai dengan kemudahan atau melalui skim pembiayaan lembaga keuangan lainnya.

Pada tahap rehabilitasi strategi yang merupakan "*impact planning*" difokuskan pada pemulihan aset produktif yang hilang, pemulihan-segera pendapatan (*income generating*) masyarakat serta pembangkitan kembali kepercayaan diri para pelaku usaha, terutama yang menjadi korban. Selain itu perlu segera dilakukan pemulihan layanan pemerintahan, layanan teknis dan infrastruktur ekonomi kunci.

Prioritas utama adalah melakukan survei penilaian dan pendataan rinci mengenai kerusakan dan kerugian untuk aset produktif masyarakat yang terkena bencana serta fasilitas

publik yang penting. Survei ini harus dilakukan melalui kerjasama dengan para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, dan kelompok masyarakat setempat. Selain itu perlu dilakukan penyelesaian masalah peminjam (*debtor*) dan pemberi pinjaman (*creditor*), subsidi bagi yang tak mampu bekerja, pemulihan sektor keuangan, dan pengembangan keterkaitan usaha (*business linkages*) antara pengusaha besar (domestik/internasional) dengan UMKM seperti melalui subkontrak (*outsourcing* usaha besar kepada UMKM).

Pada tahap rekonstruksi upaya-upaya untuk membantu pembangunan sektor produktif seyogyanya berfokus pada pembiayaan kepada perusahaan dan wirausahawan, pusat-pusat layanan pengembangan usaha, regulasi usaha yang mendasar, serta prakarsa pembangunan khas-sektoral. Upaya tersebut harus terkait dengan dan berlandaskan atas pembangunan yang telah dilakukan pada tahap rehabilitasi.

Keberhasilan tahap rekonstruksi mencerminkan pergeseran pembangunan ekonomi dari yang semula hanya bersifat bantuan kemanusiaan semata kepada upaya yang berfokus komersial. Pergeseran ini seyogyanya berjalan mulus dan akan dapat dicapai dengan baik melalui pendekatan sektoral dimana para spesialis mempunyai pemahaman yang lebih baik terhadap keadaan rekonstruksi yang khas-sektoral sehingga dapat segera menyesuaikan diri terhadap setiap perkembangan yang ada. Prakarsa khas-sektoral seyogyanya berfokus pada daerah yang paling parah atau pada lapangan usaha yang paling relevan seperti pelaku ekonomi di sektor pertanian dan perikanan serta UMKM.

Upaya-upaya yang ditempuh pada tahap rekonstruksi antara lain adalah memperlancar fungsi intermediasi perbankan dan meningkatkan akses kredit melalui berbagai skim kredit, penjaminan kredit dan pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) serta skim-skim pembiayaan dari lembaga keuangan lainnya seperti sarana ventura (*venture capital*), sewa-beli (*leasing*), dan lembaga keuangan syari'ah. Selain itu perlu mengembangkan kemitraan pemerintah-swasta, program-program yang berbasis masyarakat, memperkuat bantuan teknis bagi UMKM antara lain melalui lembaga layanan pengembangan masyarakat (*business development service providers – BDSPs*), serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pemberdayaan UMKM.

BAB 4

LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN

Kebijakan dan strategi bertujuan untuk mengembalikan kegiatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan usaha produktif serta pengembangan kesempatan berusaha dan bekerja, selanjutnya dijabarkan kedalam masing-masing pendekatan sebagai berikut:

4.1. Memulihkan Pendapatan (*income generation*)

Setelah masa darurat, penduduk terkena bencana akan berada dalam masa transisi untuk memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Melalui penyediaan kesempatan kerja untuk memperoleh penghasilan, program *income generation* sangat diperlukan. Hal ini mengingat bahwa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga individu yang terkena bencana dapat segera memperoleh dukungan penggantian pekerjaan yang hilang dan pendapatan yang hilang, untuk mempersiapkan dan memulai kehidupannya kembali.

Dalam rangka mengajak masyarakat untuk kembali bekerja, baik melalui penyediaan lapangan kerja dan memperoleh penghasilan maupun dengan berusaha/bekerja sendiri (*self employment*), strategi dan langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

- 1) Penciptaan pendapatan pada masa transisi (*Income generating during the transition period*)
- 2) Mobilisasi masyarakat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi
- 3) Melatih masyarakat untuk mengganti pekerjaan yang telah hilang.

1. Penciptaan pendapatan pada masa transisi

Dalam rangka menciptakan lapangan kerja dilakukan melalui **kegiatan padat karya** yang difokuskan pada kegiatan “**cash for work**”. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat Aceh dan Nias secara maksimal untuk melakukan pekerjaan pada tahap rekonstruksi.

Prinsip-prinsip pekerjaan padat karya perlu dipertimbangkan untuk memaksimalkan kesempatan memperoleh pekerjaan, termasuk mempertimbangkan efisiensi biaya.

- a. Peluang kerja sangat terbuka dalam pekerjaan prasarana. Pemilihan teknologi (antara kegiatan padat karya dan kegiatan padat modal) merupakan faktor utama dalam menentukan berapa banyak kesempatan kerja yang dapat diciptakan. Bila diterapkan dengan baik, kegiatan padat karya dapat menciptakan sampai sekurang-kurangnya tiga kali kesempatan kerja dibanding dengan penerapan kegiatan padat modal, tanpa menimbulkan dampak negatif pada biaya, mutu dan lamanya pelaksanaan pekerjaan. (pengalaman internasional, rasio antara tenaga teknik dan pekerja tidak terampil dalam kegiatan padat karya adalah 1:500 untuk insinyur, 1:100 untuk teknisi, 1:100 untuk pengawas, 1:50 untuk sub-kontraktor dan 1:20 untuk mandor).

- b. Pekerjaan pembuatan jalan dan pembangunan prasarana lainnya (jembatan, gorong-gorong, selokan-saluran) dapat dilaksanakan dengan menggunakan kontraktor berskala kecil. Pengalaman di berbagai negara Asia menunjukkan bahwa penggunaan kontraktor berskala kecil dapat menghasilkan manfaat hemat-biaya, karena para kontraktor ini dalam banyak hal akan melaksanakan kegiatan dengan metode padat karya digabungkan dengan sumber daya setempat.
- c. Menggunakan sumber daya setempat dan melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan, akan menjamin kelangsungan dari aset yang dibangun. Misalnya dengan memperluas program KDP (kecamatan development Programme) yang tidak hanya meningkatkan rasa memiliki, melainkan juga peningkatan kemampuan untuk memelihara aset itu sendiri.
- d. Pola *cash-for-work* dikembangkan sebagai kegiatan tanggap darurat dan dapat mempekerjakan sekitar 50.000 orang. Dengan asumsi bahwa umumnya mereka bekerja dengan 1 pengawas dan 5 mandor tiap 100 pekerja, sedikitnya diperlukan 500 pekerja terampil dan 2500 tenaga kerja tidak terampil.
- e. Bantuan teknik perlu diberikan selama perumusan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan jalan untuk mendukung diberlakukannya metode padat karya secara penuh.

Langkah-langkah yang diperlukan

- a. Memperkenalkan dan membuat standar/pola upah yang lebih efektif berdasarkan produktivitas kerja. Pola upah berdasar produktivitas memerlukan pengawasan dan pemantauan dalam pelaksanaan kerja setiap hari.
- b. Meningkatkan skala pekerjaan melalui kerjasama dengan Departemen Pekerjaan Umum. Dalam kegiatan ini perlu dipersiapkan program-program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan, misalnya untuk pekerjaan konstruksi jalan difokuskan pada pekerjaan yang secara intensif melakukan pemasangan batu dan beton. Selain itu kursus pengawasan kerja juga sangat diperlukan dalam kegiatan padat karya, seperti pembersihan puing-puing, selokan irigasi dsb.
- c. Diperkirakan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan daerah akan dapat menciptakan kesempatan kerja sekitar 25.000 orang/tahun. Tenaga pengawas yang diperlukan sebanyak 250 pengawas terlatih yang bekerja penuh. Kebutuhan tenaga insinyur sebanyak 50 insinyur dan 250 teknisi. Aspek-aspek teknis pekerjaan konstruksi jalan daerah memerlukan peningkatan kemampuan dan pelatihan program jalur cepat (*fast-track*) untuk para insinyur dan teknisi.
- d. Mengadakan penilaian dan meningkatkan pelatihan dalam aspek manajerial dan finansial untuk pekerjaan prasarana yang dikerjakan oleh masyarakat atau kontraktor dan aparat pemerintah. Kontraktor berskala kecil dapat menjadi unsur penting dalam menjamin pemberian kesempatan kerja jangka pendek dan dalam jangka panjang dari pekerjaan padat karya prasarana daerah. Hasil penelitian awal tentang ketersediaan kontraktor berskala kecil di daerah menunjukkan bahwa pengusaha setempat yang berpengalaman dalam jumlah terbatas yang akan terlibat dalam proyek rekonstruksi.
- e. Pengembangan program pelatihan untuk memperkuat kemampuan pemerintah setempat. Strategi ini diperlukan untuk mengembangkan kemampuan pemerintah tingkat daerah di dalam merencanakan, melaksanakan dan memantau pekerjaan prasarana daerah dengan kegiatan padat karya. Diperlukan adanya mekanisme

intensif untuk semua proyek prasarana daerah untuk secara aktif mendaftarkan diri dan melaporkan angka penggunaan tenaga kerja tidak terampil per hari. Hal ini penting untuk pemantauan dan evaluasi, dan bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran dan untuk pemberian bantuan teknik selanjutnya.

2. Mobilisasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

Tujuan dari program ini adalah untuk mengorganisir pasar tenaga kerja dalam menyeimbangkan permintaan dan ketersediaan tenaga kerja. Mobilisasi tenaga kerja merupakan bagian dari kegiatan pengaturan pasar tenaga kerja dengan mempertemukan permintaan dan penawaran pekerjaan.

Dalam upaya mengorganisir dan memobilisasi pasar tenaga kerja, penting untuk disadari bahwa penekanannya tidak hanya pada daerah-daerah yang dilanda bencana, melainkan mencakup seluruh propinsi. Angka pengangguran di NAD yang sudah tinggi sebelum datangnya tsunami, meningkat makin tinggi setelah tsunami. Demikian halnya tenaga kerja di pulau Nias, kemungkinan kehilangan pekerjaan sangat besar, mengingat 80 persen bangunan rusak akibat gempa.

- a. Prioritas dalam kegiatan ini adalah pemberian pekerjaan pada masyarakat Aceh dan Nias. Pelatihan yang cepat perlu diberikan kepada tenaga kerja setempat untuk memperoleh akses ke berbagai lapangan pekerjaan. Bila terdapat keterbatasan waktu, sementara kebutuhan memang sudah sangat mendesak dapat mendatangkan tenaga kerja terampil dari luar Aceh dan Nias. Apabila terpaksa mendatangkan pekerja dari luar Aceh dan Nias, perlu diusahakan kemitraan dengan pekerja Aceh dan Nias.
- b. Prioritas awal yang harus dilakukan adalah melaksanakan survai kebutuhan tenaga kerja. Survai tenaga kerja yang cepat, tepat, dan cermat sangat dibutuhkan untuk menyusun rencana kegiatan yang lebih rinci. Survai ini akan mengidentifikasi kesenjangan tenaga kerja akibat Tsunami, identifikasi pekerja yang kehilangan pekerjaan menurut jenis pekerjaan, tingkat pendidikan yang dimiliki, dan keterampilan/keahlian. Informasi dalam survai yang juga diperlukan adalah keinginan angkatan kerja terhadap kebutuhan jenis pekerjaan yang diminati pada tahun-tahun mendatang. Karena ada kemungkinan masyarakat ingin beralih pekerjaan lain setelah mengalami bencana (banyak pekerjaan pada sektor perdagangan skala kecil dan tentunya lebih banyak lagi pekerjaan di sektor konstruksi). Pada sisi penawaran, jumlah dan jenis pekerja yang sekarang tersedia, termasuk keterampilan, pengalaman dan kemampuan mereka perlu diketahui. Pelaksanaan survei diawali pada 14 daerah pantai yang terkena dampak paling berat dan termasuk tempat-tempat pengungsian. Langkah ini perlu dilaksanakan sesegera mungkin.
- c. Untuk menunjang usaha mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja, perlu didirikan Pusat Pelayanan Ketenagakerjaan di kota-kota utama di daerah-daerah yang ditimpa bencana, yang dapat meliputi Banda Aceh (sudah didirikan), Meulaboh (dalam proses), Calang, Bireuen, Janthoe dan Lhokseumawe. Untuk melengkapi jaringan ini, sejumlah unit bergerak dapat dikembangkan di daerah-daerah lain. Biasanya, pusat pelayanan ketenagakerjaan dapat didirikan dalam waktu singkat, dan pelaksanaannya dapat diberikan pelatihan kilat untuk mengelola kegiatan ini.

3. Melatih masyarakat dalam rangka mengganti pekerjaan yang hilang

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penduduk di Aceh dan Nias dalam memperoleh akses kesempatan kerja. Prinsip utama pelatihan keterampilan adalah untuk memenuhi kesesuaian permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan. Kegiatan ini erat keterkaitannya dengan hasil survai ketenaga-kerjaan dan dari informasi yang dikumpulkan dari pusat penempatan tenaga kerja. Langkah selanjutnya adalah melakukan pemetaan kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan kriteria seperti jenis kelamin dan umur, kategori pekerjaan, menurut lokasi/wilayah/desa/kelurahan.

Pelatihan jangka pendek diperkirakan akan dibutuhkan untuk bidang-bidang seperti keterampilan membangun (pertukangan-kayu, pengelasan, pemasangan batu, instalasi listrik, dsb.) dan dalam bidang-bidang yang sesuai untuk kemampuan mendirikan usaha kecil (jasa menjahit, pembuatan makanan, perdagangan, dsb.). Pelatihan diprioritaskan kepada setiap individu yang telah memiliki keahlian dan pengalaman. Selanjutnya dapat diberikan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan pelatihan untuk memulai pekerjaan/usaha yang benar-benar baru.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan program pelatihan intensif jangka pendek dengan keterampilan dasar (dikenal sebagai program pelatihan *entry level*). Dengan keterampilan ini, mereka akan memperoleh akses ke pasar tenaga kerja, meskipun perlu waktu yang cukup lama untuk meningkatkan pekerjaan yang produktif. Hal ini perlu juga disadari oleh para pemberi kerja, agar dapat memberikan pelatihan untuk jenis-jenis pekerjaan yang khusus.

Para pemberi kerja perlu didorong untuk menggunakan pekerja dari Aceh dan Nias. Khususnya untuk pekerjaan/jabatan yang memerlukan tenaga terampil atau setengah terampil serta memberikan pelatihan kerja kepada mereka untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan. Misalnya, tender diberikan dengan mempertimbangkan a) target penciptaan lapangan kerja dan b) usulan pelatihan di tempat kerja dan pemagangan yang ditawarkan oleh para kontraktor.

Langkah-langkah untuk melakukan pelatihan kejuruan

- a. Untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan tahap rekonstruksi, dapat dilakukan dengan memberikan kursus-kursus di bidang:
 - a. Konstruksi beton, tukang kayu, tukang batu, pemasangan ubin, atap, beton, pembuatan lemari dan perabotan, instalasi listrik, sanitasi dan saluran, serta pengelasan lengkung listrik dan oxy-acetylene. Pelatihan praktis akan dilakukan, di lokasi bangunan yang memungkinkan.
- b. Seluruh peserta pelatihan akan dinilai berdasarkan tingkatan keahlian yang ada dalam tiga kategori, yaitu: .
 - 1) Peserta dengan kemampuan memadai akan segera disalurkan ke perusahaan untuk mengambil pelatihan kerja.
 - 2) Peserta yang memerlukan pelatihan jangka pendek sebelum penempatan dan;
 - 3) Peserta yang memerlukan kursus-kursus dasar sebelum penempatan kerja.

- c. Perlu membentuk Tim pelatihan dan setiap tim akan dipimpin oleh seorang pengajar (tutor). Pelatihan konstruksi praktis harus dijadwalkan setelah prosedur-prosedur aktual kontraktor bangunan dipenuhi.
- d. Menyediakan kursus-kursus pelatihan yang sesuai kebutuhan sektor-sektor ekonomi meliputi pertanian, perikanan, pelayanan dan informasi serta teknologi komunikasi. Sektor utilitas publik memerlukan perhatian khusus di dalam memenuhi pelatihan untuk perawat, paramedis, bidan, pemadam kebakaran, pembangkit/distribusi listrik dan teknisi pekerjaan umum serta pengawas tenaga kerja.

4.2. Pemulihan infrastruktur publik

Pengalaman dari paska bencana yang terjadi di tempat lain menunjukkan bahwa dukungan publik dengan segera diperlukan utk memulihkan kehidupan dan mata pencaharian. Dengan tujuan pemulihan aset produktif pemerintah perlu mengadopsi strategi yang adil untuk menyediakan sumber ketahanan segera bagi individual ataupun rumah tangga yang terkena.

Pemerintah perlu segera memulihkan barang dan pelayanan publik yang mendasar sebagai prioritas utama setelah tahap tanggap darurat. Mengingat peranan penting dari pemulihan barang dan pelayanan publik, apakah itu memberikan manfaat langsung atau tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja, dibutuhkan strategi yang mengkonsolidasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah terkait, termasuk yang dilakukan bersama masyarakat.

Pemulihan pelayanan publik ini mencakup kegiatan seperti pembangunan kembali jalan-jalan, instalasi listrik dan komunikasi, pelabuhan kapal, pelabuhan ikan, pemulihan saluran irigasi, pembangunan pasar, kembalinya berfungsi stasiun bus atau kendaraan angkutan lainnya. Fungsi pemulihan pelayanan publik ini dilakukan oleh masing-masing sektor terkait dengan sumber pendanaan baik dari APBN ataupun dana bantuan luar negeri.

Karena keterbatasan sumberdaya yang ada pemulihan diutamakan kepada sarana pelayanan masyarakat yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat terutama petani, nelayan, pedagang, dan pengrajin.

Upaya Yang ditempuh dalam memulihkan pelayanan publik:

1. Menyediakan secepatnya prasarana dasar yang langsung mendorong pulihnya aktivitas ekonomi seperti jalan (terutama antar kabupaten), pelabuhan, listrik, air minum, dan telekomunikasi terutama di pantai barat NAD dalam waktu satu tahun.
2. Secara bertahap membangun kembali prasarana ekonomi masyarakat baik sejak kondisi tanggap darurat, rehabilitasi, sampai selesainya tahap rekonstruksi. Prasarana ekonomi yang dimaksud adalah antara lain pasar tradisional dan pasar induk, pergudangan, tempat pelelangan ikan (TPI), irigasi, balai latihan kerja (BLK), unit pelayanan teknis (UPT) industri, dan prasarana publik di bidang pariwisata.
3. Memulihkan fasilitas layanan infrastruktur ekonomi seperti pelayanan kemetrolagian, pelayanan uji mutu barang, pelayanan litbang di berbagai sektor antara lain industri, perdagangan, pertanian, dan perikanan.
4. Ditempuh pula kebijakan perdagangan yang **khusus dan berdimensi jangka pendek** untuk percepatan pulihnya aktivitas ekonomi yang antara lain mencakup:

- a. Kebijakan menjaga kontinuitas pengadaan komoditi bahan pokok strategis di NAD dan Nias seperti komoditi gula, beras. termasuk monitoring stok dan harga bahan pokok.
- b. Kebijakan perdagangan antar pulau, kebijakan importasi terhadap komoditi tertentu dalam jangka waktu seperti pengadaaan komoditi tertentu seperti kayu, semen, dan besi untuk keperluan konstruksi di NAD dan Nias.

Langkah-langkah yang diperlukan

1. Melakukan identifikasi kebutuhan prasarana ekonomi masyarakat per kabupaten, yang mencakup kebutuhan prasarana masing-masing sektor ekonomi terkait.
2. Memprioritaskan pembangunan daerah pantai barat NAD untuk dilaksanakan berdasarkan skala kerusakan sebagai tahap awal pembangunan NAD secara keseluruhan, termasuk pembangunan pulau Nias.
3. Mengembangkan pendekatan berbasis pembangunan masyarakat (*community based development*) untuk merespon dinamika kultural masyarakat Aceh dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan prasarana ekonomi.

4.3. Memulihkan sistem perbankan

Strategi Pemulihan Sistem Perbankan meliputi 4 strategi utama yaitu:

1. Pemulihan Infrastruktur Perbankan

Pemulihan infrastruktur perbankan difokuskan pada kelancaran sistem pembayaran di daerah yang terkena bencana. Beberapa langkah yang telah dilakukan pada masa darurat antara lain adalah dengan membatasi kegiatan operasional perbankan dari kantor sementara ke kantor permanen tidak lebih dari satu tahun (kecuali daerah tertentu seperti Meulaboh, Calang dsb melihat situasi dan kondisi daerah ybs); serta menjamin kelancaran dan jumlah *cash supply* yang cukup dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian di daerah bencana dengan menugaskan KBI Medan untuk memantau dan melaksanakannya.

Perbankan di propinsi NAD terdiri dari bank umum dan BPR. Untuk bank umum, kerusakan terparah terjadi pada BPD yang berkantor pusat di ibukota propinsi NAD. Mengingat pentingnya peran BPD Aceh, dimana sekitar 40,1% kredit yang disalurkan di Aceh berasal dari bank ini, disamping melakukan pembayaran gaji pegawai negeri, diperlukan langkah-langkah pemulihan infrastruktur guna memperlancar sistem pembayaran pada BPD melalui rencana restrukturisasi BPD Aceh.

Langkah restrukturisasi BPD ditujukan untuk menambah permodalan bagi BPD guna menggerakkan kegiatannya. Saat ini sedang dikaji mekanisme pelaksanaan maupun payung hukum bagi pelaksanaan restrukturisasi BPD tersebut. Beberapa hal yang sedang dikaji adalah: (i) jumlah dana yang dibutuhkan agar BPD dapat kembali beroperasi secara normal; (ii) mekanisme pembiayaan restrukturisasi mengingat status BPD Aceh saat ini adalah bank rekap; serta (iii) payung hukum yang dibutuhkan untuk pelaksanaan restrukturisasi tersebut.

Guna meringankan beban BPR/BPRS di Propinsi NAD, langkah-langkah yang dilakukan antara lain adalah pembebasan bagi BPR/BPRS dari ketentuan mengenai pentahapan pemenuhan modal seperti yang ada pada PBI No. 6/22/2004 tentang BPR Pasal 66 (40% pada tahun 2006 dan 70% pada tahun 2008) namun tetap harus terpenuhi 100% pada

tahun 2010) serta BPR yang akan melakukan pemindahan alamat kantor tidak harus menyesuaikan persyaratan modal yang baru¹.

Dalam kaitannya dengan rehabilitasi infrastruktur BPR/BPRS, perlu diperhatikan kepemilikannya. Berdasarkan data terakhir dari Bank Indonesia², terdapat 2 (dua) BPR yang hancur total, dan pemilik dari kedua BPR tersebut adalah Pemda. Untuk itu, perlu dikoordinasikan dengan Pemda mengenai penanganan lebih lanjut bagi kedua BPR tersebut.

2. Pemulihan Identifikasi Depositor

Guna melakukan pemulihan data bagi depositor, disepakati untuk membentuk prosedur darurat (diluar prosedur tertentu yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku), bersama antara bank yang terkena bencana dengan Bank Indonesia setelah mendapat masukan dari pihak-pihak terkait lainnya.

Pada umumnya bank membatasi penarikan dana oleh nasabah tanpa identitas lengkap pada jumlah tertentu. Prosedur darurat yang dilakukan dalam penarikan rekening giro/tabungan oleh nasabah yang tidak memiliki bukti diri yaitu:

- 1) Mengisi formulir Identifikasi Nasabah bank, Wawancara
- 2) Membuat surat pernyataan yang membebaskan bank dari segala tuntutan/gugatan hukum apabila suatu saat ada nasabah lain yang mengaku nasabah pemilik rekening
- 3) Memfoto dan mengambil sidik jari nasabah penarik dana.
- 4) Adapun mengenai jumlah dana yang dapat ditarik oleh nasabah sepenuhnya diserahkan pada *risk appetite* masing-masing bank. Pada tahap awal setelah terjadi bencana dan bank mulai beroperasi, jumlah dana yang dapat ditarik oleh nasabah maksimum Rp. 5.000.000.

Penarikan rekening giro/tabungan oleh ahli waris dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Ahli Waris mengisi Form Identifikasi Pewaris dan Form Identifikasi Ahli Waris;
- 2) Penarikan dana tunai dibatasi untuk jumlah tertentu yang nilainya tidak lebih besar dari nilai yang dapat dibayarkan kepada nasabah tanpa bukti diri;
- 3) Ahli waris yang dapat melakukan penarikan tersebut hanya ahli waris yang mempunyai hubungan keluarga inti, yakni suami atau istri dan anak. Adapun untuk ahli waris di luar keluarga inti akan diberlakukan sesuai dengan persyaratan pada kondisi normal.

Pihak yang mengaku sebagai ahli waris wajib melengkapi :

- 1) keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris dan disahkan oleh lurah dan camat di daerah asal pewaris; atau
- 2) akta di bawah tangan mengenai keahliwarisan yang dibuat oleh ahli waris dan disahkan tanda tangannya (dilegalisasi) oleh Notaris atau Pengadilan Negeri manapun.

¹ Berdasarkan PBI No. 6/22/2004 tentang BPR Ps 42 menyebutkan bahwa pemindahan alamat kantor di wilayah lebih tinggi persyaratan modalnya, maka akan disesuaikan dengan persyaratan modal pada daerah yang bersangkutan.

² Informasi dari Direktorat BPR Bank Indonesia tanggal 10 Maret 2005

Untuk pencairan deposito, bank tetap mensyaratkan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain harus menyampaikan keterangan kepolisian.

Kedepan, diperlukan seperangkat aturan guna melegalkan prosedur darurat yang telah dilakukan oleh perbankan untuk menghindari konflik yang kemungkinan akan terjadi berkaitan dengan proses identifikasi nasabah yang dilakukan pada masa darurat. Berkaitan dengan proses identifikasi nasabah, berdasarkan masukan dari masyarakat di Propinsi NAD terdapat usulan bahwa dana perbankan yang tidak ada pemiliknya akan dimasukkan ke dalam Baitul Maal. Sementara itu, proses identifikasi nasabah juga diusulkan melalui keputusan mahkamah syariah. Untuk itu, mekanisme tersebut masih harus dikaji ulang agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

Dalam kaitannya dengan pembayaran dana pihak ketiga bagi nasabah perbankan, berdasarkan PBI No. 3/12/PBI/2001 Pasal 16 disebutkan bahwa penjaminan akan dibayarkan kepada pihak ketiga (nasabah) apabila bank telah dibekukan operasinya. Pada kasus bencana alam di Propinsi NAD, terdapat 2 (dua) BPR milik Pemda yang mengalami kerusakan total, dimana satu dari BPR tersebut adalah peserta program penjaminan dan yang satu lagi adalah tidak termasuk dalam program penjaminan. Untuk itu, guna melakukan pembayaran dana pihak ketiga bagi BPR yang terkena bencana diperlukan suatu perangkat hukum untuk memperjelas mekanisme dana talangan bagi pembayaran nasabah di kedua BPR tersebut.

3. Penyelesaian Kredit Perbankan

Adanya bencana tsunami berpotensi meningkatkan kredit macet karena kegagalan debitur dalam melakukan pembayaran kembali utangnya. Adapun upaya yang telah dilakukan guna meringankan beban debitur adalah melakukan restrukturisasi kredit dengan dikeluarkannya PBI No.7/5/PBI/2005 tentang perlakuan khusus terhadap kredit bank umum pasca bencana nasional di propinsi NAD dan kabupaten Nias, Propinsi Sulawesi Utara. Adapun pokok dari PBI ini adalah perlakuan khusus terhadap kredit bank umum berupa kelonggaran kualitas kredit yang direstrukturisasi digolongkan lancar sampai dengan akhir Januari tahun 2008. Ketentuan sebagaimana dimaksud tersebut hanya berlaku untuk Kredit yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) disalurkan kepada nasabah debitur dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan atau Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara; dan
- 2) telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga Kredit yang disebabkan dampak dari bencana nasional di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan atau Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara.

Meskipun telah dikeluarkan PBI tentang restrukturisasi kredit untuk Propinsi NAD dan Kabupaten Nias, namun peraturan tersebut baru mencakup debitur pada bank umum. Untuk itu perlu dirumuskan mengenai restrukturisasi kredit bagi debitur BPR/BPRS.

Berkaitan dengan hilangnya agunan kredit baik fisik maupun sertifikat sebagai dampak dari tsunami, maka diperlukan langkah-langkah identifikasi dokumen dengan koordinasi dengan instansi terkait (Pemda, BPN dan Depkumham). Disamping itu juga akan dikaji tentang rencana penghapusan tagihan kredit macet dengan mengindahkan peraturan di bidang piutang negara.

4. Pemulihan Fungsi Intermediasi

Adapun fokus penting di dalam pemulihan fungsi intermediasi adalah pemulihan dari bank pada sisi *supply* dan debitur pada sisi *demand*. Melalui proses pada keduanya, fungsi intermediasi dapat pulih. Dari sisi perbankan langkah-langkah yang dilakukan untuk memulihkan fungsi intermediasi antara lain adalah melakukan restrukturisasi kredit seperti yang telah disebutkan di atas serta kajian tentang penghapusan tagihan kredit macet dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku di bidang piutang. Mengingat rawannya propinsi NAD akan bencana alam, maka diperlukan mekanisme penjaminan kredit antara Pemerintah Daerah, Perbankan dan dunia usaha.

Pada sisi *demand*, langkah-langkah yang tengah dikaji antara lain adalah keringanan persyaratan di dalam pengajuan kredit, memperpanjang *grace period* pemberian kredit, serta mekanisme penyalurannya agar kekeliruan dalam penentuan *target group* dapat dikurangi.

4.4. Mendukung pemulihan sarana produksi non publik

Berkembangnya kembali aset-aset produktif swasta sangat penting artinya dalam merehabilitasi dan merekonstruksi kehidupan masyarakat di daerah terkena bencana. Kerusakan dan kehancuran aset-aset produktif tidak hanya membebankan masa depan para pemiliknya, namun juga masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang bergantung kepada aset-aset tersebut, misalnya, para karyawan dan *service provider*. Selain itu, *business chains* berbagai industri juga terganggu, mengakibatkan lumpuhnya roda perekonomian. Oleh sebab itu, peran pemerintah untuk merehabilitasi dan menggerakkan pembangunan dan pertumbuhan kembali aset-aset ini sangatlah penting.

Terdapat tiga isu utama berkaitan dengan rancangan *assistance* (program) yang ditujukan untuk rehabilitasi, pembangunan, dan pertumbuhan aset produktif di NAD dan Sumut, yaitu:

- 1) Siapa yang menjadi sasaran program;
- 2) Pendekatan yang digunakan untuk memastikan peserta program ialah melalui Verifikasi Sasaran;
- 3) Rincian *assistance*.

1. Kriteria Sasaran Program

- a. Masyarakat yang aset produktif-nya rusak atau hancur karena bencana (pemilik aset), tanpa membedakan apakah mereka menetap di desa atau kelurahan yang tergenang air tsunami (desa bencana) atau tidak. Apabila pemilik aset telah meninggal akibat bencana sementara ahli waris masih hidup, dapat diberikan kepada ahli waris bekas pemilik aset, baik bagi mereka yang pernah berusaha bersama dengan pemilik aset maupun tidak pernah melakukan usaha. Usia bagi ahli waris, adalah telah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun.
- b. Masyarakat/Penduduk yang tempat tinggalnya ditetapkan terkena bencana, baik di desa maupun di kota.

Biro Pusat Statistik (BPS) memperkirakan terdapat 600 lebih desa bencana di NAD, dengan jumlah total penduduk di atas 500,000 jiwa. Apabila diasumsikan sebagian besar dari 200,000 penduduk meninggal atau hilang berasal dari desa terkena bencana, dan

60% dari mereka yang berhasil hidup ialah penduduk dewasa, maka jumlah penduduk dari sasaran kedua paling sedikit ialah 180,000 jiwa. Sementara itu, di Nias, tercatat 300 orang meninggal dunia (sampai dengan tanggal 31 Maret)

2. Verifikasi Sasaran

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk verifikasi ialah melalui musyawarah desa/kelurahan yang sengaja diadakan untuk tujuan tersebut,. Hasil verifikasi dianggap sah hanya bila sejumlah minimal penduduk desa/kelurahan hadir saat musyawarah.³

Pendekatan lainnya ialah pengangkatan panitia verifikasi yang dipilih oleh penduduk desa/kelurahan. Untuk pendekatan ini, sebaiknya diwakili unsur-unsur yang merefleksikan kemajemukan masyarakat, dan jumlahnya cukup besar sehingga dapat menampung aspirasi ataupun kepentingan yang bisa berbeda di dalam masyarakat.

Verifikasi sasaran untuk program ini dilaksanakan bersamaan dengan verifikasi sasaran untuk program-program lainnya⁴. Verifikasi ditujukan untuk masyarakat yang terkena dampak bencana di NAD dan Sumut. Apabila seseorang memenuhi kriteria untuk turut serta dalam sebuah program tertentu dan dapat disahkan di saat musyawarah atau oleh panitia verifikasi, orang tersebut berhak menerima *voucher* atau bukti lain⁵ yang menandakan eligibilitasnya untuk program yang dimaksud.

Persyaratan/bukti tambahan yang diperlukan, khusus untuk program rehabilitasi aset adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi masyarakat yang memenuhi kriteria sasaran kedua. Data yang diperlukan adalah data registrasi pendaftaran pemilihan umum (pemilu) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- 2) Bagi masyarakat yang memenuhi kriteria sasaran pertama, tetapi bukan penduduk desa bencana, mereka diwajibkan hadir pada musyawarah desa/kelurahan atau menemui panitia verifikasi di desa/kelurahan di mana aset-nya dulu berada, dan memaparkan bukti eligibilitasnya.

3. Bentuk *Assistance*

- a. Bentuk *assistance* pemerintah untuk program rehabilitasi dan pengembangan aset produktif berbentuk kombinasi antara tunai dan kredit berinsentif. Mengingat jumlah sasaran bisa mencapai 150.000 kepala keluarga di NAD dan 10.000 di Nias, sementara nilai tunai yang dapat disumbangkan pemerintah per jiwa akan terbatas, sehingga sebagai modal pengembangan usaha, kemungkinan hanya cukup untuk memenuhi usaha berskala mikro. Padahal, di antara sasaran kemungkinan ada orang-orang yang

³ Dalam proyek Bank Dunia “Kecamatan Development Program”, 85% penduduk desa harus hadir untuk menyepakati proyek yang akan dijalankan

⁴ Misalnya, untuk perumahan, atau mungkin juga bantuan untuk para janda, dan lain-lain

⁵ Misalnya, *sticker* berwarna biru yang dapat ditempelkan pada kartu identitas menandakan orang tersebut ialah penduduk desa bencana, sehingga untuk program rehabilitasi aset, mereka yang memiliki *sticker* warna biru dapat turut serta. Atau, kartu identitas baru yang mengandung informasi (sebaiknya dalam kode) mengenai pribadi pemilik kartu. Misalnya, kode 1 menandakan orang tersebut ialah seorang nelayan, kode 2 berarti orang yang kehilangan rumah, dan seterusnya.

mempunyai *skills* dan pengetahuan untuk mengembangkan usaha berskala kecil maupun menengah. Dengan demikian bentuk tunai dalam bantuan ini belum dapat memenuhi modal yang diperlukan.

Walaupun tujuan utama dari program ini ialah untuk mengembangkan usaha mikro, kecil atau menengah, sebagian penerima *assistance* kemungkinan akan menggunakan uang yang mereka terima untuk *subsistence*. Karena program ini ditujukan untuk kondisi darurat di daerah bencana, hal ini dapat ditolerir.

- b. Bantuan dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat ini walaupun datangnya dari berbagai sektor akan disalurkan melalui 1 (satu) BKM (CBO), suatu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat. Bantuan diberikan baik kepada perorangan maupun kelompok dan diklasifikasikan ke dalam 3 bidang kegiatan utama, yaitu ekonomi (berbagai sektor), investasi prasarana umum serta sosial dan para calon penerimanya diputuskan melalui mekanisme BKM (CBO). Untuk bantuan di bidang ekonomi yang merupakan upaya pemulihan sarana produktif masyarakat agar dapat memulai kembali kegiatan kembali usahanya diberikan dalam tiga kategori: (i) hibah perorangan, (ii) hibah kelompok, dan (iii) pinjaman komersial.

Hibah perorangan senilai Rp. 2 juta diberikan sebagai bantuan pemulihan sarana usaha yang sederhana kepada pengusaha mikro guna membantu mereka untuk memulai kembali kegiatan produktifnya dan atau keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh para korban bencana. Hibah kelompok (4 – 6 orang) yang besarnya antara Rp.5 juta – Rp.15 juta diberikan untuk pengadaan sarana produksi bersama (*common facility*) yang harganya lebih besar dari jenis bantuan pertama. Bantuan ini dapat digunakan sebagai dana padanan (*matching fund*) bila kelompok membutuhkan sarana produksi yang nilainya lebih besar dari Rp.15 juta. Kekurangan kebutuhan dana tersebut diperoleh dari pinjaman komersial perbankan dan tanpa subsidi bunga untuk menghindarkan moral hazard. Namun pinjaman tersebut diberikan beberapa kemudahan seperti waktu tenggang yang diperpanjang, persyaratan kredit yang lebih sederhana/mudah/cepat dan jaminan kredit (*credit guarantee*). Sedangkan bantuan kategori ketiga yang merupakan pinjaman komersial tanpa komponen hibah lebih ditujukan kepada usaha kecil, menengah dan besar. Pinjaman ini juga diberikan kemudahan seperti telah disebutkan terdahulu yang penyalurannya selain bisa menggunakan cara konvensional (pinjaman dengan suku bunga) namun juga bisa menggunakan cara non-konvensional seperti sarana ventura (*venture capital*), sewa-beli (*leasing*) dan pembiayaan berbasis syaria'ah.

Bank yang ditunjuk diberikan kuasa membuat keputusan untuk menyalurkan pinjaman atau tidak, dan bagi mereka yang pengajuan kreditnya ditolak, yang bersangkutan dapat mengajukan kembali kredit atau meng-klaim *assistance* tunai.

Apabila pinjaman disetujui dan kemudian kreditur *default*, atau gagal menyicil lagi secara permanen, pemerintah akan membayar kepada bank sebagian porsi dari nilai pokok pinjaman yang belum dikembalikan. Dengan jaminan seperti ini, bank yang ditunjuk diharapkan akan lebih berani untuk mengucurkan kredit dalam kondisi resiko tinggi yang dihadapi dunia usaha di daerah bencana. Agar bank yang ditunjuk lebih berani mengambil resiko kredit usaha-usaha berskala kecil, skala jaminan pemerintah bisa dirancang berkorelasi negatif dengan nilai pinjaman yang dikucurkan, misalnya seperti berikut:

Nilai Pinjaman	Proporsi Pokok Pinjaman yang Dijamin
Kurang dari Rp. 15 juta	60%
Rp. 15 – 200 juta	30%
Rp. 200 – Rp. 500 juta	15%

Catatan:Menggunakan contoh di atas, bila seorang kreditur meminjam Rp. 8 juta, telah menyicil pokok sebanyak Rp. 3 juta dan kemudian *default*, maka pemerintah akan membayarkan jaminannya kepada bank sebanyak 60% dari Rp. 5 juta, atau Rp. 3 juta.

4.5. Peningkatan Akses Sumber Daya Produktif

Mendorong kembali kegiatan ekonomi tentu tidak terlepas dari ketersediaan dana. Untuk menjamin pemulihan ekonomi dengan segera pemerintah perlu merumuskan kebijakan untuk menggerakkan kegiatan sektor non pulbik di NAD dan Sumut. Dengan lumpuhnya sektor ekonomi karena sumber-sumber produktif yang hancur akibat bencana yang terjadi membutuhkan pendanaan.

Agar usaha baik usaha besar, usaha sedang maupun usaha kecil dan mikro dapat segera pulih hal tersebut sangat tergantung pada ketersediaan dana. Untuk itu perlu difikirkan ketersediaan dana/kredit bagi usaha besar ataupun UKM/mikro antar lain dengan:

- 1) Melakukan pentargetan siapa yang berhak mendapatkan kredit
- 2) Perpanjangan masa grace period
- 3) Menyediakan pinjaman dengan bunga lunak, ini diterapkan baik bagi perusahaan besar maupun perusahaan UKM
- 4) Memberikan *tax holiday* dengan pentargetan untk merangsang kegiatan perdagangan dan ekspor produk-produk NAD dan Nias. Dalam hal ini perlu dirumuskan segera kemungkinan-strategi stragegi yang dapat diterapkan.

Bagi usaha mikro dan UKM perlu dipertimbangkan hal berikut:

- 1) Pinjaman bersubsidi bagi usaha mikro dan UKM
- 2) Dukungan jaminan pinjaman untuk sebagian kerugian atau jenis kerugian tertentu
- 3) Membangun klaster usaha
- 4) Memberikan dukungan dan memberdayakan Business Development Services (BDS/pelayanan pengembangan usaha). Pusat-pusat pelayanan ini dapat memberikan layanan dalam hal pemulihan hak-hak legal serta akses kepada sumber daya produktif (informasi, teknologi, pemasaran dan pembiayaan)
- 5) Kemudahan proses pemulihan hal-hak hukum antara lain denan memberikan layanan perizinan/sertifikasi yang mudah, murah dan cepat. Akan lebih baik lagi bila cukup dengan pendaftaran usaha saja.
- 6) Kemitraan usaha (sub contracting) dengan BUMN dan usaha besar
- 7) Melibatkan UMKM di dalam upaya-upaya pemulihan dan rekonstuksi NAD dan Nias paska tsunami, antara lain dalam bidang konstruksi, pengadaan material, perdagagnan eceran (waserda), transportasi serta pembiayaan skala mikro (LKM)

Dari hasil inventarisasi kerusakan dan nilai yang telah dilakukan oleh sektor-sektor, diharapkan dapat direncanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi dengan menggunakan pendekatan tersebut.

a. Pendekatan Berbasis Masyarakat

Pendampingan usaha mikro dalam rangka pemulihan ekonomi di Aceh menggunakan pendekatan Community Based Development (CBD). Kelebihan utama dari pendekatan ini adalah kemampuan untuk mengadopsi karakteristik dari ekonomi masyarakat dan menterjemahkannya ke dalam strategi pelaksanaan serta dapat dilakukan dalam waktu yang relatif pendek. Selain itu memungkinkan terjadinya pembinaan secara lebih sistematis kepada pelaku ekonomi mikro.

Mengingat bahwa pada saat yang sama berbagai program akan dilakukan dalam komunitas yang sama serta menggunakan pendekatan yang sama maka diharapkan adanya sinergi dari program-program tersebut. Program yang sangat terkait langsung dengan pemulihan ekonomi masyarakat adalah program perumahan dan pemukiman, program pertanian serta program sektoral lainnya dalam skala mikro seperti program kartu sehat, beasiswa dan sebagainya.

Kunci utama dari sinergi program ini adalah penentuan adanya satu lembaga CBO di wilayah yurisdiksi yang akan menerima bantuan yang bisa mengkoordinasi semua bantuan dalam skala mikro.

Hal lain yang tak kalah penting dalam konteks sinergi program adalah pembagian wilayah. Ini harus ditentukan berdasar suatu batasan yang memastikan bahwa seluruh wilayah dapat terbagi habis, seperti wilayah desa/kelurahan atau kecamatan. Hal ini memungkinkan terjadinya penajaman kelompok sasaran serta cakupan menyeluruh dari kelompok sasaran.

Keterkaitan tinggi program pemulihan ekonomi ini dengan program pembangunan perumahan dan permukiman (*housing & settlement program*) dikarenakan untuk menentukan kelompok sasaran, program ini perlu untuk memiliki data dasar dari kegiatan pemetaan swadaya yang diinisiasi oleh program perumahan. Data/ informasi yang dibutuhkan meliputi: data penduduk, kondisi dan potensi ekonomi pra dan pasca Tsunami, aspirasi masyarakat untuk menentukan penerima bantuan dan pinjaman, serta untuk mendesain kegiatan ekonomi yang terpadu. Oleh karena itu disarankan program ini dilakukan melalui CBO yang sama dengan *housing and settlement program* untuk menjaga konsistensi dan kesesuaian data/informasi dan keterpaduan program di level desa/kelurahan.⁶

⁶ Sebaiknya seluruh program mikro dan berbasis masyarakat di sinergikan sehingga lebih efektif dan tepat sasaran serta tidak tumpang tindih. Dengan Mekanisme Block grant ke desa/kelurahan/kecamatan dengan mekanisme open menu dan sangat membantu dalam kecepatan dan efisiensi dan pemerintahan. Dengan mekanisme block grant yang berkelanjutan selama masa Rehabilitasi dan Rekonstruksi ke desa/kecamatan dengan pendampingan yang intensif serta berkelanjutan akan secara sistematis serta organik kearah Desa yang mandiri. Program-program sektor dapat diintegrasikan secara perlahan tapi pasti kedalam system ini dalam waktu sebagaimana disarankan dalam Diagram 1.1., 1.2 dan 1.3

Kriteria dalam Pendekatan CBD antara lain:

- 1) Bebas dari jaminan ekonomi memungkinkan masyarakat Aceh yang kehilangan seluruh harta bendanya untuk tetap berkiprah dalam pengembangan usaha mikro.
- 2) Kegiatan kelompok usaha yang menyentuh kegiatan sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan memungkinkan masyarakat Aceh untuk membangun modal sosial dan ekonomi yang sementara ini terguncang. Kegiatan silaturahmi kelompok seperti curah rasa, dan renungan bersama, dapat dijadikan sebagai terapi dan penguatan mental. Kegiatan diskusi mengenai kemasyarakatan dapat menjadi bibit awal untuk memperoleh persepsi dan aspirasi masyarakat Aceh untuk menata masa depan wilayahnya.
- 3) Sistem kebersamaan membangun kemandirian melalui mekanisme berkelompok, secara psikologis dapat menguatkan masyarakat Aceh. Pada saat ini, masyarakat Aceh belum siap secara psikologis mengatasi masalah sosial ekonomi yang dihadapinya secara individu. Keberadaan kelompok dan pendampingan CBO akan menciptakan iklim saling memotivasi dan memperkuat mereka untuk bangkit kembali

Keberadaan CBO sebagai organisasi masyarakat/lembaga yang menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk kepentingan kemitraan para kelompok usaha menjadi sangat strategis. Hal ini dikarenakan, banyaknya kegiatan-kegiatan pembangunan di Aceh, memerlukan pengkoordinasian oleh suatu organisasi di level masyarakat. Selain program pemulihan ekonomi, program lainnya seperti pembangunan infrastruktur, perumahan, kesehatan, idealnya dikoordinasikan oleh CBO, sehingga diperoleh konsistensi dalam penggunaan data, misalnya data penerima bantuan.

b. Pendekatan Yang Dilakukan

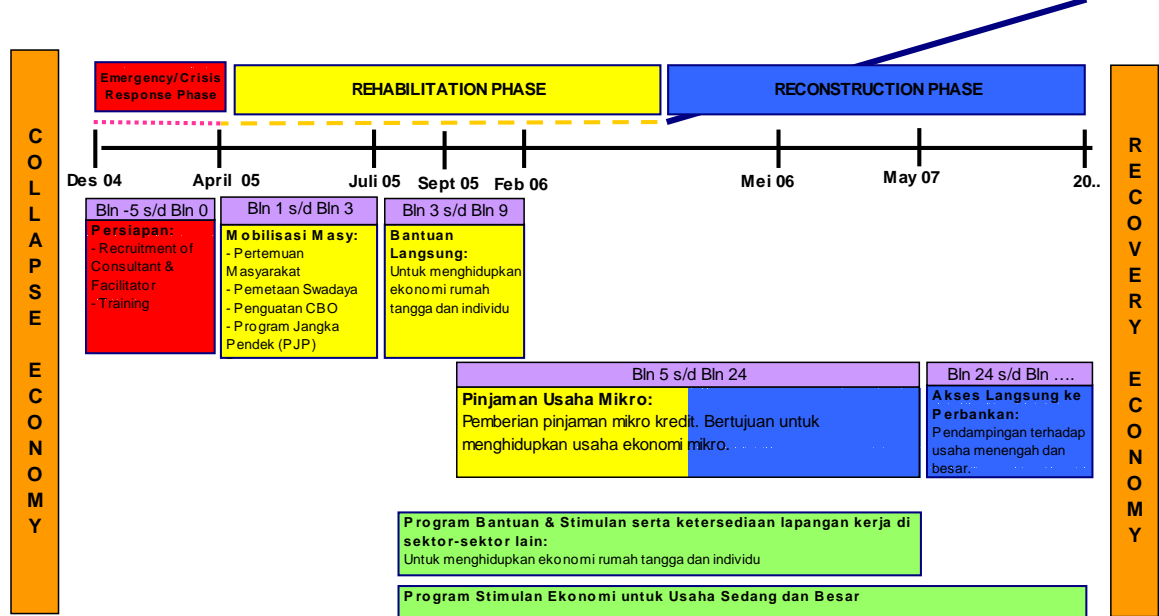
Untuk program pemulihan ekonomi masyarakat harus didasarkan pada usaha-usaha untuk meningkatkan ketersediaan lapangan kerja yang selaras dengan pembangunan infrastruktur secara menyeluruh baik di daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini juga diikuti oleh program-program pemberian stimulan ekonomi yang dikombinasikan dengan program bantuan langsung masyarakat di berbagai sektor.

Di tingkat masyarakat, peluang-peluang ekonomi diatas akibat berbagai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta potensi yang ada perlu secara paralel difasilitasi agar dapat dimanfaatkan secara langsung oleh para korban Tsunami, sehingga dapat menggerakkan kembali roda perekonomian masyarakat.

Untuk menangkap peluang-peluang ekonomi secara strategis, maka strategi program adalah sebagai berikut (diagram 1):

- 1) Pemberian hibah bantuan kepada setiap keluarga yang berlokasi di wilayah dampak. Bertujuan untuk menghidupkan ekonomi dasar rumah tangga
- 2) Bulan ke 4-6 tahun pertama s/d tahun kedua, pemberian pinjaman mikro kredit. Bertujuan untuk menghidupkan usaha ekonomi mikro. Sistem dana bergulir akan dikembangkan di tingkat desa/kelurahan dengan modal awal hibah langsung dari pemerintah kepada masing-masing CBO antara Rp 100 juta-Rp 200 juta)/CBO.
- 3) Pada bulan 3 diperlukan program intervensi khusus terhadap usaha menengah dan besar melalui berbagai program stimulan.

Diagram 1 : Strategi Umum Program Pemulihan Ekonomi Masyarakat



c. Penerapan Pelaksanaan Bantuan.

Agar strategi yang dijabarkan di atas dapat diterjemahkan ke dalam intervensi praktis dari program Pemulihan Ekonomi Masyarakat, maka beberapa pertimbangan dibawah ini harus disinergikan ke dalam design program:

- 1) CBO yang Representatif. Sebagai *entry point* dari semua program pembangunan di tingkat masyarakat, CBO harus merupakan lembaga yang memperoleh legitimasi dari masyarakat. CBO sebagai organisasi lokal yang mempunyai pengetahuan lebih terhadap masyarakat dan kondisi setempat, mempunyai keunggulan dalam melakukan identifikasi awal, verifikasi, pentargetan & prioritas dalam kegiatan pendampingan usaha mikro. Pada kondisi dimana sulitnya data yang valid, peran CBO sangat penting untuk menyediakan informasi dasar.
- 2) Fasilitator Pendamping. Kehadiran fasilitator menjadi syarat penting dalam pendampingan usaha mikro. Diperlukan kehadiran fasilitator untuk melakukan re-verifikasi terhadap penerima bantuan dan mendorong terjadinya dinamika kelompok serta memeberikan informasi yang menyelesuruh tentang potensi – potensi dan kesempatan yang tersedia.
- 3) Open Menu. Bantuan langsung dan pinjaman mikrokredit akan menjadi instrumen utama dari proses pemulihan ekonomi masyarakat. Kombinasi kedua skema tersebut memungkinkan adanya kelenturan dalam perencanaan usaha mikro yang berdasarkan kemampuan, keahlian dan ketertarikan dari penerima manfaat.

BAB 5

MEKANISME PELAKSANAAN DAN MONITORING

5.1. Mekanisme Pelaksanaan

Terdapat tiga mekanisme pelaksanaan dalam pendekatan program:

a. **Mekanisme Penentuan Kelompok Sasaran**

Langkah ini akan menggunakan data dan proses yang sama dengan program perumahan dan pemukiman. Data penduduk di lokasi dampak, kegiatan ekonomi sebelum dan sesudah bencana, serta kelayakan usaha diperoleh dari Pemetaan Swadaya yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan difasilitasi oleh CBO. CBO juga akan memfasilitasi adanya pertemuan masyarakat untuk menyepakati kriteria kelompok sasaran

b. *Mekanisme Pengajuan dan Pelulusan*

Untuk skema bantuan, setiap KK yang terdaftar sebagai penduduk di lokasi dampak (hasil pemetaan swadaya) dapat mengajukan permintaan bantuan. Untuk pelulusannya, CBO akan melakukan verifikasi terhadap daftar penerima bantuan.

Untuk skema pinjaman, syarat pengajuannya adalah:

- 1) Membentuk kelompok yang memiliki niat sama yaitu membangun usaha
- 2) Membuat proposal sederhana bersama didampingi fasilitator.
- 3) Mengajukan ke CBO untuk penentuan prioritas pendanaan

Sedangkan untuk mekanisme pelulusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Verifikasi awal (administrasi, karakter calon, keabsahan data) oleh CBO berdasarkan hasil pemetaan swadaya kemudian hasilnya dikirim ke DMC
- 2) Verifikasi akhir/teknis (peluang usaha, kelayakan usaha) dan keuangan oleh DMC dari yang telah lulus verifikasi awal, hasilnya dikirim ke PJOK

c. **Mekanisme Aliran Dana**

Untuk skema bantuan (diagram 1), CBO menyusun data lengkap dari setiap kepala keluarga yang berhak menerima. Daftar diajukan kepada kepada District Management Consultant. CBO & DMC untuk verifikasi terhadap data penerima bantuan dan menyerahkan data tersebut kepada PJOK. PJOK mengajukan hasil verifikasi tersebut kepada KPKN (atau Bank yang ditunjuk), selanjutnya KPKN/Bank yang ditunjuk mengeluarkan surat perintah pembayaran kepada BI. Bank setempat kemudian melakukan transfer ke rekening setiap KK/individu. Rekening ini adalah rekening yang sama yang dibuat oleh Bank untuk program housing bagi masing-masing individu.

Untuk skema Mikro Kredit, mekanisme aliran dananya adalah sebagai berikut (diagram 2): setiap kelompok mengajukan proposal, selanjutnya proposal diverifikasi oleh fasilitator dan CBO. Verifikasi akhir dilakukan District Management Consultant untuk diserahkan kepada PJOK. Selanjutnya PJOK memasukkan proposal kepada bank setempat. CBO membuka rekening di Bank Setempat ditandatangani minimal oleh 3

orang anggota CBO. CBO mencairkan dana sesuai usulan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Bila tidak ada rekening KSM dana pinjaman dapat saja langsung diserahkan CBO kepada Kelompok.

d. Langkah Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Masyarakat melalui Usaha Mikro

1. Pemerintah menentukan alokasi hibah perkelurahan/desa (Rp 100 - Rp 200 juta)/CBO untuk modal awal dana bergulir yang dicairkan dalam dua termin yakni 40% dan 60%.
2. Masyarakat dan fasilitator melalui proses Pemetaan Swadaya melakukan beberapa langkah pengumpulan informasi yaitu:
 - a. Membuat daftar penduduk yang bergerak di bidang sector produktif seperti pertanian dan perikanan, usaha kecil (termasuk usaha perorangan) & daftar pekerja di sektor informal.
 - b. Melakukan identifikasi dan verifikasi usaha perorangan dan usaha kecil serta perkerjanya, dimana assetnya hancur atau sebagian hancur akibat bencana.
 - c. Melakukan survey dan pengidentifikasian kerugian ekonomi (assets, kesempatan bekerja) untuk menentukan jenis pendampingan.
3. Mempersiapkan daftar penerima bantuan dari setiap kategori yang akan menerima pinjaman mikro kredit untuk peningkatan penghasilan.
4. Penerima bantuan membentuk kelompok swadaya masyarakat berbasis kesamaan kebutuhan.
5. Setiap kelompok mendefinisikan aturan main, termasuk mekanisme pengembalian, kegiatan kelompok, tabungan kelompok, dll
6. Pengajuan proposal dari setiap kelompok yang merupakan jenis aktivitas yang diajukan oleh setiap anggota
7. Verifikasi proposal oleh fasilitator dan CBO.
8. Penandatanganan surat pernyataan dari setiap KSM
9. Pengecekan Akhir oleh District Management Consultant dan PJOK
10. PJOK menyerah dokumen SPP (surat Permintaan Pembayaran) kepada KPKN setempat
11. Bank setempat membuka rekening untuk CBO, yang ditandatangani minimal oleh 3 orang anggota.
12. Pemerintah pusat mencairkan termin pertama (40%) dana kepada rekening CBO sebagai hibah untum digunakan sebagai modal awal dana bergulir.
13. Dana di transfer kepada rekening CBO.
14. Kelompok menarik dana
15. Anggota kelompok memulai kegiatan ekonomi produktif
16. Progress setiap dua bulan oleh masyarakat dan fasilitator
17. Berdasarkan verifikasi, kelompok mengajukan termin selanjutnya
18. Kelpomok melakukan pembayaran kembali kepada CBO untuk digulirkan bagi yang lain.
19. Bila kinerja CBO bagus untuk 40% dan, maka termin berikutnya akan diluncurkan sebesar 60% dari dana alokasi hibah per desa/kelurahan.

5.2. Monitoring dan Evaluasi

a. Prinsip Monitoring dan Evaluasi

Strategi dan kebijakan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, khusus rencana ekonomi dan ketenagakerjaan memerlukan penjabaran lebih lanjut kedalam program dan kegiatan yang dilakukan. Program-program yang dirancang secara khusus ini selanjutnya dirinci kedalam rencana tindak dan indikator guna memudahkan pencapaian sasaran. Rincian ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam melakukan monitoring program-program pengembangan ekonomi dan ketenagakerjaan yang dibiayai, baik melalui APBN, APBD, dan sumber pendanaan lainnya.

Untuk mengurangi pengangguran pasca bencana upaya pemulihan ekonomi di lokasi bencana harus dapat melibatkan masyarakat/penduduk setempat yang kehilangan pekerjaan. Program pengembangan ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi diantaranya sektor pertanian/perikanan, industri, perdagangan, perhubungan dan jasa. Penyusunan program dimaksudkan untuk menajamkan peran instansi di dalam mengoptimalkan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam membangun kembali perekonomian di wilayah yang terkena bencana, dalam rangka menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja.

Kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi penting untuk melihat seberapa jauh sasaran pembangunan prasarana ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja dapat diserap melalui program-program pembangunan pasca bencana. Dalam jangka panjang kegiatan evaluasi juga dimaksudkan untuk menilai apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan upaya pemulihan yang direncanakan.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan dengan harapan agar pelaksanaan program tahun berikutnya lebih terarah sesuai target sasaran yang telah ditentukan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sebagai stakeholders. Dengan demikian kegiatan monitoring dan evaluasi dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar serta menyusun standar prosedur operasional (SOP).

Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan berdasarkan:

- 1) system dan mekanisme yang telah ada
- 2) keberhasilan program berdasarkan indicator kemajuan dan keluaran yang telah ditetapkan
- 3) adanya penerbitan berkala
- 4) laporan tahunan berkala
- 5) review program

Pedoman pelaksanaan monev disusun dengan memperhatikan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam perencanaan. Oleh karena itu dipandang perlu melakukan koordinasi antara provinsi dan pusat untuk memantau program-program yang dilaksanakan. Demikian halnya kabupaten/kota mengadakan koordinasi dengan provinsi dalam pelaksanaan monev, agar hasil yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan/kepentingan dalam pengembangan program lanjut.

b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara *internal* dan *eksternal*.

1) Internal:

Monitoring internal dilakukan secara berkala maupun insidentil pada berbagai lapisan administratif struktural, baik di tingkat pusat maupun daerah. Apabila ditemui permasalahan, dengan segera dapat diambil tindakan melalui jalur struktural dan dilakukan secara berjenjang. Hal ini penting dilakukan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran.

Disamping monitoring, dilaksanakan pula pelaporan internal yang dilakukan secara berjenjang melalui jalur struktural pada masing-masing tingkat, yang dikoordinasi oleh Tim Koordinasi Pusat maupun Daerah.

2) Eksternal:

Monitoring dan evaluasi eksternal dilakukan secara periodik dan berjenjang melalui jalur fungsional dan dilakukan secara independent yang dilaksanakan oleh satu Tim lepas. Tim ini diperbantukan di masing-masing lapisan administratif struktural dan melaporkan langsung ke Pusat/Propivinsi. Tugas tim independent adalah membantu Tim Koordinasi Pusat.

Mekanisme kerja tim bertugas mendampingi Aparatur Tingkat I dan II, dalam memantau proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian program di seluruh kabupaten/kota dimana program-program dilaksanakan.

BAB 6

ISU LINTAS BIDANG

6.1 Bantuan Pemulihan Aset Non Publik (Harta Milik Pribadi)

Berkaitan dengan bencana di Propinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah bermaksud untuk memberikan bantuan kepada masyarakat agar dapat memulai kegiatan ekonominya. Kesulitan untuk menjalankan kegiatan ekonomi merupakan permasalahan yang harus secepatnya dipecahkan. Salah satu upaya adalah memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memulihkan asetnya. Bantuan pemulihan aset masyarakat dibagi menjadi tiga:

1. Bantuan penggantian tanah

Bantuan penggantian tanah hanya akan diberikan kepada mereka yang tanahnya tidak dapat digunakan sebagai tempat tinggal akibat bencana. Tanah tidak dapat digunakan sebagai tempat tinggal yang disebabkan oleh musnahnya tanah karena tenggelam atau oleh karena secara teknis tidak layak untuk ditempati. Seperti diketahui tidak ada keharusan untuk relokasi tempat tinggal. Dengan demikian keputusan untuk tinggal di lokasi yang lama atau pindah ke lokasi yang baru diputuskan sepenuhnya oleh masyarakat. Bagi lokasi yang tidak dapat digunakan lagi karena musnah, hilang, atau tenggelam karena tergerus oleh air pemerintah merencanakan untuk memberikan bantuan tanah seluas 200 m² dengan rumah inti di atasnya seluas 36 m² per keluarga di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Hubungan perdata dengan tanah yang musnah tersebut tidak mengalami perubahan. Sedangkan bagi mereka yang memilih pindah ke tempat baru karena tanahnya secara teknis tidak dapat digunakan pemerintah membantu dengan memberikan bantuan tanah seluas 200 m² dengan rumah inti di atasnya seluas 36 m² per keluarga di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Tanah yang dahulu dimiliki menjadi milik pemerintah tanpa diberikan penggantian.

Bila terjadi perubahan peruntukan tanah karena alasan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti pembuatan jalur penyelamatan, penggantian kepada masyarakat menggunakan mekanisme ganti rugi biasa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Bantuan perumahan

Untuk membantu meringankan beban korban bencana alam gempa bumi dan tsunami di Propinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara pemerintah menyediakan rumah inti (core house) seluas 36 m² perkeluarga. Pemerintah merencanakan untuk memberikan sumbangan setara tipe rumah 36 yaitu Rp. 28 juta untuk rumah yang rusak seluruhnya dan Rp. 10 juta bagi rumah yang mengalami rusak ringan dan menengah. Bantuan rumah inti tersebut dapat dibangun di lokasi rumah sebelum bencana alam gempa bumi dan tsunami terjadi atau pada lokasi-lokasi *resettlement* yang disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat yang menghendaki *resettlement*.

Untuk memberikan kemudahan dalam memilih desain, memperbaiki, dan membangun rumah maka pemerintah akan memberikan informasi mengenai beberapa alternatif desain

rumah tahan gempa (*informed choice*), bantuan teknis (supervisi) dalam pembangunan rumah, dan pelatihan keterampilan pertukangan (batu dan kayu) kepada masyarakat.

3. Bantuan pemulihan sarana produktif masyarakat

Bantuan pemulihan asset produktif masyarakat untuk memulai kembali kegiatan usaha ekonomi dilakukan melalui tiga jalur. **Pertama**, adalah hibah modal berupa peralatan usaha sederhana kepada pengusaha mikro yang penggunaannya bersifat perorangan dengan nilai hibah sebesar Rp. 2 juta. Bantuan ini diberikan langsung kepada masyarakat untuk membantu mereka dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Pemberian bantuan langsung ini akan dilaksanakan melalui pendekatan berbasis masyarakat (*community based approach*).

Kedua, adalah bantuan kepada kelompok masyarakat yang besarnya antara Rp. 5 juta sampai Rp. 15 juta. Bantuan hibah ini diberikan kepada kelompok dengan jumlah anggota 4-6 orang untuk pengadaan sarana produksi/peralatan yang mempunyai nilai modal lebih besar dari jenis bantuan yang pertama. Pada dasarnya kepemilikan sarana produksi dapat merupakan milik pribadi, namun sebagai upaya awal untuk menggerakkan kegiatan usaha, pengadaan barang sebagai sarana produksi melalui skim ini diberikan sebagai kepemilikan atau penggunaan bersama diantara anggota kelompok (*common facilities*). Bantuan ini dapat digunakan sebagai dana hibah padanan (*matching grant fund*) bila kelompok membutuhkan sarana produksi yang bernilai lebih besar dari Rp. 15 juta. Kekurangan dari kebutuhan dana yang diperlukan dapat diperoleh melalui mekanisme perbankan. Untuk itu akan diberikan kemudahan dalam bentuk perpanjangan waktu tenggang (*grace period*) yang lebih lama serta kemudahan dalam persyaratan kredit. Untuk menghindari *moral hazards* tidak disarankan untuk memberikan subsidi bunga. Mekanisme pemberian hibah dalam skim ini juga melalui pendekatan berbasis masyarakat yang pelaksanaannya melalui BKM.

Ketiga, adalah memberikan kemudahan pemberian kredit perbankan bagi perusahaan kecil, menengah dan besar. Kemudahan yang diberikan adalah dalam bentuk perpanjangan waktu tenggang (*grace period*) serta kemudahan dalam persyaratan kredit dan tidak diberikan subsidi bunga.

Pendekatan berbasis masyarakat membutuhkan dibentuknya badan keswadayaan masyarakat (BKM) yang berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan dan penggerakan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan dan pengendalian dalam pengelolaan bantuan tersebut. Pembentukan BKM ini sebaiknya menggunakan dasar administrasi kewilayahan sebelum terjadi bencana. Langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan mengelompokkan kembali para korban bencana berdasarkan desa tempat tinggal sebelum bencana. Pembentukan BKM ini membutuhkan fasilitator yang harus diberikan pelatihan sebelumnya. Dengan adanya BKM ini maka keputusan mengenai siapa yang akan mendapat bantuan, dalam bentuk apa, serta dimana mereka tinggal, dapat dilakukan pada tingkat masyarakat.

Bantuan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat ini diberikan kepada perorangan dan usaha mikro yang dikelompokkan ke dalam 3 kegiatan yaitu kegiatan ekonomi, investasi prasarana umum, serta sosial.

Tabel 6.1
Perkiraan Kebutuhan Pendanaan Untuk Program Bantuan
Pemulihan Aset Masyarakat
(Dalam Miliar Rupiah)

I.	Perumahan dan Prasarana Dasar		
	NAD		
	Rusak Keseluruhan 77.903 @ Rp. 28,8 juta.	Rp.	2.244
	Rehabilitasi 119.072 @ Rp. 10 juta.	Rp.	1.191
	Nias:		
	Rusak Keseluruhan 12.255 @ Rp. 28.8 juta	Rp.	353
	Rehabilitasi 36.766 @ Rp. 10 juta	Rp.	368

	Jumlah	Rp.	4.156
II.	Tanah	Rp.	-----
	(Masih Dalam Perhitungan)		
III.	Bantuan Pemulihan Aset Produktif		
	(NAD dan Nias)		
	a. Bantuan Bagi Rumah Tangga		
	160.000 Rumah Tangga @ Rp. 2 juta	Rp.	320
	b. Bantuan kelompok		
	4415 Kelompok @ Rp. 200 juta	Rp.	883
IV.	Biaya Membangun Kelembagaan Masyarakat	Rp.	435
	Untuk melaksanakan bantuan Rumah, Tanah,		
	Dan Sarana Produktif		
	Pelatihan Fasilitator		
	Pembentukan Kelompok		
	Survei		
	Pengembangan sistem		

		Rp	1.638

	Jumlah Keseluruhan	Rp.	5.794

Tabel 6.2
Kebutuhan Dana Untuk Memperbaiki Sasaran Pelayanan Masyarakat
(Rp. Miliar)

Sektor Produksi/ Ekonomi	2005	2006	2007 *)	2008	2009	JUMLAH
Perikanan	454,35	294,60	56,60	34,30	31,00	870,85
Pertanian dan Pangan	75,50	300,07	116,57	0	0	492,14
Industri	20,62	N/A	N/A	N/A	N/A	20,62
Perdagangan	20,50	N/A	N/A	N/A	N/A	20,50
Tenaga Kerja	8,50	8,50	0	0	0	17,00
UKM & Koperasi	16,20	13,50	43,55	0	0	73,25
Pariwisata	4,75	N/A	N/A	N/A	N/A	4,75
JUMLAH	600,43	616,67	216,72	34,30	31,00	1.499,12

Keterangan:
*) Untuk Pertanian & Pangan dan UKM & Koperasi Merupakan Kebutuhan Tahun 2007-2009.
Data diperoleh dari kementerian terkait

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

I. INVENTARISASI KERUSAKAN DAN KERUGIAN

Perkiraan kerusakan dan kerugian yang dialami dapat dilihat dari laporan masing-masing sektor terkait. Berikut ini adalah inventarisasi kerusakan dan kerugian yang telah dilakukan oleh sektor terkait.

1.1 Prakiraan Nilai Kerusakan dan Kerugian di Sektor KELAUTAN DAN PERIKANAN

Berdasarkan informasi dari Tim Pemantau dan SATGAS Departemen Kelautan dan Perikanan yang berangkat ke lapangan sejak tanggal 28 Desember 2004, diketahui banyaknya aset ekonomi bidang kelautan dan perikanan yang rusak parah, antara lain Pelabuhan Perikanan Pantai Lampulo, Loka Budidaya Air Payau Ujung Batee, Stasiun Karantina Ikan Sultan Iskandar Muda, Sekolah Menengah Usaha Perikanan (SUPM) Ladong, Balai Benih Ikan, tambak udang rakyat, saluran tambak, kapal penangkap ikan, dan permukiman nelayan di beberapa lokasi. Di samping itu, diketahui terdapat banyak pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan keluarga yang menjadi korban atau hilang (Tabel L.2.1).

Tabel L.2.1.
Jumlah Korban yang Meninggal dan Hilang

No.	Rincian	PNS	Istri	Anak	Jumlah (jiwa)
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NAD	36	32	66	134
2	UPT Loka Budidaya Ujung Batee	9	6	16	31
3	UPT SUPM Ladong	3	3	9	15
4	UPT Stasiun Karantina Ikan Sultan Iskandar Muda	1	-	-	1
5	Nelayan <ul style="list-style-type: none">NADSumut	14.396 14.161 235
6	Petambak <ul style="list-style-type: none">NADSumut	920 920 -
	Jumlah				15.497

Tabel L.2.2
Prakiraan Nilai Kerusakan Sektor Kelautan dan Perikanan

No.	Rincian	Nilai Assets (Rp. Juta)	Nilai Kerusakan (Rp. Juta)
Nanggroe Aceh Darussalam 1.200.694		2.902.879	
1	Pangkalan Pendaratan Ikan	189.064	144.800
2	Armada Penangkapan Ikan	495.778	286.220
3	Alat tangkap	246.135	161.953
3	Perikanan Budidaya Air Payau	1.909.200	586.314
4	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dep. KP	62.702	21.407
	- SUPM Ladong		5.205
	- Stasiun Karantina Ikan		2.088
	- Loka Budidaya Ujung Batee		14.114
Sumatera Utara			
1	Pangkalan Pendaratan Ikan	2.500	2.500
2	Armada Penangkapan Ikan		
3	Alat tangkap		
	Jumlah		

Disamping prakiraan nilai kerusakan (*damage estimate*), dilakukan prakiraan nilai kerugian usaha (*loss estimate*) akibat gagal produksi. Prakiraan didasarkan pada tingkat produksi yang berjalan selama tahun-tahun terakhir. Untuk perikanan tangkap digunakan nilai produksi tahun 2003 dan untuk perikanan budidaya tambak digunakan data produksi tambak usaha tradisional yakni 500 kg/ha/tahun. **Prakiraan nilai kerugian usaha** secara keseluruhan diperhitungkan sebesar **Rp. 2,8 triliun**, yang terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar Rp. 0,6 triliun, produksi perikanan budidaya sebesar Rp. 1,6 triliun, dan usaha perikanan lainnya seperti hatchery, pengumpulan induk, pabrik es, dll sebesar Rp. 0,6 triliun.

Tabel L.2.3
Jumlah Korban yang Meninggal dan Hilang (KELAUTAN DAN PERIKANAN)

No.	Rincian	PNS	Istri	Anak	Jumlah (jiwa)
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NAD	36	32	66	134
2	UPT Loka Budidaya Ujung Batee	9	6	16	31
3	UPT SUPM Ladong	3	3	9	15
4	UPT Stasiun Karantina Ikan Sultan Iskandar Muda	1	-	-	1
5	Nelayan <ul style="list-style-type: none"> NAD Sumut 	14.396 14.161 235
6	Petambak <ul style="list-style-type: none"> NAD Sumut 	920 920 -
	Jumlah				15.497

Tabel L.2.4
Perkiraan Nilai Aset Kelautan dan Perikanan

No.	Rincian	Volume	Nilai Aset (Rp juta)
Nanggroe Aceh Darussalam 2.902.879			
1	Pelabuhan Perikanan/ Pangkalan Pendaratan Ikan		189.064
	a. Tipe C (PPP)	2 unit	17.816
	b. Tipe D (PPI-APBN)	12 unit	66.098
	c. Tipe D (PPI-APBD)	37 unit	92.500
	d. Masyarakat	253 unit	12.650
2	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat : <ul style="list-style-type: none"> Loka Budidaya Ujung Batee SUPM Ladong Stasiun Karantina Ikan Sultan Iskandar Muda 		62.702
3	Budidaya Air Payau <ul style="list-style-type: none"> Tambak Hatchery udang 	36.597 ha 17 unit	1.909.200
4	Armada Penangkapan Ikan	21.455 buah	495.778
5	Alat Penangkap Ikan	16.012 unit	246.135
Sumatera Utara			
1	Pelabuhan Perikanan/ Pangkalan Pendaratan Ikan		2.500
	Tipe D (PPI-APBD)	1 unit	2.500
2	Armada Penangkapan Ikan		
3	Alat Penangkap Ikan		
	Jumlah		

Tabel L.2.5
Asumsi Persentase Kerusakan Sektor Kelautan dan Perikanan
NAD dan Sumut

No.	Kabupaten	Prasarana Perikanan Tangkap	Prasarana Perikanan Budidaya	Alat Tangkap
Nanggroe Aceh Darussalam				
1	Simeulue	90 %	100 %	20 %
2	Aceh Singkil	---	30 %	---
3	Aceh Selatan	---	30 %	50 %
4	Aceh Barat Daya	---	30 %	50 %
5	Aceh Tamiang	---	10 %	---
6	Aceh Timur	---	30 %	---
7	Nagan Raya	---	30 %	50 %
8	Aceh Barat	100 %	100 %	100 %
9	Aceh Jaya	80 %	100 %	80 %
10	Aceh Besar	100 %	100 %	100 %
11	Pidie	100 %	50 %	100 %
12	Aceh Utara	100 %	40 %	100 %
13	Bireun	50 %	50 %	100 %
14	Banda Aceh	100 %	100 %	100 %
15	Sabang	---	100 %	50 %
16	Lhok Seumawe	100 %	40 %	75 %
17	Langsa	5 %	10 %	---
Sumatera Utara				
1	Nias	90 %	90 %	90 %

Sumber : Berdasarkan masukan Tim Satgas DKP, staf UPT Pusat di Banda Aceh, staf Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi serta Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten yang dapat dipantau.

1.2. Prakiraan Nilai Kerusakan dan Kerugian di Sektor PERTANIAN DAN PANGAN

1) Kerusakan sarana publik

Dari 1.457 orang pegawai dalam lingkup pertanian, sebanyak 93 orang meninggal, 11 orang cidera, 157 orang belum diketahui, dan 371 orang kehilangan rumah/tempat tinggal. Dinas yang paling banyak kehilangan pegawainya karena meninggal dan belum diketahui adalah Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan, yaitu masing-masing 21 orang dan 30 orang.

Jumlah pegawai yang kehilangan rumah paling banyak terjadi pada Dinas Perkebunan dan Peternakan, yaitu masing-masing 111 orang dan 100 orang (**Tabel L.2.7**). Selain itu, beberapa pegawai di Dinas-dinas tersebut mengalami kehilangan anggota keluarganya. Seperti Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar kehilangan sebanyak 30 orang, dan keluarga dari para pegawai BPTPH sebanyak 45 orang.

Tabel L.2.6
Kondisi dan Tingkat Kerusakan Gedung Kantor

InstansiI	Kondisi Gedung	Kondisi Sarana Kerja			
		Furniture	Pengolah Data	Peralatan Lab	Telekomuni kasi
Dinas Perkebunan	Gedung kantor dinas utuh Kantor kimbun rusak total Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Utuh	Utuh Rusak total Utuh	Sebagian rusak Rusak total Utuh	- - Utuh	Utuh Rusak Total Utuh
Dinas Pertanian	Kantor utuh	Sebagian utuh	Rusak	-	Utuh
Dinas Peternakan	Kantor rusak total Lab rusak ringan	Rusak total Sebagian utuh	Rusak total Rusak total	Rusak total Sebagian rusak	Rusak Total Rusak total
BPTP	Kantor utuh Gues house utuh	Sebagian utuh Utuh	Sebagian utuh -	Sebagian rusak -	Utuh
Karantina	Karantina di pelabuhan laut rusak total Karantina di pelabuhan udara utuh	Rusak total	Rusak total	-	Rusak total
		Utuh	Utuh	-	Utuh
Badan Ketahanan Pangan	Kantor rusak total	Rusak total	Rusak total	-	Rusak total
Badan Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH)	Kantor rusak total	Rusak total	Rusak total	-	Rusak total
Balai Pengujian dan Sertifikasi Benih (BPSB)	Kantor utuh	Sebagian utuh	Sebagian utuh	Sebagian rusak	Utuh

Sumber: Tim Penanggulangan Bencana Nasional Departemen Pertanian

Tabel L.2.7
Kondisi Pegawai Instansi Lingkup Pertanian di Propinsi NAD

No.	Instansi	Jumlah Pegawai	Kondisi Pegawai			
			Meninggal	Cidera	Belum Diketahui	Kehilangan Rumah
1	Dinas Perkebunan	495	5	7	54	111
2	Dinas Pertanian	178	21	2	32	49
3	Dinas Peternakan	160	30	-	-	100
4	BPTP	80	5	-	-	-
5	Karantina	52	3	1	7	12
6	Badan Ketahanan Pangan	103	4	1	9	28
7	Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH)	134	9	-	33	19
8	Balai Pengujian dan Sertifikasi Benih (BPSB)	124	7	-	18	17
9	Diklat	131	9	-	4	35
	Jumlah	1,457	93	11	157	371

Sumber : Tim Penanggulangan Bencana Nasional Departemen Pertanian

Hasil *assessment* sementara menunjukkan bahwa gedung/kantor dan saran kerja lingkup instansi pertanian di Banda Aceh yang mengalami rusak berat dan perlu rehabilitasi total atau pembangunan kembali sebanyak 5 buah, yang terdiri dari : (i) kantor Kimbun Dinas Perkebunan, (ii) Kantor Dinas Peternakan, (iii) Balai Karantina Tumbuhan dan Hewan di pelabuhan laut, (iv) kantor Badan Ketahanan Pangan, dan (v) Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Selain bangunan gedung yang rusak, juga sarana penting untuk menunjang fungsi pelayanan kantor tersebut mengalami kerusakan seperti sarana furniture, pengolahan data, peralatan laboratorium dan telekomunikasi. Selanjutnya gedung/kantor yang mengalami kerusakan ringan meliputi kantor Dinas Pertanian Propinsi, dan kantor Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) beserta perumahannya (**Tabel L.2.8**). Sedangkan untuk kantor Dinas Pertanian di kabupaten Meulaboh Aceh Barat diduga kuat mengalami kerusakan total.

Pada tahap transisi ini untuk membantu pemulihan fungsi pelayanan pemerintah dalam bidang pangan dan pertanian akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : (i) perbaikan prasarana dan sarana kerja pemerintah; (ii) pendampingan, rekrutmen atau mobilisasi pegawai, (iii) rehabilitasi pembangunan kantor yang mengalami rusak total; (iv) melanjutkan penyaluran beras bgi pengungsi apabila masih ada; (v) rehabilitasi lahan pertanian yang rusak dengan didukung rehabilitasi prasarana pendukung seperti saluran irigasi dan jalan usahatani, serta penyediaan sarana pertanian; dan (vi) bantuan modal usahatani seperti benih/bibit dan sarana produksi lainnya, serta bantuan modal untuk usaha pengolahan hasil pertanian seperti penggilingan padi.

Tabel L.2.8
Kondisi Gedung dan Sarana Kerja Instansi Lingkup Departemen Pertanian di
Propinsi NAD

No .	Instansi	Kondisi	Kondisi Sarana Kerja			
			Furniture	Pengolah data	Peralatan lab	Telekomun i-kasi
1	Dinas Perkebunan	Kantor Dinas utuh	Utuh	Sebagian Rusak	-	Utuh
		Kantor Kimbun Rusak total	Rusak total	Rusak total	-	Rusak Total
		Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Utuh	utuh	Utuh	utuh	utuh
2	Dinas Pertanian	Kantor utuh	Sebagian utuh	Rusak	-	Utuh
3	Dinas Peternakan	Kantor rusak total	Rusak total	Rusak total	rusak total	Rusak total
		Lab rusak ringan	Sebagian utuh	Rusak total	Sebagian rusak	Rusak total
4	BPTP	Kantor utuh	Sebagian utuh	sebagian utuh	Sebagian rusak	utuh
		Gues house utuh	utuh	-	-	
5	Karantina	Karantina di Pelabuhan laut rusak total	Rusak total	Rusak total	-	Rusak total
		Karantina di pelabuhan Udara utuh	Utuh	utuh	-	utuh
6	Badan Ketahanan Pangan	Kantor rusak total	rusak total	Rusak total	-	Rusak total
7	Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH)	Kantor rusak total	Rusak total	Rusak total	-	Rusak total
8	Balai Pengujian dan Sertifikasi Benih (BPSB)	Kantor utuh	Sebagai utuh	Sebagian utuh	Sebagian rusak	utuh

Sumber : Tim Penanggulangan Bencana Nasional Departemen Pertanian

2) Kerusakan Di Tingkat Masyarakat

Tingkat kerusakan lahan secara rinci adalah sebagai berikut lahan sawah 20.206 ha, dan lahan tegalan 31.265 ha. Di areal tersebut terdapat tanaman pangan dan hortikultura yang diusahakan oleh petani setempat. Jaringan irigasi tersier dan kwarter yang mengalami kerusakan di 31 kecamatan (13 kabupaten) dengan areal irigasi 29.571 ha. Kerusakan tanaman perkebunan rakyat seluas 37.558 ha , dan temak yang hilang/mati diperkirakan sebagai berikut, temak sapi/kerbau 78.189 ekor, domba/kambing 66.323 ekor, dan unggas 1.742.748 ekor. Disamping itu juga berbagai peralatan seperti hand traktor, pompa air, traktor besar, alat pengolah nilam, karet, minyak kelapa, pengolah dendeng dan lainnya ikut rusak (Tabel L.2.9).

Tabel L.2.9
Kondisi Lahan Pertanian, Kebun dan Ternak di Propinsi NAD

No.	Instansi	Kerusakan Lahan Pertanian (Ha)			Ternak Hilang (ekor)
		Sawah	Kebun (pohon)	Ladang	
1	Sabang		4,147		32,061
2	Banda Aceh	75		50	332,505
3	Aceh Besar	5,611	7,048	9,465	500,000
4	Pidis	1,859	11,304	3,072	238,301
5	Bireun	2,118	9,575	567	153,961
6	Aceh Utara	1,224		612	74,460
7	Kota Lhokseumawe				27,292
8	Aceh Timur	2,119			
14	Aceh Barat	1,432	14,950	1,114	251,962
15	Nagan Raya	757	14,895	1,560	137,765
16	Aceh Jaya	1,645	12,240	3,068	156,280
17	Simelue	3,410	14,937	79	
18	Aceh Selatan		9,636		
19	Aceh Barat Daya	3,080	3,729	4,758	
20	Aceh Singkil				
	Jumlah	23,330	102,461	24,345	1,904,587

Sumber : Tim Penanggulangan Bencana Nasional Departemen Pertanian

Kerusakan lahan usaha tani tersebut juga meliputi kerusakan antara lain jaringan irigasi, bangunan irigasi, jaringan saluran di tingkat usaha tani, jalan usaha tani, pematang (sawah), terasering (lahan kering), serta bangunan petakan lahan usaha tani.

Lahan perkebunan yang mengalami kerusakan diperkirakan mencapai 37,6 ribu Ha (Departemen Pertanian) yang meliputi lahan perkebunan karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, cengkeh, pala, pinang, coklat, nilam, dan jahe. Lahan perkebunan yang paling luas mengalami kerusakan adalah tanaman kelapa. Sedangkan berdasarkan wilayah, lahan

perkebunan yang paling banyak mengalami kerusakan berada di wilayah kabupaten Aceh Barat, Simeulue, Nagan Raya, dan Aceh Jaya.

1.3. Prakiraan Nilai Kerusakan dan Kerugian di Sektor PERDAGANGAN

Terjadi kerusakan berat pada Kantor Dinas INDAG NAD, Metrologi, BPSMB, SMTI dan Baristand INDAG, sehingga diperlukan bantuan dalam rangka membangun sarana dan prasarana kantor. Dari 271 pegawai dilingkungan Dinas INDAG tersebut di atas, pertanggal 10 Januari 2005 baru dapat diketahui 72 pegawai meninggal/hilang. Hasil kunjungan ke SATKORLAK, Pemda NAD serta lokasi pasar dapat diperoleh informasi tentang kerusakan sarana-sarana perdagangan.

Depdag telah mengusulkan kepada Depkeu untuk menggunakan Sisa Anggaran Pembangunan (SIAP) Ditjen PDN tahun 2005 sebesar Rp 10,2 milyar untuk digunakan untuk mengadakan kantor perbantuan Depdag di NAD, membantu pembangunan kembali sarana dan prasarana kerja serta pendidikan SDM dibidang Kemetrologian.

Depdag telah membuat perencanaan untuk mengadakan Kantor Perwakilan Depdag di Banda Aceh selama 1 tahun yang berfungsi untuk membantu pengoperasian tugas-tugas terkait sektor perdagangan serta melakukan identifikasi kebutuhan pembangunan pasar darurat maupun pasar permanen di wilayah NAD.

1.4 Prakiraan Nilai Kerusakan dan Kerugian di Sektor PERINDUSTRIAN

A. Damaged Assessment

Penilaian terhadap kehilangan yang bersifat fisik, yaitu 2.328 unit perusahaan swasta dan 4 perusahaan milik negara/BUMN

Kerusakan industri di Propinsi NAD adalah :

Milik Swasta :

1. Industri binaan Ditjen IDKM, mencakup 20 kabupaten/kota, dengan kerugian sebesar Rp. 45,57 milyar diluar tanah dan bangunan yang dimiliki para IKM, perincian perkiraan kerugian
2. Industri binaan Ditjen IKAH, yang mengalami kerusakan sebanyak 20 perusahaan dengan kerugian sebesar Rp. 23,754 milyar, perincian perkiraan kerugian

Milik Pemerintah/BUMN :

1. Industri binaan Ditjen IKAH
 - PT. Semen Andalas dengan perkiraan kerugian sebesar US\$ 200 juta
 - PT. Pupuk Iskandar Muda dengan perkiraan kerugian sebesar Rp. 1,096 milyar dan US \$ 0,8 juta
 - PT. ASEAN Aceh Fertilizer dengan perkiraan kerugian sebesar Rp. 50 juta. (rincian selengkapnya lihat lampiran 2)
2. Industri binaan Ditjen ILMEA, yang mengalami kerusakan adalah PT. Dok Kodja Bahari cabang Sabang, dengan perkiraan kerugian sebesar Rp. 4 milyar.
3. Baristand dan SMTI serta rumah dinas mengalami kerusakan berat dengan total kerugian sebesar Rp. 3,098 milyar.

B. Loss Assessment

Penilaian terhadap kehilangan jiwa, kesempatan, IKM yang mengalami kerugian pendapatan sebesar Rp. 22,5 milyar dengan kerusakan rata-rata 65.

C. Potential Assessment

Penilaian terhadap asset dan kesempatan yang masih berpotensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan (belum ada data).

D. Need Assesment

Penilaian terhadap kebutuhan yang diperlukan untuk membangun kembali NAD, sebagai berikut :

- 1. Perkiraan biaya rekonstruksi untuk industri binaan Ditjen IDKM sebesar Rp. 45,57 milyar untuk investasi dan Rp. 15,82 milyar untuk modal kerja.
- 2. Perkiraan biaya rekonstruksi industri binaan Ditjen ILMEA sebesar Rp. 4 milyar
- 3. Perkiraan biaya rekonstruksi industri binaan Ditjen IKAH sebesar Rp. 24,9 milyar dan US\$ 200,8 juta
- 4. Perkiraan biaya rekonstruksi untuk Baristand dan SMTI sebesar Rp. 3,098 milyar

1.5. Prakiraan Nilai Kerusakan dan Kerugian di Sektor PERBANKAN

Dampak paling parah akibat bencana tsunami terjadi pada tiga lokasi, yaitu: Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Barat (Meulaboh). Total kredit yang disalurkan pada ketiga daerah tersebut mencapai hampir 50% dari total kredit di seluruh Aceh. Sebagian kredit yang disalurkan lebih digunakan untuk retail dan konsumsi, termasuk kredit usaha kecil (KUK). Meskipun demikian, kredit untuk sektor manufaktur mencapai hampir 80% dari keseluruhan total kredit di kabupaten Aceh Besar.

Tabel L.2.10
Kredit Perbankan Berdasarkan Sektor di Propinsi NAD

Kredit Perbankan Berdasarkan Sektor di Propinsi NAD						
Penyaluran Kredit per Sektor	Seluruh Aceh		Kota Terkena Dampak Paling Parah			
	% PDRB	% total kredit	Kota Banda Aceh	Kab Aceh Barat	kab Aceh Besar	Kab Simeulue
Pertanian	28.1	9.0	0.7	9.0	5.0	0.2
Pertambangan	19.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Manufaktur (Industri)	19.7	40.0	21.8	2.0	79.0	1.0
Listrik, gas dan air bersih	0.3	1.0	4.2	0.0	0.0	0.0
Konstruksi	4.3	4.0	11.1	4.0	1.0	10.0
Perdag, restaurant dan hotel	7.7	12.0	13.8	22.0	2.0	14.0
Trasportasi dan gudang	10.9	0.7	1.9	1.0	0.3	0.2
Jasa-jasa	7.2	2.4	4.3	1.0	1.0	0.0
Pemerintahan	n.a	0.7	1.2	0.1	0.0	5.0
Lainnya (termasuk konsumsi)	n.a	30.0	40.9	61.0	12.0	70.0
T o t a l	100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Total kredit perbankan (triliun Rp)		4.13	0.67	0.17	1.00	0.02

Sumber: Disaster Assessment, Worldbank

Langkah pertama yang dilakukan oleh pihak perbankan antara lain adalah memulihkan kembali sistem pembayaran di Aceh seperti penarikan dana di kantor cabang, pembayaran gaji untuk pegawai negeri. *Pada tingkat propinsi, dampak kerusakan terbesar terjadi pada sektor pertanian dan transportasi*, meskipun penyaluran kredit kepada kedua sektor tersebut dibawah 10% dari seluruh kredit yang disalurkan di Aceh.

Identifikasi yang berkaitan dengan sektor perbankan di Aceh

- 1) **Loan Losses:** Adanya bencana alam tersebut mengurangi kemampuan debitur untuk membayar/mencicil pinjamannya pada sektor perbankan, yang akan berdampak pada tingkat keuntungan dari bank tersebut. Meskipun demikian, walaupun dampaknya secara nasional kecil, diharapkan kejadian ini tidak mengganggu ketahanan perbankan secara nasional.
- 2) **Perkiraan kerugian:** Dengan asumsi tingkat pengembalian 50%, kerugian akibat kredit macet yang berasal dari ketiga daerah yang terkena dampak paling parah (Kota Banda Aceh, Kab Aceh Barat, dan Kab Aceh Besar) sekitar Rp0,9 triliun
- 3) **Infrastruktur Perbankan:** Seluruh perbankan di Aceh mempunyai *back up* data nasabah di Medan ataupun di Jakarta. Dengan demikian, diharapkan tidak ada data yang hilang akibat bencana ini kecuali bank yang berkantor pusat di Aceh seperti BPD dan BPR. Bank besar seperti BRI memiliki sekitar 120 lembaga keuangan mikro di Aceh. Pada daerah yang terkena kerusakan cukup parah, kantor-kantor cabang, ATM, jaringan telekomunikasi dan peralatan lainnya rusak berat. Namun demikian, setelah 1 minggu sejak kejadian tersebut, beberapa bank besar telah membuka kembali kantornya dan lainnya diperkirakan akan melakukan hal yang sama.
- 4) **Perkiraan kerugian:** diperkirakan dari Himbara bahwa kerugian dari empat bank (Mandiri, BNI, BRI dan BTN) pemerintah mencapai Rp60 miliar¹. Sementara itu, BPD yang memiliki komposisi yang cukup besar dalam penyaluran kredit, sekitar Rp50 milyar. Dengan demikian, total dari kerugian akibat infrastruktur perbankan yang rusak diperkirakan mencapai Rp110 miliar.
- 5) **Penghimpunan dana:** Berdasarkan data per Nopember 2004, penghimpunan dana perbankan di Propinsi Aceh mencapai Rp7,3 triliun (0,8% dari perbankan nasional) Guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan, maka pihak perbankan bersama lembaga-lembaga dan kementerian diharapkan untuk merumuskan suatu perangkat hukum untuk identifikasi nasabah dalam hal pencairan simpanannya.
- 6) **Perkiraan kerugian:** Proses identifikasi nasabah dan pemulihan data nasabah yang hilang atau hancur diperkirakan mencapai sekitar Rp20 miliar².

Klaim asuransi umum dan jiwa di Nanggroe Aceh Darussalam hingga 25 Januari 2005 dilaporkan mencapai Rp 3,2 triliun. Jumlah tersebut dipastikan terus bertambah karena sebagian besar perusahaan asuransi yang ada di Aceh belum melaporkan klaimnya. Dalam jumpa pers di kantor Departemen Keuangan, Jakarta, Selasa (25/1), Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Frans Sahusilawane menyebutkan, taksiran klaim perusahaan asuransi sosial di Aceh diperkirakan mencapai Rp 100 miliar, asuransi jiwa Rp 1,2 triliun, dan perusahaan asuransi umum mencapai Rp 1,9 triliun. Jumlah tersebut masih akan bertambah karena sebagian besar perusahaan asuransi yang berada di Aceh belum menyampaikan laporannya.

¹ Koran Tempo 4 Januari 2005

² Disaster Assessment, Hal 14

1.6. Prakiraan Nilai Kerusakan dan Kerugian di Sektor KETENAGAKERJAAN
 (per 14 Januari 2005)

Tabel L.2.11
Kondisi Gedung Kantor

Propinsi/Kab	Jenis Kerusakan	Unit yang Rusak	Harga per Unit (Rp. Juta)	Perkiraan Kerugian (Rp juta)
NAD				
Kantor Dinas Tenaga Kerja Prop. NAD	Rusak Berat	1 unit (3.000 M2)	5.000	5.000
Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh	Rusak Berat	1 unit (1.500 M2)	2.500	2.500
Kantor Badan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP2TKI)	Rusak Berat	1 unit (300 M2)	500	500
Kantor Dinas Tenaga Kerja Aceh Barat-Meulaboh	Rusak Berat	1 unit (1.000 M2)	5.000	5.000
Kantor Balai Latihan Kerja (BLK) Lhoksmawe	Rusak Berat	1 unit (3.000 M2)	7.500	7.500
Kantor Disnaker Lhoksmawe	Rusak Berat	-	-	-
Kantor BLK Banda Aceh	Rusak Ringan	1 unit (3.000 M2)	2.500	2.500
Kantor Loka Latihan Kerja (LLK) UKM Meulaboh	Rusak Ringan	1 unit (2.000 M2)	2.500	2.500
Kantor LLK-UKM Langsa	Rusak Ringan	1 unit (1.500 M2)	2.000	2.000
Kantor BLK sabang	Rusak Ringan	1 unit (2.000 M2)	2.500	2.500
Kantor BLKI Banda Aceh	Rusak Ringan	-	-	-
Total				30.000

Sumber: Dit. Tenaga Kerja, Bappenas

Fasilitas Transmigrasi

Sektor sosial:

- Tingkat kerusakan : Rp. 56.409 juta
- Tingkat kerugian : Rp. 53.370 juta

Sektor infrastruktur:

- Tingkat kerusakan : Rp. 52.885 juta
- Tingkat kerugian : Rp. 30.964 juta

Need Assessment

Rencana perbaikan untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang direncanakan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencakup perbaikan di bidang: (1) infrastruktur dan (2) sosial yang mencakup 14 kabupaten. Adapun total biaya yang dibutuhkan adalah:

Tabel L.2.12
Need Assessment Sektor Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

No.	Bidang	Kebutuhan
1	Ketenagakerjaan	Rp. 407.951 juta
	- Perbaikan fisik (rehabilitasi 1,5 – 2 tahun)	Rp. 54.300 juta
	- Kegiatan non-fisik (rescue 20 bulan)	Rp. 8.100 juta
	- Sosial dan jangka pendek (fisik)	Rp. 287.959 juta
	- Sosial dan jangka pendek (non fisik)	Rp. 57.592 juta
2	Transmigrasi	Rp. 103.336 juta
	Jumlah	Rp. 551.287 juta

II. UPAYA YANG TELAH DAN SEDANG DILAKUKAN PADA TAHAP TANGGAP DARURAT

Sebagai bagian dari tahap tanggap darurat langkah untuk mempercepat pemulihan ekonomi terutama dalam upaya mendorong penyediaan lapangan kerja baik lapangan kerja baru maupun penempatan kembali (*resettlement*) memerlukan rincian kegiatan mendesak yang perlu dilakukan. Berikut ini adalah upaya yang telah dan masih dilakukan oleh sektor-sektor.

2.1. Upaya yang Telah Dilakukan dan Sedang Dilakukan Pada Tahapan Tanggap Darurat Sektor KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Membentuk Tim SATGAS Penanggulangan Bencana Alam Departemen Kelautan dan Perikanan pada tanggal 27 Desember 2004.
2. Melakukan koordinasi dengan SATKORLAK Penanggulangan Bencana Alam di Departemen Sosial tanggal 28 Desember 2004.
3. Mengirimkan tim pemantau pendahuluan tanggal 27 Desember 2004 untuk mencari fakta di lapangan dan Tim SATGAS pada tanggal 29 Desember 2004 untuk bantuan kemanusiaan, dilanjutkan dengan tim lanjutan tanggal 5 dan 9 Januari 2005.
4. Menghimpun dan mengirimkan bantuan kemanusiaan antara Departemen Kelautan dan Perikanan bersama *stakeholders* bidang kelautan dan perikanan yang bersimpati melalui pengumpulan dana dan natura berupa makanan, pakaian, dan keperluan lainnya untuk disumbangkan kepada korban bencana alam tsunami. Bantuan telah disampaikan secara bertahap mulai tanggal 29 Desember 2004 untuk NAD dan tanggal 10 Januari 2005 untuk Kab. Nias. Secara keseluruhan diperkirakan jumlah dana yang telah terhimpun sebesar Rp. 1,7 miliar.
5. Membentuk Posko Penanggulangan Bencana Alam di Banda Aceh, Meulaboh, dan Calang.
6. Sejak tanggal 29 Desember 2004, Departemen Kelautan dan Perikanan turut berpartisipasi aktif melakukan koordinasi lintas sektor di BAPPENAS dan sejak tanggal 13 Januari 2005 menjadi anggota POKJA pada Tim Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat Aceh dan Sumatera Utara (TR3MAS) BAPPENAS.
7. Mengoperasikan 3 kapal pengawas sumber daya kelautan dan perikanan HIU-01, HIU-04, dan HIU-06 untuk mendukung operasi bantuan kemanusiaan dan transportasi umum di Nias (HIU-04) dan Banda Aceh – Calang (HIU-01 dan HIU-06).
8. Melakukan re-programming dana APBN dan pinjaman ADB yang sedang berjalan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana alam.

2.2. Upaya yang Telah Dilakukan dan Sedang Dilakukan Pada Tahapan Tanggap Darurat Sektor PERTANIAN DAN PANGAN

1. Membentuk tim penanggulangan bencana alam nasional lingkup Departemen Pertanian.
2. Pengiriman TIM ke NAD (Posko Deptan) mulai dari tanggal 28 Desember 2004 sampai dengan saat ini secara bergiliran yang dipimpin oleh Eselon II.
3. Pembentukan posko di Sumatera Utara, Banda Aceh dan Pusat (Jakarta)
4. Partisipasi dalam posko nasional di Bakosnas/Kantor Wapres
5. Survei udara kerjasama dengan FAO untuk mengidentifikasi dan inventarisasi kerusakan lahan.

6. Pengumpulan dana dan bahan-bahan bantuan untuk korban di lingkup karyawan yang meliputi karyawan Departemen Pertanian, keluarga karyawan Departemen Pertanian, Dharma Wanita Departemen Pertanian, Yayasan Mujahidin Departemen Pertanian, *stakeholder* Lingkup Departemen Pertanian dan donor dari dalam dan luar negeri.
7. Sampai dengan saat ini telah terkumpul berupa dana sebesar Rp. 2,225,463.200 dengan rincian dari keluarga besar Departemen Pertanian sebesar Rp. 1,225,463,200,- dan dalam komitmen dengan CF-2KR Jepang sebesar Rp. 1 Milyar serta bantuan berupa pakaian 810 Kg, komputer 1 set dan peralatan dapur 100 unit.
8. Penyaluran bantuan yang sudah disampaikan :
9. *Dalam Bentuk Uang Tunai*
10. Bantuan Operasional Posko Rp. 22.142.500,-
11. Sandang, Pangan dan Obat-obatan Rp. 43.590.000,-
12. Peralatan rumah tangga Rp. 15.000.000,-
13. Jumlah Rp. 80.732.500,-
14. *Dalam Bentuk Barang*
15. Pakaian baru dan layak pakai Rp. 810 kg
16. Peralatan dapur 100 unit
17. Memberikan santunan kepada keluarga karyawan yang meninggal/hilang, cedera berat dan kehilangan tempat tinggal.

Pada tahap transisi ini untuk membantu pemulihan fungsi pelayanan pemerintah dalam bidang pangan dan pertanian akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : (i) perbaikan prasarana dan sarana kerja pemerintah; (ii) pendampingan, rekrutmen atau mobilisasi pegawai, (iii) rehabilitasi pembangunan kantor yang mengalami rusak total; (iv) melanjutkan penyaluran beras bagi pengungsi apabila masih ada; (v) rehabilitasi lahan pertanian yang rusak dengan didukung rehabilitasi prasarana pendukung seperti saluran irigasi dan jalan usahatani, serta penyediaan sarana pertanian; dan (vi) bantuan modal usahatani seperti benih/bibit dan sarana produksi lainnya, serta bantuan modal untuk usaha pengolahan hasil pertanian seperti penggilingan padi.

Pengungsi Akibat Bencana dan Ketersediaan Beras

Jumlah pengungsi sebagai akibat bencana alam ini saat ini diperkirakan telah mencapai 486 ribu jiwa yang tersebar di 16 kabupaten/kota (data Departemen Dalam Negeri dari Tim R3MAS BAPPENAS). Dengan jumlah pengungsi sebesar tersebut, dengan tingkat konsumsi beras per jiwa sebesar 4 ons per hari, maka jumlah kebutuhan pangan beras untuk sampai 3 bulan kedepan, 4-9 bulan, dan 10-20 bulan masing-masing adalah sekitar 17.504 ton, 35.008 ton, dan 64.182 ton, atau untuk menjamin ketersediaan pangan dalam periode 20 bulan dibutuhkan beras sebanyak 116.694 ton (**Lampiran**).

Pembedaan jangka waktu penyediaan beras ini mengikuti beberapa kriteria:

1. 0-3 bulan pertama adalah periode yang digunakan oleh Departemen Sosial dalam menangani pengungsi pada masa darurat di tenda penampungan.
2. 4-9 bulan (6 bulan) berikutnya adalah periode dimana masa transisi mulai berlaku yaitu periode pemindahan/pemulangan pengungsi ke tempat asal atau ke tempat baru yang lebih permanen.
3. 10-20 bulan adalah periode selanjutnya, mengikuti periode rehabilitasi dan persiapan rekonstruksi. Periode setelah ini sudah akan menggunakan program yang ada (reguler) atau diharapkan mekanisme pasar sudah berjalan normal.

Perkiraan Ketersediaan Beras

Kondisi stok beras yang terdapat di gudang-gudang Perum BULOG di wilayah propinsi NAD saat ini ada sekitar 30,2 ribu ton (**Lampiran**). Jumlah tersebut diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan beras bagi pengungsi untuk sekitar 2 bulan. Persediaan lain adalah, stok untuk seluruh pulau Sumatera adalah sebesar 217,2 ribu ton (termasuk stok di Aceh), atau dapat mencukupi kebutuhan lokal total selama 20 bulan.

Distribusi dan Pembiayaan

Penyediaan dan mobilisasi beras untuk masyarakat yang terkena dampak dilakukan oleh Perum BULOG. Koordinasi penyediaan pangan dalam periode darurat (0-3 bulan) berada di tangan Departemen Sosial dan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial dan Kepala Daerah).

Dalam rangka penanganan bencana, setiap propinsi memiliki jatah beras untuk bencana alam sebanyak 50 ton per tahun. Penyediaan beras untuk kebutuhan ini dibeli dari stok yang ada di Perum BULOG dan dibiayai dari anggaran Departemen Sosial. Di luar kebutuhan tersebut, seyogyanya pendanaan menggunakan dana darurat bencana alam yang dialokasikan oleh Departemen Keuangan ke Menko KESRA. Tidak ada plafon atau perkiraan alokasi/kebutuhan beras dalam kondisi darurat ini, sehingga perencanaan dan koordinasi pada tingkat ini sangat diperlukan.

Sesuai dengan tahapan yang tersebut, maka mekanisme distribusi yang dapat digunakan adalah:

1. Pada periode 0-3 bulan, penyediaan beras dapat dilakukan secara gratis melalui tenda penampungan pengungsi: (i) dengan membuka dapur umum untuk tempat penampungan pengungsi yang setiap KK pengungsi tidak memasak sendiri; (ii) dengan membagi beras kepada setiap KK untuk keluarga yang memasak sendiri.
2. Pada periode selanjutnya, karena diharapkan bahwa pengungsi sudah berada di tempat penampungan sementara yang lebih permanen atau sudah kembali ke tempat semula, maka pembagian beras sudah tidak gratis lagi namun dikaitkan dengan beberapa kegiatan, yaitu: (a) *food for work*, dimana pengungsi mendapatkan beras untuk mengerjakan rumah dan lingkungan hidupnya; (b) *food for training* dan (c) *food for counselling*, dimana pengungsi mendapat beras untuk datang dan mendapatkan layanan konsultasi psikologis dalam rangka mengurangi/menurunkan dampak traumatis yang dialaminya. Mekanisme dalam periode ini dapat dilakukan bekerjasama dengan World Food Program PBB.
3. Pada periode selanjutnya, maka penyediaan beras dilakukan dengan pola Raskin karena pada saat ini diharapkan masyarakat sudah memiliki penghasilan meskipun masih terbatas.

Distribusi stok sampai ke lokasi penduduk yang terkena dampak dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan dan kelancaran sarana dan prasarana angkutan. Artinya, tidak selalu bahwa beras untuk pengungsi yang berada di satu kabupaten tertentu diambil dari stok kabupaten terdekat. Mobilisasi stok tergantung dari jalur transportasi yang memungkinkan.

Perkembangan Pelaksanaan

Penyaluran beras pada masa darurat telah dilakukan oleh Perum BULOG melalui pembukaan dapur umum oleh Perum BULOG yang bekerjasama dengan Departemen Sosial dan di bawah koordinasi Kantor menko KESRA. Dapur umum tersebut telah didirikan di 3 lokasi, yaitu:

1. Banda Aceh untuk lokasi pengungsian di Blang Bintang dengan menyediakan makanan bagi 1.600 jiwa, di Lampeunerut dengan jumlah pengungsi 2.000 jiwa, dan di Desa Tanjung,
2. Lhokseumawe yang bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat,
3. Meulaboh yang meliputi 4 lokasi pengungsian yaitu Alue Pengereng, Rondeng & Lapang, kantor Bupati, dan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain itu bantuan beras bagi pengungsi tersebut juga telah disalurkan ke lokasi-lokasi penampungan sementara di beberapa kabupaten seperti Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, Takengon, Sigli, Langsa, Kutacane, Meulaboh, Sinabang dan Blang Pidie. Jumlah beras yang telah disalurkan sampai dengan 18 Januari 2005 kurang lebih sudah sebanyak 3.908 ton (**Lampiran**), sedangkan untuk Sumatera Utara yang sebagian juga Aceh adalah sebesar 10.326,9 ton, termasuk di dalamnya sebesar 10.000 ton adalah beras WFP.

Dalam rangka membantu menampung bantuan-bantuan pangan yang berasal dari masyarakat, gudang-gudang Perum BULOG dapat dimanfaatkan untuk penampungan beras sementara. Gudang-gudang Perum BULOG di NAD dan Sumut juga dipergunakan untuk menampung bantuan pangan yang berasal dari lembaga internasional seperti WFP.

Setelah masa darurat ini keberadaan dapur umum ini setahap demi setahap akan dikurangi, sedangkan penyaluran beras ke daerah relokasi penampungan pengungsi akan terus dilanjutkan. Untuk wilayah lain di provinsi NAD, penyaluran beras bagi keluarga miskin tetap dilakukan melalui mekanisme RASKIN.

Lain-lain

Pada saat ini masih terus dilakukan penyempurnaan data kerusakan baik yang langsung dilakukan oleh aparat pemerintah maupun dengan bantuan lembaga internasional seperti FAO, serta penyusunan langkah-langkah pemulihan. Selain itu, sedang terus dilakukan pula identifikasi sumber-sumber pendanaan dan dukungan pihak luar untuk membantu memulihkan kondisi Aceh dan Sumatera Utara.

2.3. Upaya yang Telah Dilakukan dan Sedang Dilakukan Pada Tahapan Tanggap Darurat Sektor PERDAGANGAN

Dengan terjadinya kerusakan sarana-sarana perdagangan, perlu dilakukan :

Pembangunan Pasar Darurat

1. Pembangunan pasar darurat (tenda) direncanakan di Banda Aceh , Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Blang Piddie, Kabupaten Piddie, Kabupaten Aceh Selatan, dan Kabupaten Aceh Timur di 30 lokasi sebanyak 605 unit tenda
2. Di kota Banda Aceh telah disiapkan 7 lokasi yaitu Mesjid Raya, Neusu, Tangkup, Ketapang, Setui, Lungbata untuk menggantikan sementara Pasar Aceh dan pasar

Penayung yang rusak total. Sebanyak 120 unit tenda telah dikirim tanggal 13 Januari 2005 ke Banda Aceh melalui darat untuk segera didirikan.

Berdasarkan kunjungan ke Pulau Nias pada tanggal 13 Januari 2005 dapat diidentifikasi kebutuhan pendirian pasar darurat di Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan sebanyak 5 pasar darurat @ 20 unit. Dari jumlah tersebut 1 pasar darurat (20 unit) sudah didirikan sudah di kecamatan Sirombu pada tanggal 13 Januari 2005, dan sisa tenda pasar darurat rencana dikirimkan hari Senin 17 Januari 2005

Operasi Pasar pengadaan bahan pokok

Beras

1. Stok beras di NAD dan Sumut per 12 Januari 2005 masing-masing berjumlah 30.459 ton.
2. Beras yang telah disalurkan dari gudang BULOG s/d 12 Jan 2005 ke Aceh sebesar 3.285 ton dan Sumut sebanyak 2.586 ton.
3. Penjualan beras ke pasar umum sampai 12 Jan 2005 di Lhokseumawe 10,5 ton; Takengon 60 ton; Langsa dan Kuta Cane masing-masing 16 ton dan 46 ton.
4. Penyaluran beras Raskin sampai 11 Jan 2005 oleh Sub Divre Sabang sebesar 80 ton dan Takengon 14 ton.
5. Harga rata-rata beras medium pada Minggu I Januari 2005 naik 5.76% dibandingkan Desember 2004 dari Rp 2972 menjadi Rp 3143 perkg, karena berkurangnya pasokan beras dan musim panen telah berakhir. Untuk mengatasi masalah ini telah dilakukan penjualan beras ke pasar umum oleh Divre BULOG untuk meredam gejolak.
6. Beras bantuan WFP untuk NAD 12.528 ton telah tiba di Belawan tanggal 2 Januari 2005. Realisasi bongkar sampai tanggal 10 Jan 2005 sekitar 8.602 ton. Seluruh beras bantuan WFP disimpan di GBB Mabar Medan.

Komoditi Gula

1. Untuk mengatasi kelangkaan gula pada minggu ke dua bulan Januari telah dipasok gula dari Medan khusus untuk Aceh sebanyak 400 ton yang sudah digunakan untuk operasi pasar sejak tanggal 13 Januari 2005. Hasil operasi pasar berhasil menurunkan harga gula dari sebelumnya dari Rp 10.000 per kg menjadi Rp 8000 per kg.
2. Rencana pasokan berikutnya kurang lebih 26 ribu ton yang akan tiba secara bertahap sampai 20 Januari 2005 di Medan dari Jawa Timur. Kebutuhan gula untuk NAD sebesar 5000 ton per bulan dan Sumut 17 ribu ton per bulan.
3. Untuk NAD Timur : Kuala Simpang, Langsa, Idi sebesar 400 ton, NAD Utara; Lok Sukon, Lok Sumawe, Bireun 500 ton; Pidi Sigli 200 ton, NAD Tengah Takengon 50 ton. Masih menjadi masalah untuk suplai ke Banda Aceh serta untuk Aceh Barat/Meulaboh dan Aceh Selatan/Tapaktuan yang akan segera diupayakan

Komoditi Kayu

1. Sesuai rekomendasi Bupati Aceh Singkil melalui salah satu pedagang kayu antar pulau terdaftar (PKAPT) setempat telah tersedia stok kayu untuk kebutuhan bahan bangunan di NAD sebanyak 2.000 m³.
2. Pasokan berikutnya segera akan diupayakan dari propinsi Riau dan Sumut.

Melakukan koordinasi dengan dinas dan dunia usaha terkait

1. Menugaskan Dinas Perindag Sumut untuk mengkoordinasikan pasokan bahan pokok dan penting ke NAD baik yang berasal dari Sumut maupun wilayah lainnya.

2. Menugaskan Dinas Perindag NAD untuk melakukan monitoring stok dan harga bahan pokok serta melakukan perencanaan pendirian pasar-pasar darurat, identifikasi pedagang-pedagang yang dapat melakukan aktivitasnya kembali.
3. Menghimbau sektor perbankan untuk mengoperasikan secepatnya pelayanan perbankan (BCA, BRI dan Bank Danamon)
4. Mengorganisasikan para supplier baik di Sumut, Sumbar, Riau, Jakarta dan lainnya dalam rangka untuk menjaga kontinuitas pengadaan komoditi bahan pokok strategis di Sumut dan NAD.

Koordinasi untuk kegiatan pemulihan ekonomi

1. Mengingat bahwa pembangunan pasar tidak lepas dari pemulihan kembali sistem pasar dan daya beli masyarakat, maka telah dilakukan koordinasi dengan pelaporan pada BAPPENAS, BAKORNAS dan Menko, untuk membentuk Kelompok Kerja Pemulihan Ekonomi antara instansi pemerintah (Departemen Perdagangan, Meneg KUKM, Departemen Perindustrian, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian, Meneg BUMN, BI, dan Departemen Keuangan) yang terkait dan non pemerintah (dunia usaha dan professional termasuk Kadin, LSM/perwakilan masyarakat di NAD dan Sumut, peneliti).
2. Pertimbangan utama dari pembentukan kelompok kerja tersebut adalah untuk mensinergikan langkah-langkah yang perlu dilakukan antara instansi pemerintah yang terkait untuk **memfasilitasi** pemulihan kembali sistem pasar dan kegiatan ekonomi, bersama-sama dengan dunia usaha, perbankan dan LSM.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh masing-masing instansi a.l adalah¹:

1. Meneg KUKM: menyediakan insentif/fasilitas permodalan kepada anggota koperasi; membantu pendirian pasar serta akan memfungsikan koperasi dalam pendistribusian bahan pokok di NAD dengan dana yang tersedia di Meneg KUKM.
2. Departemen Perikanan dan Kelautan melakukan identifikasi kerusakan tambak udang dan nelayan yang terpengaruh, dan memberi program bantuan (sudah ada perkiraan di wilayah tertentu)
3. Departemen Pertanian melakukan identifikasi lahan yang rusak dan petani yang terpengaruh, merancang program bantuan
4. Departemen Perdagangan melakukan identifikasi kerusakan pasar dan lokasi untuk membangun pasar darurat di tahap darurat, dan pasar permanen (yang belum tentu pada lokasi semula karena mengacu kepada tata ruang dan pemukiman penduduk di kemudian hari)
5. Departemen Perindustrian melakukan identifikasi kerusakan industri kecil (diperkirakan 60% dari industri kecil mengalami kerusakan) dan merancang program bantuan
6. Perbankan melakukan dokumentasi ulang dari nasabah, kreditur, memberi keringanan dan ingin berpartisipasi dalam pemulihan kembali perekonomian melalui pemberian modal
7. Dunia usaha (termasuk KADIN) dan professional lain telah mengumpulkan dana dan tenaga SDM professional yang bersedia untuk dikerahkan untuk pemulihan kembali ekonomi (seperti pelatihan, training, pembentukan sistem), dan menginginkan untuk menyalurkan bantuan secara sistematis dan sinergistik.

¹ Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut di atas telah dilakukan 2 kali pertemuan yaitu pada tanggal 3 Januari 2005 dan 13 Januari 2005 (dan direncanakan pertemuan reguler untuk mematangkan skema pemulihan kembali ekonomi, data pelengkap dan dengan demikian kejelasan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh masing-masing instansi dapat disinergikan). Juga telah ditetapkan Depdag sebagai Sekretariat Pokja Pemulihan Ekonomi beralamat Jl. Ridwan Rais No.5 Gedung I Lt.III Jakarta Telp. 3848666 dan 3848662.

8. LSM dan perwakilan kelompok masyarakat di Aceh menjaring aspirasi dari konstituensi yang ingin di bantu, memiliki data dan kendala lapangan

Upaya mematangkan skema pemulihan kembali ekonomi dan sistem pasar yang sinergistik antara instansi pemerintah maupun swasta. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah penyelesaian survei primer yang diperkirakan dapat diselesaikan dalam kurun waktu 4-6 minggu.

Informasi yang diperoleh dari hasil rapat adalah :

1. Tidak tersedianya bahan bangunan berupa semen, triplek, besi beton, minyak solar dan minyak hidrolik. Alat berat yang tersedia tidak dapat difungsikan secara optimal karena tidak tersedianya minyak solar dan minyak hidrolik. Diharapkan Pertamina dapat membantu penyediaan bahan-bahan tersebut.
2. Meningkatkan daya beli masyarakat di daerah bencana baik di NAD dan Nias melalui pemberian bantuan dalam bentuk pembagian uang tunai kepada masyarakat yang terkena bencana, sehingga dapat memulihkan daya beli masyarakat.
3. Di NAD terdapat 4.200 unit koperasi dan sebanyak 3.000 tidak berfungsi. Meneg KUKM akan menyalurkan modal kerja kepada koperasi yang masih berfungsi.
4. IKM yang rusak tidak harus kembali pada usaha semula, tapi bisa diarahkan dibidang lain yang lebih prospektif, seperti pembuatan batako dan bahan bangunan lain yang dibutuhkan di daerah bencana.
5. Akan dibuat *floating storage* antara pulau Canang dan Meulaboh dengan menggunakan kapal-kapal negara serta toko dan hotel terapung dengan kapal Pelni.
6. Kota Sibolga mempunyai peran penting dalam penyaluran barang-barang kebutuhan pokok masyarakat, untuk itu perlu dibuat basis logistik untuk kemudian diteruskan ke Labuhan Haji.
7. *Property right* merupakan isu prioritas karena rawan terjadinya konflik sosial, karena surat-surat tanah yang dimiliki masyarakat yang terkena musibah tidak semuanya legal dan terdaftar di BPN. Pemerintah perlu memberikan bantuan dalam rangka menyelesaikan masalah kepemilikan tanah dan bangunan masyarakat.
8. Pelayaran Sibolga ke Banda Aceh Barat dan Selatan sudah dibuka, namun masalahnya bagaimana pemerintah dapat memberikan subsidi terhadap pelayaran perintis yang melayani jalur daerah terkena bencana.
9. Bank di Meulaboh ada di kota Blank Pidie yang berjarak 100 km sehingga sulit untuk mentransfer dana kebutuhan operasi. Diharapkan agar peran perbankan dapat segera dipulihkan di daerah-daerah yang fungsi perbankannya tidak berjalan.
10. Sampai 12 Jan 2005 telah dioperasikan 9 bus untuk mengisi route Banda Aceh ke Motai dan Banda Aceh ke Lambaro dan Blang Bintang untuk membantu mobilisasi masyarakat.
11. Menyiapkan bantuan truk dari Riau dan Sumbar untuk distribusi barang dari Medan ke beberapa kota di Aceh. Organda dan Damri pada tanggal 4 Jan 2005 telah menyanggupi 250 truk, 100 diantaranya akan dikoordinir oleh pemerintah.

Untuk memperoleh data dan informasi yang lebih akurat di lapangan telah dilakukan kunjungan Mendag ke Medan dan Banda Aceh pada tanggal 4-5 Januari 2005 serta ke Pulau Nias dan Sibolga tanggal 12 – 13 Januari 2005 secara rinci sebagai berikut :

1. Melakukan pertemuan dengan Pemda Sumut, dunia usaha, dan LSM termasuk Organisasi Aceh Sepakat, PITI, yang menghimbau agar dunia usaha khususnya pemasok bahan pokok ke wilayah Aceh selama ini untuk tetap berperan melakukan pasokan ke wilayah NAD serta melakukan pendataan mitra usahanya di NAD sebelum musibah.

2. Keresahan masyarakat tentang kepemilikan harta benda (gedung, tanah, rumah dan lain-lain) yang dokumennya hilang. Masyarakat mengharapkan agar pemerintah dapat membantu masyarakat untuk memperoleh kembali dokumen-dokumen kepemilikan harta benda dimaksud.
3. Adanya usulan bahwa untuk menggerakkan kembali perekonomian di NAD dan Nias, agar bantuan yang diberikan berbentuk uang. Dengan demikian dapat menumbuhkan daya beli masyarakat.
4. Dalam pembangunan kembali NAD juga perlu dilakukan pendekatan kultural religius mengingat kekhasan budaya NAD.
5. Dalam pertemuan dengan Pemda dan pelaku usaha di Sibolga diketahui masalah yang dihadapi dalam pendistribusian bahan pokok ke Nias adalah terbatasnya angkutan ferry dari Sibolga sehingga harga-harga bahan pokok naik. Hal ini telah dikoordinasikan pada rapat Bakornas PBP di kantor Wapres.
6. Bencana di Nias pada umumnya dialami masyarakat nelayan yang kehilangan kapal maupun alat penunjang pedagang ikan. Untuk itu diminta bantuan untuk membangun kapal kayu dan sarana usaha pedagang ikan.
7. Untuk kapal-kapal ikan yang berbobot 30 DWT keatas yang pengurusan izinnya berada di Jakarta, dianggap sangat memberatkan para nelayan, selain waktu juga biayanya cukup tinggi. Mohon perhatian Pemerintah untuk menyelesaikannya.
8. Dalam rangka menunjang transportasi bantuan berupa sembako dan bahan bangunan pada masa tanggap darurat dan restorasi untuk wilayah Aceh Barat, maka perlu difasilitasi Pemerintah dalam hal menghidupkan jalur kapal perintis dari Sibolga ke wilayah Aceh Barat serta memberikan subsidi ongkos angkut.

Lain Lain

1. Telah diterbitkan Keputusan Bersama Mendag dan Menperin No. 01/M/Kep/1/2005 dan No. 01/M/Kep/1/2005 tanggal 3 Januari 2005 tentang Impor Barang Modal Bukan baru untuk Daerah-Daerah yang Terkena Bencana Alam di propinsi NAD, Sumut, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Para importir dapat mengimpor barang-barang modal bukan baru dengan mendapatkan rekomendasi dari Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam kantor Wapres.
2. Mengirim surat kepada Menteri Keuangan RI untuk kemudahan prosedur pengiriman barang barang impor dalam rangka bantuan bencana alam, antara lain dari : Jakarta, Medan, Batam, dan Sabang (Surat Mendag No. 21/M/I/2005 tanggal 11 Januari 2005).

2.4. Upaya yang Telah Dilakukan dan Sedang Dilakukan Pada Tahapan Tanggap Darurat Sektor PERINDUSTRIAN

Berdasarkan laporan tanggal 16/2/2005, upaya yang telah dilakukan Sektor Industri adalah:

1. Melanjutkan inventarisasi kerusakan
2. Memberikan bantuan langsung
 - a. 1000 buah tenda kapasitas 50 orang / buah
 - b. 1 unit truk dan 1 unit minibus
 - c. 10 unit motor kawasaki
 - d. 1 unit whelloader
3. Perencanaan Awal Pembangunan Kembali dan Penguatan Sektor Industri

Dalam periode tanggap darurat ini masih akan dilakukan

1. Memutakhir informasi hasil/survei sementara yang telah diterima
2. Melanjutkan bantuan langsung :
3. Dipo air minum kapasitas 1800 liter/jam.
4. Penyusunan Program Kerja Rinci Tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi
5. Penyusunan Kebijakan Kluster rinci untuk menata ulang Kebijakan Pembangunan Industri di NAD

2.5. Upaya yang Telah Dilakukan dan Sedang Dilakukan Pada Tahapan Tanggap Darurat Sektor PERBANKAN

Langkah-langkah Pemulihan yang telah dilakukan

1. Pemulihan Sistem Pembayaran (SP) di daerah bencana

Sistim Pembayaran di Banda Aceh

- a KBI Banda Aceh telah beroperasi kembali terbatas untuk pelayanan sistem pembayaran tunai dan non-tunai sejak tanggal 3 Januari 2005 di kantor sementara di Jalan Jend. Sudirman No. 82 Banda Aceh, Telp. (0651) 7410720, (0651) 45247 dan Fax (0651) 41928. Untuk khsanah uang KBI Banda Aceh tetap menggunakan khsanah uang yang berada di gedung kantor lama (Jl. Cut Meutiah , Banda Aceh).
- b Kegiatan kliring dengan menggunakan Sistem Otomasi Kliring Lokal (SOKL) telah dapat dilaksanakan kembali sejak tanggal 5 Januari 2005.
- c Sistem OSA-KBI dan BI-RTGS telah berjalan dengan baik sejak tanggal 10 Januari 2005. Fungsi Ekonomi Moneter dan Perbankan (EMP) KBI Banda Aceh sejak tanggal 10 Januari 2005 telah dialihkan ke KBI Medan.
- d Posisi kas KBI Banda Aceh per 31 Desember 2004 tercatat Rp. 420 milyar diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan 2 (dua) bulan *out flow* (kondisi normal).

Sistim Pembayaran di luar Banda Aceh

Operasional perbankan di kota-kota besar lainnya di Propinsi NAD seperti Lhoksemauwe, Tapaktuan, Langsa dan Pulau Nias di Propinsi Sumut telah dapat beroperasi secara normal, kecuali kota Meulaboh kegiatan perbankan masih belum dapat dilakukan.

2. Identifikasi Nasabah

Meminta perhatian kepada Presiden agar dapat memberikan prioritas penyelesaian masalah ini, sebagaimana tertuang dalam Surat Bank Indonesia No. 7/2/GBI/DHk tanggal 17 Januari 2005. Usulan yang dikemukakan dalam surat tersebut yaitu :

1. Agar ada payung hukum dalam keadaan darurat, mengingat mekanisme pencairan dana yang dilakukan bank sesuai dengan kesepakatan tersebut dalam angka 2.a.ii masih berpotensi menghadapi permasalahan hukum di kemudian hari;

2. Untuk memperkecil risiko hukum, diperlukan ketersediaan identitas nasabah dan atau keterangan ahli waris/wali yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam waktu tidak terlalu lama;
3. Untuk mempercepat realisasi hal tersebut dalam angka ii, diharapkan adanya koordinasi antar instansi terkait yang berwenang untuk menyediakan identitas nasabah dan atau keterangan ahli waris/wali;
4. Dalam hal usulan dalam angka i dan ii menghadapi kendala dalam pelaksanaannya agar dapat dibuat ketentuan yang bersifat khusus di Aceh selama dalam keadaan darurat.
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (MA, Kejagung, Polri, MenkoKESRA, Depdagri, Depkumham, Depkeu, Sekkab) dalam rangka melindungi bank apabila timbul kasus hukum di kemudian hari, sebagaimana tertuang dalam surat kepada MA No.7/4/GBI/DHk tanggal 27 Januari 2005.

3. Kualitas kredit

1. Telah mengeluarkan PBI No.7/5/PBI/2005 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Umum Pasca Bencana Nasional di Propinsi NAD dan Kabupaten Nias Propinsi Sumatera Utara.
2. Perbankan atas permintaan BI sedang melakukan inventarisasi dan verifikasi data kredit termasuk kredit yang didukung KLBI yang terkena bencana, yang diperkirakan akan diselesaikan dalam waktu secepat-cepatnya 3 bulan (Januari s/d Maret 2005)
3. BI memberi masukan kepada Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka mendorong penyaluran kredit UMKM di daerah bencana.
4. Penyelesaian terkait dengan program penjaminan BPR / BPRS

Telah dilakukan pembicaraan dengan Depkeu cq. DJLK untuk membicarakan penyelesaian pembayaran nasabah BPR melalui program penjaminan. Sehubungan dengan hal ini perlu payung hukum untuk memberikan perlakuan khusus pembayaran dana kepada pihak ketiga.

5. Hilangnya agunan kredit

Meminta bank untuk melakukan identifikasi dokumen agunan yang hilang.

6. Hancur/ hilangnya gedung BPR

Inventarisasi kerugian atas kerusakan gedung

2.6. Upaya yang Telah Dilakukan dan Sedang Dilakukan Pada Tahapan Tanggap Darurat Sektor KETENAGAKERJAAN

Dalam masa tanggap darurat ini upaya yang telah dan sedang dilakukan antara lain adalah

1. Kantor DISNAKER dengan bantuan ILO telah membangun sejumlah pusat pelayanan ketenagakerjaan untuk melakukan fungsi bursa kerja.
2. Identifikasi profil ekonomi dan ketenagakerjaan Aceh dan Sumut Pasca-Tsunami dan pelayanan ketenagakerjaan.

3. Identifikasi meliputi lapangan usaha, kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya yang dapat dilakukan dalam proses rehabilitasi maupun rekonstruksi yang dapat menciptakan kesempatan kerja
4. Identifikasi kebutuhan keterampilan dan kebutuhan pelatihan maupun perlindungan sosial tenaga kerja yang dibutuhkan. Kebutuhan pelatihan maupun keterampilan tersebut perlu dijabarkan menurut sektor kegiatan ekonomi. Secara rinci profil ini dapat dilihat pada **Lampiran**. Dengan adanya profil tenaga kerja yang jelas diharapkan dapat dirancang jenis bantuan/skim pembiayaan yang tepat sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas bantuan baik pada tahap tanggap darurat, rehabilitasi, maupun rekonstruksi. Proses penyusunannya antara lain melibatkan Kantor Statistik (BPS) serta LSM, Universitas dan masyarakat (terutama pengungsi) setempat.

III. DAFTAR PERTANYAAN UNTUK SURVEI

Profil Tenaga kerja (Sektor Ketenagakerjaan)

A. Identifikasi Penduduk

3.1. Penduduk yang terkena Musibah

a. Penduduk Masih sehat dan mampu bekerja

1. Masih punya pekerjaan
2. Kehilangan pekerjaan (menjadi penganggur)

b. Penduduk Mantan Pengusaha

1. Usaha musnah atau sama sekali tidak bisa atau perlu waktu relatif sangat lama untuk beroperasi
2. Usaha diharapkan masih bisa beroperasi segera (dalam waktu relatif singkat)
3. Apakah mesin/peralatan masih memadai atau perlu diganti/dibeli
4. Apakah bahan baku masih bisa diperoleh (apa perlu bantuan untuk memperolehnya)
5. Apakah distribusi/pemasaran tidak mengalami hambatan (apa perlu bantuan)
6. Apakah karyawan masih dapat bekerja (berapa, apakah perlu tambahan)
7. Apakah konsumen dapat mengakses (daya beli dan jangkauan layanan)
8. Apakah perlu bantuan modal (investasi/ kerja)

c. Penduduk Mantan Karyawan dan Penganggur

1. Pendidikan
2. Keahlian
3. Pengalaman

d. Penduduk Tidak mampu bekerja

1. Sementara (sakit), bila sudah sembuh/sehat perlu dicermati apakah masuk ke dalam kategori butir (1.1.1) atau (1.1.2).
2. Permanen (cacat), bila sudah sembuh/sehat perlu dicermati apakah masuk ke dalam kategori butir (1.1.1) atau (1.1.2) atau (1.3.7).

e. Penduduk Bukan angkatan kerja (BAK) yang kehilangan tunjangan (penghasilan/pembiayaan)

1. Janda
2. Siswa SD
3. Siswa SMP
4. Siswa SMU
5. Mahasiswa D1-D3
6. Mahasiswa S1
7. Cacat & lainnya

3.2. Keadaan tempat tinggal (rumah)

Diharapkan masih bisa dipakai/dihuni

1. Lokasi tetap (aman)
2. Surat kepemilikan tanah masih ada
3. Surat kepemilikan tanah lenyap (tidak ada/punya)
4. Apakah perlu bantuan pembiayaan untuk memperbaiki/ membangun kembali? Skim pembiayaan seperti apa?
5. Lokasi harus pindah (rawan bencana)
6. Rumah sama sekali tidak bisa dihuni (Perlu skim pembiayaan seperti apa?)
7. Tidak/belum pernah punya rumah sama sekali

3.3. Penduduk yang tidak terkena musibah

a. Identifikasi Lapangan Usaha

1. Kegiatan Identifikasi Industri.
2. Identifikasi jenis, lokasi industri, dan kapasitas (kecil, menengah, dan besar)
3. Identifikasi sarana dan prasarana industri (kecil, menengah, dan besar)
4. Identifikasi ketersediaan bahan baku (jenis, volume, dan outlet suplai), dan
5. Identifikasi tenaga kerja industri (jumlah, sebaran, dan tingkat pendidikan)

B. Perdagangan

Tujuan pokoknya adalah agar diketahui secara rinci kondisi aktual untuk bahan dasar dalam merumuskan lebih terarah revitalisasi sektor industri berdimensi jangka pendek dan menengah.

2.1. Kegiatan Identifikasi Perdagangan.

1. Jenis dan lokasi perdagangan (formal dan informal)
2. Sarana dan prasarana perdagangan (pasar tradisional, kompleks pertokoan, pasar modern, dan sarana pergudangan baik milik pemerintah dan swasta)
3. Tenaga kerja di sektor perdagangan (jumlah, sebaran, dan tingkat pendidikan)
4. Ketersediaan kebutuhan bahan pokok (jenis dan volume)
5. Sebaran produksi, monitoring harga dan sebaran kebutuhan bahan pokok.

C. Industri

Tujuan pokoknya adalah agar diketahui secara rinci kondisi aktual untuk bahan dasar dalam merumuskan lebih terarah revitalisasi sektor perdagangan berdimensi jangka pendek dan menengah agar terciptanya stabilisasi harga dan jaminan ketersediaan bahan pokok.

3.4 Identifikasi jumlah entitas usaha (business entities):

1. Yang sama sekali tidak bisa beroperasi
2. Yang diharapkan masih bisa beroperasi

IV. PERKIRAAN KEBUTUHAN DANA REHABILITASI & REKONSTRUKSI

4.1 Perikanan dan Kelautan

Rincian Rencana Revisi Anggaran APBN 2005
Dalam rangka Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Sumut

APBN Murni	:	Rp. 34,4 miliar
DIPA NAD	:	Rp. 22,55 miliar
DIPA UPT	:	Rp. 7,00 miliar
DIPA PEMP	:	Rp. 4,85 miliar
Pinjaman (Loan) ADB	:	Rp. 81,0 miliar
Cofish	:	Rp. 9,0 miliar
MCRMP	:	Rp. 45,0 miliar
COREMAP	:	Rp. 27,0 miliar
Jumlah	:	Rp. 115,4 miliar

Rincian Kebutuhan Anggaran 2006 - 2009

Dalam rangka Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Sumut

Rehabilitasi Kerusakan	:	Rp. 1.200 miliar
PPI	:	Rp. 145 miliar
Kapal	:	Rp. 286 miliar
Alat tangkap	:	Rp. 162 miliar
Tambak	:	Rp. 586 miliar
3 (tiga) UPT pusat	:	Rp. 21 miliar
Rehabilitasi ekosistem	:	Rp. 350 miliar
Modal kerja tahun pertama	:	Rp. 850 miliar
Budidaya	:	Rp. 150 miliar
Penangkapan	:	Rp. 700 miliar
Jumlah	:	Rp. 2.400 miliar

Jumlah Anggaran yang dipersiapkan untuk program mendesak tahun 2005 sebesar Rp. 122,1 miliar

Bersumber dari:

- DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun 2005 Provinsi dan 3 UPT Pusat sebesar Rp. 41,1 milyar
- Usulan Re-Programming *Loan ADB* sebesar Rp. 81 milyar

Tabel L.5.13.
Rencana Kegiatan Pokok dan Kebutuhan Anggaran
Pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam Rangka
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Sumut

No.	Kegiatan Pokok	2005	2006	2007	2008	2009	Jumlah (Rp. Juta)
1	Pengembangan perikanan tangkap	177.478	223.155	262.060	146.400	98.450	897.543
2	Pengembangan perikanan budidaya	252.437	389.609	295.232	7.318	7.318	951.914
3	Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk rehabilitasi ekosistem	77.450	129.050	98.100	70.900	29.100	404.600
4	Penguatan kelembagaan dan pemasaran	2.000	6.000	3.000	1.000	1.000	13.000
5	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	8.000	20.000	15.000	5.000	5.000	53.000
6	Riset kelautan dan perikanan	2.500	9.000	7.000	2.000	1.500	22.000
7	Pengembangan karantina ikan	1.138	5.125	3.610	2.100	2.100	14.073
8	Pengembangan diklat perikanan	5.000	16.275	6.340	5.830	4.925	38.370
	Jumlah	526.003	798.214	680.342	240.548	149.393	2.394.499

4.5. SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Usulan Rencana biaya rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ESDM sebesar Rp. 560,80 miliar, meliputi :

Lampiran 1

Kegiatan	Biaya
Sub Bidang Energi	
Bantuan BBM 461,19 KL (premium, kerosene, solar) Banda Aceh Meulaboh	1,716,469,002
Pengadaan/transportasi (BBM dan material) Medan-Banda Aceh	10,967.
Penggantian BBM yang hilang (premium, kerosene, solar, avtur Krueng Raya 77.934.49 KL Meulaboh 3.046 KL Penggantian BBM yang hilang (pelumas dan LPG) Krueng Raya	
Penanggulangan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan fasilitas penerimaan, penimbunan, dan penyaluran BBM di depot Banda Aceh Krueng Raya Meulaboh Simeulue	
Penanggulangan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan fasilitas dermaga khusus minyak dan fasilitas telekomunikasi di depot Krueng Raya Banda Aceh	
Evakuasi, akomodasi pekerja dan keluarga korban bencana Medan	
Pengamanan lokasi Banda Aceh Krueng Raya Meulaboh Calang	

KEGIATAN	BIAYA
SUB BIDANG ENERGI	
- Bantuan BBM 461,19 KL (Premium, kerosine, solar) Banda Aceh Meulaboh	1.716.469.002
- Pengadaan/transportasi (BBM dan material) Medan - Banda Aceh	10.967.424.019
- Penggantian BBM yang hilang (Premium, Kerosine, solar, avtur) Krueng Raya 77.934,49 KL Meulaboh 3.046 KL	4.861.803.834 8.754.728.337
- Penggantian NBBM yang hilang (pelumas dan LPG) Krueng Raya	13.136.671.648
- Penanggulangan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan fasilitas penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM di depot Banda Aceh Krueng Raya Meulaboh Simeulue	137.218.527.118
- Penanggulangan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan fasilitas dermaga khusus minyak dan fasilitas telekomunikasi di depot Krueng Raya Banda Aceh	4.786.918.110
- Evakuasi, akomodasi pekerja dan keluarga korban bencana Medan	23.588.650.000
- Pengamanan lokasi Banda Aceh Krueng Raya Meulaboh Calang	1.728.000.000

KEGIATAN	BIAYA
SUB BIDANG LISTRIK	
- Perbaikan Gardu Hubung (6 buah)& SCADA yang rusak	
Cabang Banda Aceh (GH 3buah & SCADA)	7.965.000.000
Cabang Meulaboh (GH 3 buah)	8.431.000.000
- Perbaikan Gardu Beton, Trafo Gardu Beton, Gardu Tiang, Trafo Gardu Tiang	
Cabang Banda Aceh (GB 14 buah, GT 244 buah, TGT 3.638 buah)	9.534.789.000
Cabang Meulaboh (GB 3 buah, GT 430 buah)	13.109.605.000
Cabang Sigli (GT 18 buah, TGT 12 buah)	545.892.000
Cabang Lhokseumawe (TGT 27 buah)	1.066.531.000
- Perbaikan JTM dan SUTM	
Cabang Banda Aceh (JTM 317,37 kms, SUTM 155 kms)	31.195.672.720
Cabang Meulaboh (JTM 672,84 kms, SUTM 515,86 kms)	68.525.536.520
Cabang Sigli (JTM 34,07 kms, SUTM 21,32 kms)	3.252.575.290
Cabang Lhokseumawe (JTM 21,10 kms, SUTM 15,50 kms)	1.976.906.400
- Perbaikan JTR yang rusak	
Cabang Banda Aceh (JTR 781,97 kms)	42.521.698.210
Cabang Meulaboh (JTR 909,52 kms)	49.457.655.610
Cabang Sigli (JTR 56 kms)	3.050.588.000
Cabang Lhokseumawe (JTR 645,10 kms)	35.202.247.800
- Perbaikan SR yang rusak	
Cabang Banda Aceh (52.989)	21.195.456.000
Cabang Meulaboh (27.647)	11.058.600.000
Cabang Sigli (8.190)	3.276.168.000
Cabang Lhokseumawe (3.189)	1.275.600.000
J U M L A H	312.641.521.550

KEGIATAN	BIAYA
SUB BIDANG GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
- Kajian Geologi, hidrooseanografi untuk penyusunan tata ruang terhadap dampak tsunami di kawasan pesisir dan laut Banda Aceh Meulaboh Lho Nga P Simeulue Calang Sigli Pidie Raya P Nias Lhokseumawe Subusalam	6.750.000.000
- Penyediaan air bersih melalui pembuatan sumur bor sebanyak 100 sumur	7.500.000.000
J U M L A H	14.250.000.000

KEGIATAN	BIAYA
- Pengoperasian kegiatan kantor cabang, depot, DPPU Banda Aceh Krueng Raya	700.000.000
- Pengoperasian kegiatan kantor depot Meulaboh	191.000.000
- Perawatan kesehatan Banda Aceh Krueng Raya Meulaboh	1.170.000.000
- Perbaikan retail outlet BBM Banda Aceh Krueng Raya Meulaboh	22.745.850
- Penggantian mobil tangki BBM yang rusak /hilang 19 unit Banda Aceh Krueng Raya Meulaboh	3.800.000.000
- Penanggulangan kegiatan alternatif distribusi BBM pasca darurat (contingency) Banda Aceh Krueng Raya Meulaboh	21.265.000.000
J U M L A H	233.907.937.918

Ket: - *Bila tidak ada perubahan tata ruang*
- *termasuk emergency*

TABEL L.5.14
MATRIK RENCANA TINDAK REHABILITASI & REKONSTRUKSI ACEH (NAD) & NIAS PASKA TSUNAMI
UNTUK SARANA DAN BANTUAN PRIVAT

Departemen Kelautan dan Perikanan

(dalam juta)

No.	JUSTIFIKASI MASING2 PRASARANA	PRASARANA/SARANA YG AKAN DIBANGUN	LOKASI KAB/KOTA	USULAN ANGGARAN					Total
				2005	2006	2007	2008	2009	
1	bantuan ke privat	a. Armada tangkap	21 Kabupaten/Kota	80,000	120,000	40,000	30,000	16,000	286,000
		b. Alat tangkap (pancing/jaring)	21 Kabupaten/Kota	45,000	70,000	25,000	15,000	7,000	162,000
		c. Pengolahan ikan skala kecil dan KUB	21 Kabupaten/Kota	7,000	10,000	6,000	5,000	2,000	30,000
2	kegiatan private	rehabilitasi tambak, bantuan pompa air, & modal usaha	Aceh Selatan	125	100	65	-	-	290
3	kegiatan private	rehabilitasi tambak, bantuan pompa air, & modal usaha	Simelue	480	-	-	-	-	480
4	kegiatan private	rehabilitasi tambak, bantuan pompa air, & modal usaha	Kota langsa	8,500	7,000	4,000	-	-	19,500
5	kegiatan private	rehabilitasi tambak, bantuan pompa air, & modal usaha	Aceh Timur	35,000	30,000	-	-	-	65,000
6	kegiatan private	rehabilitasi tambak, bantuan pompa air, & modal usaha	Aceh Utara	45,000	35,000	-	-	-	80,000
7	kegiatan private	rehabilitasi tambak, bantuan pompa air, & modal usaha	Sabang	1,500	-	-	-	-	1,500

No.	JUSTIFIKASI MASING2 PRASARANA	PRASARANA/SARANA YG AKAN DIBANGUN	LOKASI KAB/KOTA	USULAN ANGGARAN					Total
				2005	2006	2007	2008	2009	
8	kegiatan private	rehabilitasi tambak, bantuan pompa air, & modal usaha	Aceh Tamiang	6,500	6,000	-	-	-	12,500
9	kegiatan private	rehabilitasi tambak, bantuan pompa air, & modal usaha	Aceh Barat	2,700	2,700	1,200	-	-	6,600
10	kegiatan private	rehabilitasi tambak, bantuan pompa air, & modal usaha	Aceh Besar	9,600	9,000	4,000	-	-	22,600
11	kegiatan private	rehabilitasi tambak, bantuan pompa air, & modal usaha	Bireuen	26,000	1,000	-	-	-	27,000
12	kegiatan private	rehabilitasi tambak, bantuan pompa air, & modal usaha	Pidie	12,000	12,000	-	-	-	24,000
13	kegiatan private	rehabilitasi tambak, bantuan pompa air, & modal usaha	Banda Aceh	7,100	4,100	3,000	-	-	14,200
14	kegiatan private	rehabilitasi tambak, bantuan pompa air, & modal usaha	Lhokseumawe	10,000	9,000	-	-	-	19,000
15	kegiatan private	rehabilitasi tambak, bantuan KJA, & modal usaha	Nias	250	250	-	-	-	500
		TOTAL		296,755	316,150	83,265	50,000	25,000	771,170

form pokja ekonomi private.exel/aceh

TABEL L.5. 15
MATRIK RENCANA TINDAK REHABILITASI & REKONSTRUKSI ACEH (NAD) & NIAS PASKA TSUNAMI
UNTUK PRASARANA PUBLIK

Departemen Kelautan dan Perikanan

(dalam juta)

No.	JUSTIFIKASI MASING2 PRASARANA	PRASARANA YG AKAN DIBANGUN	LOKASI KAB/KOTA	USULAN ANGGARAN					Total
				2005	2006	2007	2008	2009	
1	prasarana publik	Pelabuha Pendaratan Ikan (PPI) Lampulo	Banda Aceh	21,000	4,200	690	1,000	1,100	27,990
2	prasarana publik	Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Lambada	Aceh Besar	9,800	2,600	500	-	-	12,900
3	prasarana publik	Pelabuhan Perikanan Kuala Tapu	Nagan Raya	9,800	2,600	500	-	-	12,900
4	prasarana publik	Pelabuhan Perikanan Sigli	Sigli	9,800	2,600	500	-	-	12,900
5	prasarana publik	Pelabuhan Perikanan Peudada	Bireun	9,800	2,600	500	-	-	12,900
6	prasarana publik	Pelabuhan Perikanan Lhoknga	Aceh Besar	9,800	2,600	500	-	-	12,900
7	prasarana publik	Pelabuhan Perikanan Ule-uieu	Banda Aceh	9,800	2,600	500	-	-	12,900
8	prasarana publik	Pelabuhan Perikanan Meuredeu	Pidie	21,000	4,200	800	1,100	1,000	28,100
9	prasarana publik	Pelabuhan Perikanan Melaboh	Aceh Barat	21,000	4,200	800	1,100	1,000	28,100
10	prasarana publik	Pelabuhan Perikanan Lhokseumawe	Lhokseumawe	21,000	4,200	800	1,100	1,000	28,100
11	prasarana publik	Pelabuhan Perikanan Calang	Aceh Jaya	21,000	4,200	800	1,100	1,000	28,100
12	prasarana publik	Pelabuhan Perikanan Pasiran, dan PPI Krueng Raya	Sabang	520	-	-	-	-	520
13	prasarana publik	Pelabuhan Perikanan Seuriget	Langsa	150	-	-	-	-	150
14	prasarana publik	Pelabuhan Perikanan Pulau Nias	Pulau Nias	9,800	2,600	500	-	-	12,900
15	kegiatan pusat/daerah	Masterplan & d/d pertambakan seluruh NAD		1,000	-	-	-	-	1,000
16	kegiatan pusat/daerah	D/D, Rehab.Sal tambak, dan Pembinaan budidaya	Aceh Selatan	480	230	170	110	110	1,100
17	kegiatan pusat/daerah	Pembinaan, dan pembangunan BBIP Simelue	Simelue	3,100	2,100	2,100	115	115	7,530

No .	JUSTIFIKASI MASING2 PRASARANA	PRASARANA YG AKAN DIBANGUN	LOKASI KAB/KOTA	USULAN ANGGARAN					Total
				2005	2006	2007	2008	2009	
18	kegiatan pusat/daerah	D/D, Rehab.Sal tambak, dan Pembinaan budidaya	Kota langsa	2,800	2,500	2,000	530	530	8,360
19	kegiatan pusat/daerah	D/D, Rehab.Sal tambak, dan Pembinaan budidaya	Aceh Timur	50,000	45,000	1,300	1,300	1,300	98,900
20	kegiatan pusat/daerah	D/D, Rehab.Sal tambak, dan Pembinaan budidaya	Aceh Utara	65,000	50,000	1,800	1,800	1,800	120,400
21	kegiatan pusat/daerah	D/D, Rehab.Sal tambak, dan Pembinaan budidaya	Sabang	800	230	200	230	230	1,690
22	kegiatan pusat/daerah	D/D, Rehab.Sal tambak, dan Pembinaan budidaya	Aceh Tamiang	45,000	40,000	700	700	700	87,100
23	kegiatan pusat/daerah	D/D, Rehab.Sal tambak, dan Pembinaan budidaya	Aceh Barat	3,600	3,600	1,800	-	-	9,000
24	kegiatan pusat/daerah	D/D, Rehab.Sal tambak, dan Pembinaan budidaya	Aceh Besar	6,200	6,200	350	350	350	13,450
25	kegiatan pusat/daerah	D/D, Rehab.Sal tambak, dan Pembinaan budidaya	Bireuen	34,500	32,000	1,000	1,000	1,000	69,500
26	kegiatan pusat/daerah	D/D, Rehab.Sal tambak, dan Pembinaan budidaya	Pidie	18,500	18,500	1,000	1,000	1,000	40,000
27	kegiatan pusat/daerah	BBU ule-ule, Loka Ujung Batee	Banda Aceh	17,000	14,000	6,200	250	250	37,700
28	kegiatan pusat/daerah	D/D, Rehab.Sal tambak, dan Pembinaan budidaya	Lhokseumawe	6,000	5,000	450	450	450	12,350
29	kegiatan pusat/daerah	BPIP Nias	Nias	1,100	1,100	120	120	120	2,560
30	kegiatan pusat/daerah	Pembangunan lab. uji mutu, dan pengolahan ikan di Lampulo	Banda Aceh	7,000	6,000	5,000	4,000	3,000	25,000
31	kegiatan pusat/daerah	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Ladong dan pengadaan kapal latih/riset	Banda Aceh	7,000	17,000	14,000	7,000	5,000	50,000
32	kegiatan pusat/daerah	Pos Karantina Ikan Sulatan Iskandar Muda	Banda Aceh	1,000	3,000	3,000	2,000	2,000	11,000
33	kegiatan pusat/daerah	Pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan	NAD & Sumut	10,000	9,000	8,000	8,000	8,000	43,000
		Total		454,350	294,660	56,580	34,355	31,055	871,000

<i>Pembangunan Pelabuhan</i>	Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : pembersihan lahan, pekerjaan turap, rehab. jalan komplek pelabuhan, drainase, dermaga, gedung TPI, pabrik es, pabrik dan gudang es, tangki dan sarana air bersih, SPDN, instalasi listrik dan penerangan, dok dan bengkel, instalasi pengolahan air limbah, pegerukan alur pelabuhan, kantor dan sarana umum lainnya, parkir dan pagar, dan jasa konsultan
<i>Rehab. Pertambakan</i>	Kegiatan meliputi : detail desain, normalisasi saluran tambak, pembinaan budidaya tambak, laut, dan budidaya rumput laut, temu lapang dan pendampingan

form pokja ekonomi publik.exel/aceh

4.2. Pertanian dan Pangan

Tabel L.5.16.
Persebaran Pengungsi dan Perkiraan kebutuhan Pangan:
Sektor Pertanian dan pangan

No	Kabupaten	Kebutuhan pangan (ton)						Total
		orang	per orang per hari	1 hari kg	0-3 bln	4-9 bln	10-20 bln	
					Jan-Mrt	Ap-Des 05	Jan-Okt.06	
					3 bln	6 bln	11 bln	
1	Sabang	3.654	0,4	1.462	132	263	482	877
2	Banda Aceh	17.412	0,4	6.965	627	1.254	2.298	4.179
3	Aceh Besar	116.984	0,4	46.794	4.211	8.423	15.442	28.076
4	Pidie	49.421	0,4	19.768	1.779	3.558	6.524	11.861
5	Bireun	35.648	0,4	14.259	1.283	2.567	4.706	8.556
6	Aceh Utara	97.942	0,4	39.177	3.526	7.052	12.928	23.506
7	Lhokseumawe	17.000	0,4	6.800	612	1.224	2.244	4.080
8	Aceh Timur	22.000	0,4	8.800	792	1.584	2.904	5.280
9	Langsa	-	0,4	-	-	-	-	-
10	Aceh Tamiang	2.800	0,4	1.120	101	202	370	672
11	Aceh Tenggara	-	0,4	-	-	-	-	-
12	Gayo Lues	-	0,4	-	-	-	-	-
13	Aceh Tengah	3.454	0,4	1.382	124	249	456	829
14	Aceh Barat	47.921	0,4	19.168	1.725	3.450	6.326	11.501
15	Nagan Raya	11.281	0,4	4.512	406	812	1.489	2.707
16	Aceh Jaya	31.465	0,4	12.586	1.133	2.265	4.153	7.552
17	Simeulue	22.849	0,4	9.140	823	1.645	3.016	5.484
18	Aceh Selatan	5.448	0,4	2.179	196	392	719	1.308
19	Aceh Barat Daya	-	0,4	-	-	-	-	-
20	Aceh Singkil	-	0,4	-	-	-	-	-
21	Bener Meriah	948	0,4	379	34	68	125	228
	Total	486.227		194.491	17.504	35.008	64.182	116.694

Tabel L.5.17.
Kapasitas Gudang, Penyaluran beras dan Stok beras
di NAD dan Sumut (Sektor Pertanian dan Pangan)

No	Lokasi	Kap. Gudang	Penyaluran beras s/d 18 Jan 2005	Stok saat ini	Space gudang
1	Banda Aceh	11.000	1.209.240	5.576.960	5.423.040
2	Sabang	1.500	60.000	601.000	899.000
3	Lhokseumawe	13.000	672.340	7.332.180	5.667.820
4	Takengon	1.500	102.000	1.262.720	237.280
5	Sigli	13.500	31.970	4.744.280	8.755.720
6	Langsa	7.000	160.370	5.807.050	1.192.950
7	Kutacane (+gd Subussalan)	7.500	8000	2.800.370	4.699.630
	MEulaboh (+ Gd Sinabang)	6.000	1.172.000	637.000	5.263.000
	Blang Pidie	4.000	100.000	1.490.000	2.510.000
	Raskin		94.100		
	Pasar Umum		209.140		
	Lain-lain		88.900		
	Total NAD	65.000.000	3.908.060	30.251.560	34.748.440
	Total Sumut	87.750.000	10.326.900	53.101.000	34.649.000
	Total NAD dan Sumut	152.750.000	14.234.960	83.352.560	69.397.440

Kemampuan stok nasional di luar ini adalah, stok pemerintah sebanyak 350 ribu ton dan stok yang dimiliki Perum BULOG sebesar 1,7 juta ton.

Tabel 18.
Rencana Mekanisme untuk Menjamin Pangan untuk Korban Tsunami

No.	Kegiatan	Jangka waktu		
		0-3 bln (Jan-Mrt)	4-9 bln (Ap-Des05)	10-20 bln (Jan-Ok06)
1	Penyediaan pangan:			
	a. Gratis melalui dapur umum			
	BULOG ¹ dan Depsos			
	<i>b. Food for work</i>			
	<i>c. Food for training</i>			
	<i>d. Food for counselling</i>			
	e. Raskin			
2	Menghidupkan lumbung masyarakat			

- Keterangan:**
- Dapur umum BULOG ada di 3 lokasi di Banda Aceh, yaitu di pengungsian Blang
 - 1 Bintang, Lampeunerut dan Desa Tanjung. 1 dapur umum pada umumnya melayani 1.200 orang pengungsi/hari.
 - 2 *Food for work/training/counselling* merupakan kerjasama dengan WFP.
 - 3 Raskin akan menggunakan alokasi Raskin 2005 dan memasukkan ke alokasi 2006.

TABEL L.5.19

**MATRIKS RENCANA TINDAK
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI ACEH (NAD) DAN NIAS PASCATSUNAMI
UNTUK PRASARANA PUBLIK
SEKTOR PERTANIAN**

(Dalam Rp. Juta)

INSTANSI	JUSTIFIKASI PEMBANGUNAN PRASARANA	PRASARANA YANG AKAN DIBANGUN	LOKASI	AKHIR PENYELESAIAN	USULAN ANGGARAN TAHUN 2005	USULAN ANGGARAN THN 2005-2009
DEPARTEMEN PERTANIAN	Mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan atau pembangunan kembali prasarana umum	<ol style="list-style-type: none">1. Rehabilitasi/pembangunan saluran air dan irigasi tersier dan kuarter (menurut skim dan tipe), dan rehabilitasi struktur lahan2. Rehabilitasi jalan usaha tani/produksi3. Pembangunan unit perbibitan/perbenihan4. Pembangunan fasilitas pemasaran hasil pertanian5. Pembangunan Pos Kesehatan Hewan (Poskeswan)6. Penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna7. Rehabilitasi/pembangunan prasarana dan sarana kerja pertanian (kantor Dinas, Karantina, Balai Penyuluhan, Balai Diklat Pertanian, dan laboratorium).	13 Kabupaten (Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Pidie, Bireun, Aceh Utara, Aceh Timur, Simeuleu, dan Nias).	5 Tahun (2005-2009)	Rp. 75.502	Rp. 492.142

TABEL L.5.20
MATRIKS RENCANA TINDAK
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI ACEH (NAD) DAN NIAS SUMUT PASCA TSUNAMI
UNTUK KEGIATAN PEMULIHAN ASET PRODUKTIF MASYARAKAT
SEKTOR PERTANIAN (Dalam Rp. Juta)

INSTANSI	JUSTIFIKASI KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	AKHIR PENYELESAIAN	USULAN ANGGARAN TAHUN 2005	USULAN ANGGARAN TAHUN 2005-2009
DEPARTEMEN PERTANIAN	Memulihkan usaha ekonomi masyarakat dan menumbuhkan partisipasi masyarakat/sawasta di sektor pertanian.	1. Ameliorasi tanah 2. Bantuan sarana pertanian dalam rangka reinisiasi produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. 3. Pengembangan pertanian terpadu. 4. Penyediaan modal kerja untuk usaha pertanian (hulu-onfarm-hilir). 5. Bantuan sarana pengolahan dan pemasaran hasil pertanian 6. Bantuan kios sarana produksi pertanian. 7. Bantuan Bimbingan, pelatihan, pendampingan dan pembinaan.	13 Kabupaten/kota (sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Timur, Aceh Barat daya, Pidie, Bireun, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Simeulue)	5 tahun (2005-2009)	Rp. 276.386	Rp 1.918.402
PERUM BULOG	Membantu memenuhi kebutuhan pokok (pangan) bagi korban bencana, sementara belum memperoleh pekerjaan dan pendapatan.	Bantuan Pangan	13 Kab/kota	5 tahun (2005-2009)	Rp. 175.915 (sudah tersedia dari dana Rutin)	Rp. 820.945

TABEL L.5.21
RENCANA KEGIATAN RINCI
DALAM RANGKA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS SUMUT
SEKTOR PERTANIAN
BERDASARKAN LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS

No	Nama Program	Nama Kegiatan/ Langkah	Sasaran	Kelompok Sasaran	Lokasi	Cakupan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Jadwal Waktu	Keterkaitan Dgn Program Lain	Instansi Pelaksana dan Penanggung Jawab	Perkiraan Biaya	Sumber Pembiayaan
I.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Verifikasi Data Area dan Kelompok Sasaran	Tersedianya data dan informasi kondisi lahan, tanaman, petani/pelaku usaha, dan infrastruktur sosial ekonomi pedesaan, serta tersusunnya rencana tindak yang lebih akurat	Pemangku kepentingan tingkat propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, mukim, dan desa	13 Kab/kota (Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Timur, Aceh Barat Daya, Pidie, Bireun, Aceh Utara, Simeulue)	(1) Pelatihan untuk enumerator lapangan, (2) Identifikasi kerusakan lahan, sarana, irigasi dan jalan usaha tani, (3) Identifikasi pranata sosial ekonomi pedesaan, (4) Identifikasi potensi dan kapasitas pengembangan usaha pertanian, (5) Analisa data primer dan sekunder, (6) Perumusan rencana tindak	(1) Terlaksananya survei di 13 Kab/Kota, (2) Diperolehnya data dan informasi, dan (3) Tersusunnya rencana tindak	3 Bulan (Mei-Juli 2005)	Program Pengembangan Agribisnis, Program Pemberdayaan Masyarakat Petani.	Badan Litbang dan Badan Pengembangan SDM Pertanian, Departemen Pertanian	Rp. 600 juta	APBN, FAO, IFAD, dan ADB

II	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Penyediaan Bantuan Pangan Pokok (Beras)	Terpenuhinya kebutuhan pangan pokok (beras) bagi sekitar 486 ribu jiwa pengungsi	Pengungsi Korban Bencana	16 Kabupaten/kota	Penyaluran bantuan beras kepada korban bencana yang tinggal di tempat-tempat pengungsian	Realisasi kuantum beras yang disalurkan dan jumlah pengungsi yang menerima bantuan pangan (beras)	18 bulan (Maret 2005 – Agustus 2006). Setelah itu sampai tahun 2009 akan diintegrasikan ke dalam program Raskin	Program-program yang berada di bawah koordinasi Departemen Sosial dan Menko Kesra	Perum BULOG	Rp. 820,9 milyar	APBN (Rutin)
III	Program Pengembangan Agribisnis dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pemulihan Fungsi Pelayanan Pemerintah	Normalisasi kegiatan instansi pertanian tingkat propinsi dan kabupaten/kota	Aparat pertanian di daerah	13 Kabupaten/kota	(1) Pemberian santunan kepada pegawai pertanian korban bencana, (2) Mobilisasi pegawai atau rekrutmen pegawai, (3) pendampingan, (4) Rehabilitasi prasarana dan sarana kerja	Berfungsinya kembali kegiatan pelayanan instansi pemerintah dalam sektor pertanian.	8 Bulan (April – Desember 2005)	Program Pengembangan Agribisnis, Program Pemberdayaan Masyarakat Petani	Departemen Pertanian	Rp. 386,5 milyar	APBN, PHLN
IV	Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Pengembangan Agribisnis dan Program Peningkatan Kesejahteraan	Pemulihan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Penumbuhan Partisipasi Masyarakat/Swasta	Normalisasi usaha ekonomi masyarakat di sektor pertanian	Petani dan pelaku usaha lainnya di sektor Pertanian	13 Kabupaten/kota	(1) Rehabilitasi/pembangunan saluran air dan irigasi tersier dan kuarter (menurut skim dan tipe), dan rehabilitasi struktur lahan, (2) Rehabilitasi jalan usaha	Pulih dan tumbuh kembali usaha ekonomi masyarakat di sektor pertanian, dan pulihnya kembali pelayanan	5 Tahun (2005 – 2009)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Departemen Pertanian	Rp. 2,06 triliun	APBN, PHLN

	Petani					tani/produksi, (3) Pembangunan unit perbibitan/perbenihan, (4) Pembangunan fasilitas pemasaran hasil pertanian, (5) Pembangunan Pos Kesehatan Hewan (Poskeswan), (6) Penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna, (7) Rehabilitasi/pembangunan prasarana dan sarana kerja pertanian (kantor Dinas, Karantina, Balai Penyuluhan, Balai Diklat Pertanian, dan laboratorium), (8) Ameliorasi tanah, (9) Bantuan sarana pertanian dalam rangka reinisiasi produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, (10) Pengembangan	teknis pertanian						
--	--------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--

						<p>pertanian terpadu, (11) Penyediaan modal kerja untuk usaha pertanian (hulu-onfarm-hilir), (12) Bantuan sarana pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, (13) Bantuan kios sarana produksi pertanian, (14) Bantuan Bimbingan, pelatihan, pendampingan dan pembinaan.</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel L.5.22
MATRIK RENCANA TINDAK
REHABILITASI & REKONSTRUKSI ACEH (NAD) & NIAS PASKA TSUNAMI UNTUK PRASARANA PUBLIK
Departemen Perindustrian

Dalam (Rp)

INSTANSI	JUSTIFIKASI MASING MASING PRASARANA	PRASARANA YANG AKAN DIBANGUN		LOKASI	AKHIR PENYELESAIAN	USULAN ANGGARAN
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	REKON SARANA LAB DAN SARANA BARISTAN	1	Pembangunan Gedung Kantor, Pelatihan dan Laboratorium 1.835 M2 x Rp 1,8 Juta	BANDA ACEH	2006	3,303,000,000
		2	Pengadaan dan Perbaikan Alat Laboratorium			7,000,000,000
		3	Pengadaan Perlengkapan Kantor			400,000,000
		4	Kegiatan Operasional Pendukung			500,000,000
						11,203,000,000
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	REKON SARANA LAB DAB SARANA SMTI	1	Pembersihan	BANDA ACEH	2006	3,328,225,000
		2	Alat Laboratorium			4,507,850,000
		3	Pengadaan Bahan Kimia			180,466,250
		4	Pengadaan peralatan dan			1,405,220,000
						9,421,761,250
TOTAL						20,624,761,250

Tabel 23
MATRIK RENCANA TINDAK
REHABILITASI & REKONSTRUKSI ACEH (NAD) & NIAS PASKA – TSUNAMI UNTUK PRASARANA PUBLIK
Departemen Perdagangan

Dalam (Rp)

INSTANSI	JUSTIFIKASI MASING-MASING PRASARANA	PRASARANA YANG AKAN DI BANGUN	LOKASI (Kab/Kota/Kecamatan)	AKHIR PENYELESAIAN	USULAN ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
Departemen Perdagangan	1 Tenda Pasar Darurat Masa Tanggap Darurat	Tenda Pasar Darurat Masa Tanggap Darurat di dirikan di 22 Kabupaten/Kota sebanyak 4800 tenda pasar darurat dengan harga per tenda sebesar Rp. 1.650.000,- (termasuk ongkos angkut dan pasang)	- Banda Aceh 700 buah - Pidie 300 buah - Aceh besar 300 buah - Bireuen 300 buah - Aceh Utara 250 buah - Lhokseumawe 150 buah - Aceh Timur 100 buah - Aceh Jaya 300 buah - Aceh Barat 300 buah - Nagan Raya 200 buah - Sinabang 100 buah - Aceh Barat Daya 100 buah - Aceh Selatan 100 buah - Aceh Singkil 100 buah	2005	7,999,200,000

	<p>2</p> <p>Pasar Tradisional</p> <p>Permanen</p> <p>Rehabilitasi / Rekonstruksi</p>	<p>Pasar Tradisional Permanen</p> <p>Tahap Rekonstruksi/Rehabilitasi</p> <p>Pembangunan kembali 193 pasar tradisional di Propinsi NAD dan Nias</p> <p>NAD & SUMUT per pasar Rp. 250.000.000,-</p> <p>a. TA 2005 NAD 29 dan SUMUT 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aceh Tenggara 100 buah - Gayo Luwes 100 buah - Aceh Tamiang 100 buah - Langsa 100 buah - Aceh Tengah 100 buah - Bener Meuriah 100 buah - Sabang 100 buah - Sumut/Nias 800 buah - Banda Aceh 1 unit (Kecamatan Meurax) - Aceh Besar 5 unit (Kec. Lhoknga, Leupung, Lhong, Krung Raya, Pulo Aceh) - Pidie 3 unit (Kec. Simpang Tiga , Kembang Tanjung, Panteraja) - Bireuen 3 unit (Kec. Samalanga, Krueng Mane, Kuta Blang) - Aceh Utara 2 unit, (Kec. Samtalira Bayu, Seuneudon) - Aceh Selatan 2 unit (Kec. Labuhan Haji, Trumon Timur) - Aceh Timur 2 unit (Kec. Idi Cut, Idi Rayek) - Aceh Selatan 2 unit(Kec. Labuhan Haji, Trumon Timur) - Aceh Jaya 4 unit (kec. Calang, Teunom, Sampoiniet, Panga) - Aceh Barat 2 unit (Kec. Kuala, Arongan Balek) - Abdya 2 unit (Kec. Susoh, Manggang) 	2005	8,000,000,000
--	---	--	---	------	---------------

			- Simeuleu 1 unit (Kec. Simeulue Timur) - Aceh Tamiang 1 unit (Kec. Seurewey) - Sabang 1 unit (Kec. Sukakarya) - Nias 3 unit (Kec. Sirombu, Manrehe, Liduho) - Menunggu konfirmasi	2006 s/d 2009	40,250,000,000	
Departemen	3	Pembangunan Pasar	Pembangunan Pasar	Propinsi NAD dan SUMUT	2006 s/d 2009	108,000,000,000
Perdagangan		Grosir/Induk	Grosir/Induk			
			di 18 Kabupaten/Kota sebanyak 18 buah dengan biaya			
			per Pasar Grosir/Induk Rp. 6.000.000.000,-			
	4	Pergudangan	Pembangunan fasilitas pergudangan sebanyak	Menunggu konfirmasi Propinsi NAD & SUMUT	2006 s/d 2009	47,500,000,000
			19 gudang dengan biaya per gudang			
			Rp. 2.500.000.000,-			
	5	Kemetrologian	Pengadaan alat laboratorium dan peralatan kantor	Menunggu konfirmasi Propinsi NAD & SUMUT	2005	3,000,000,000
			Metrologi		2006 s/d 2009	51,000,000,000
	6	Koordinasi Posko	Posko Koordinasi Sektor Perdagangan Pusat dan	PUSAT	2005	1,500,000,000
			Propinsi NAD.		2006 s/d 2009	3,500,000,000
				T o t a l	2005	20,499,200,000
					2006 s/d 2009	250,250,000,000

Tabel 24
MATRIKS RENCANA TINDAK
REHABILITASI & REKONSTRUKSI ACEH (NAD) & NIAS PASKA-TSUNAMI UNTUK PRASARANA PUBLIK
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (*Khusus Pariwisata*)

INSTANSI	JUSTIFIKASI MASING-MASING PRASARANA	PRASARANA YANG AKAN DIBANGUN	Lokasi	Akhir Penyelesaian	Usulan Anggaran
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata	Perlu dilakukan rehabilitasi/ rekonstruksi sarana dan prasarana di kawasan pariwisata serta objek dan daya tarik wisata (ODTW) yang rusak.	1 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pariwisata yang rusak terkena bencana di :			
		a. Kota Sabang	Sabang	Des 2005	Rp 750,000,000
		b. Kota Banda Aceh	Banda Aceh	Des 2005	Rp 600,000,000
		c. Kab. Aceh Besar	Aceh Besar	Des 2005	Rp 600,000,000
		d. Kab Aceh Tenggara	Aceh Tenggara	Des 2005	Rp 500,000,000
		e. Kab. Aceh Selatan	Singkil	Des 2005	Rp 350,000,000
		f. Kab. Simeulue	Sinabang	Des 2005	Rp 400,000,000
		g. Kab Aceh Barat Daya	Aceh Barat Daya	Des 2005	Rp 350,000,000
		h. Kab. Nias	Gunung Sitoli	Des 2005	Rp 300,000,000
		i. Kab Nias selatan	Nias Selatan	Des 2005	Rp 600,000,000
		j. Pengadaan sarana angkutan wisata darat	Banda Aceh	Des 2005	Rp 300,000,000
				Total 2005	Rp 4,750,000,000

TABEL L.5. 25
MATRIK RENCANA TINDAK
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI ACEH UNTUK PRASARANA PUBLIK

INSTANSI	JUSTIFIKASI MASING- MASING PRASARANA	PRASARANA YANG AKAN DIBANGUN		AKHIR PENYELESAIAN	KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp. Juta)	ALOKASI ANGGARAN	
		NAMA	LOKASI			Th. 2005 (Rp. Juta)	Th. 2006 (Rp. Juta)
Depnakertrans	Melatih masyarakat untuk dapat bekerja di bidang konstruksi	1 Balai Latihan Kerja (BLK) 1 unit (3.000 M2)	Lhoksumawe	Desember 2006	7.500	3.750	3.750
Depnakertrans	Melatih masyarakat untuk dapat bekerja di bidang konstruksi	2 Balai Latihan Kerja (BLK) 1 unit (3.000 M2)	Banda Aceh	Desember 2006	2.500	1.250	1.250
Depnakertrans	Melatih masyarakat di bidang wirausaha	3 Kantor Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah 1 unit (2.000 M2)	Meulaboh	Desember 2006	2.500	1.250	1.250
Depnakertrans	Melatih masyarakat di bidang wirausaha	4 Kantor Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah 1 unit (1.500 M2)	Langsa	Desember 2006	2.000	1.000	1.000
Depnakertrans	Melatih masyarakat di bidang nelayan	5 Balai Latihan Kerja (BLK) 1 unit (2.000 M2)	Sabang	Desember 2006	2.500	1.250	1.250
		TOTAL			17.000	8.500	8.500

TABEL L.5.26
MATRIK RENCANA TINDAK
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI ACEH
KEGIATAN NON FISIK TAHUN 2005

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp. Juta)
1	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja - Padat Karya produktif - Pengerahan 300 TKS - Mengatasi pengangguran 1.000 orang - Informasi bursa kerja - Pemetaan tenaga kerja daerah NAD	17.875
2	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja - Pelatihan masyarakat untuk 7 kejuruan - Latihan keterampilan untuk tenaga kerja	11.875
3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja - Penyusunan peta permasalahan HI - Bimbingan motivasi, disiplin dan etos kerja pegawai perantara dan staf HI dan pelaku HI - Pengawasan dan pemantauan dalam rangka mencegah eksploitasi Anak - Pemetaan obyek pengawasan - Penyelesaian status hubungan kerja dan hak normatif tenaga kerja pasca gempa dan tsunami - Penanganan tenaga kerja perempuan pasca gempa dan tsunami - Pelatihan calon pengawas ketenagakerjaan	12.400
	TOTAL	42.150

TABEL L.5.27
MATRIK RENCANA TINDAK
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI ACEH
KEGIATAN NON FISIK TAHUN 2006

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp. Juta)
1	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja - Pengembangan sarana dan prasaran HI di 9 Kab. - Pemeriksaan kesehatan fisik dan mental kerja - Memfasilitasi pembentukan Employee and Employer Assistance (EAP) sebagai sarana konseling bagi pekerja dan pengusaha - Pelatihan Occupational Therapy bagi dokter dan paramedis - Pembuatan pedoman penanganan pelanggaran norma kerja perempuan dan anak - Pembelian alat-alat uji keselamatan dan kesehatan kerja	10.350
	TOTAL	10.350

Tabel L.5.28
MATRIKS RENCANA TINDAK
REHABILITASI & REKONSTRUKSI ACEH (NAD) & NIAS PASKA-TSUNAMI UNTUK SARANA PUBLIK

INSTANSI	JUSTIFIKASI MASING2 PRASARANA	PRASARANA YANG AKAN DIBANGUN	LOKASI	AKHIR PENYELESAIAN	USULAN ANGGARAN 2005-2009 (Dalam Juta Rupiah)	USULAN ANGGARAN 2005 (Dalam Juta Rupiah)	USULAN ANGGARAN 2006 (Dalam Juta Rupiah)
		1. Perbaikan Fasilitas Kios UKM. 2. Perbaikan Gerobak Dorong UKM. 3. Pendataan Profil Koperasi. 4. Pendataan Profil UKM.	Banda Aceh	2005 2005 2005 2005	255 153 15 20	255 153 15 20	
		Renovasi Pasar Tradisional (8 Pasar).	Aceh Besar	2005	840	840	
		1. Pembangunan Kembali Pasar Bina Usaha (Pasar Grosir). 2. Pembangunan Kembali Pasar Larang Sawi (Pasar Eceran). 3. Pembangunan Kembali Pasar-2 Ikan. 4. Pembangunan Kembali TPI.	Aceh Barat	2005-2006 2005-2006 2005 2005-2006	4.000 3.600 360 2.400	1.140 1.000 360 600	715 650 450
		Perbaikan Sarana dan Prasarana Pasar.	Aceh Jaya	2005-2006	7.950	3.915	1.008,75
		Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Hancur/Hanyut	Aceh Utara	2005	2.000	2.000	

INSTANSI	JUSTIFIKASI MASING2 PRASARANA	PRASARANA YANG AKAN DIBANGUN	LOKASI	AKHIR PENYELESAIAN	USULAN ANGGARAN 2005-2009 (Dalam Juta Rupiah)	USULAN ANGGARAN 2005 (Dalam Juta Rupiah)	USULAN ANGGARAN 2006 (Dalam Juta Rupiah)
		Rehabilitasi/Renovasi Sarana dan Prasarana Pasar	Simeulue	2005	400	400	
		Rehabilitasi Pasar Tradisional	Nagan Raya	2005	500	500	
		embangunan Pasar Tradisional	Sabang	2005	1.175	1.175	
		Perbaikan Sarana dan Prasarana Pasar	Pidie	2005-2006	2.500	1.500	250
		Perbaikan Sarana dan Prasarana Pasar	Bireuen	2005-2006	4.105	1.000	175
		Perbaikan Sarana dan Prasarana Pasar	Aceh Timur	2006	2.130		588
		Pembuatan Pasar Tradisional (300 Unit Kios & 550 Unit Tenda)	Langsa	2006	6.215		3.857
		Perbaikan Sarana dan Prasarana Pasar	Tamiang	2005	1.000		
		Pembangunan Sarana Usaha Pasar Darurat	Aceh Selatan	2005	32	30	

INSTANSI	JUSTIFIKASI MASING2 PRASARANA	PRASARANA YANG AKAN DIBANGUN	LOKASI	AKHIR PENYELESAIAN	USULAN ANGGARAN 2005-2009 (Dalam Juta Rupiah)	USULAN ANGGARAN 2005 (Dalam Juta Rupiah)	USULAN ANGGARAN 2006 (Dalam Juta Rupiah)
		Perbaikan/Renovasi Sarana dan Prasarana Pasar Ikan yang Dikelola Koperasi	Aceh Barat Daya	2005	250	250	
		Pembangunan 3 Pasar	Aceh Singkil	2005-2006	5.000	300	1.175
		Pembangunan Sarana Usaha Pasar Darurat	Aceh Tengah	2006	16.400		4.100
		Rehabilitasi Pasar Tradisional	Bener Meriah	2005-2006	600	300	150
		Rehabilitasi/Renovasi Pasar	Nias	2005-2006	1.350	425	350
		JUMLAH			73.250	16.178	13.468,75

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO